



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

LAPORAN TAHUNAN

Capaian Program
dan Kegiatan

2019



**PERIZINAN ONLINE
MENUJU INDUSTRI 4.0**



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

LAPORAN TAHUNAN

Capaian Program
dan Kegiatan

2019

PERIZINAN ONLINE

MENUJU INDUSTRI 4.0



LAPORAN TAHUNAN

Capaian Program
dan Kegiatan

2019

PERIZINAN ONLINE

MENUJU INDUSTRI 4.0



TENTANG LAPORAN INI

Selamat datang di Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2019 dengan tema “Perizinan *Online* Menuju Industri 4.0”. Tema tersebut dipilih berdasarkan kondisi perusahaan subsektor migas saat ini dan sesuai dengan arahan Presiden RI untuk meningkatkan investasi melalui penyederhanaan perizinan.

Kegiatan penyederhanaan perizinan secara *online* telah dilakukan di tahun 2019 melalui proses yang cukup komprehensif dan melibatkan *stakeholder* terkait sebagai upaya bersama untuk meningkatkan investasi sektor ESDM.

Laporan Tahunan 2019 menjadi sumber dokumentasi yang komprehensif, sebagai rangkuman dari hasil capaian pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Tujuan utama penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat luas. Selain itu, Laporan Tahunan ini juga bertujuan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan, melalui penyediaan informasi yang tepat, seimbang, dan relevan.

LAPORAN TAHUNAN

Capaian Program
dan Kegiatan

2019

PERIZINAN ONLINE

MENUJU INDUSTRI 4.0



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUSUNAN REDAKSI

PELINDUNG

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur
Minyak dan Gas Bumi

PEMIMPIN REDAKSI

Kepala Bagian Rencana dan Laporan

EDITOR

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan

TIM PENYUSUN

Mochamad Imron, Aghnia Granittia B., Anggi M. Adriawan,
Alfin Ali, Sarah Alsa, Koesnobroto S., Maria R., Soraya A.,
Nadiar C.R, Dimas O.P, Andriany N.,
Elisabeth D.K., Wahyu D., Beni H, Fahmi M, Tafaqquh,
Sriyani S., M. Kusmianto, Nadia L., Nova P., Firman S.,
Bonar M., Purwanti, Nia M., Rezki D., F. Rozi F.,
Siti Nurbayanah, Aulia F.R, R. Adib P., Rahman

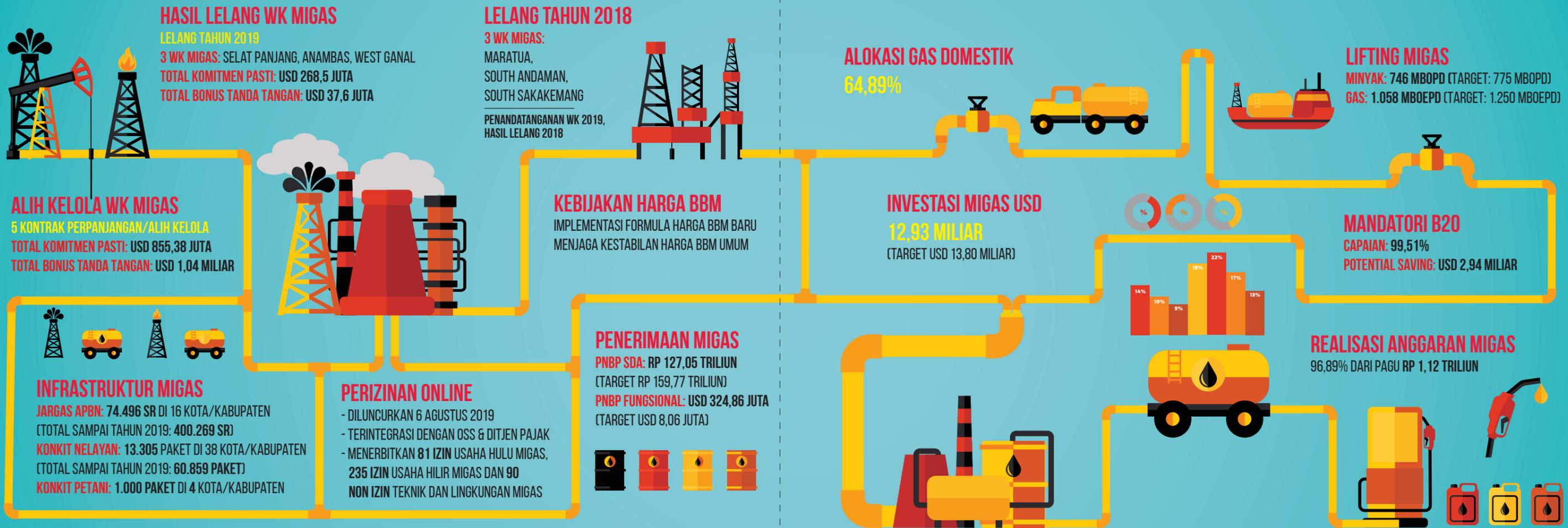


DAFTAR ISI

	TENTANG LAPORAN INI	2
01	PENDAHULUAN Capaian Kinerja Ditjen Migas 2019 Peristiwa Penting 2019 Laporan Pimpinan Profil Pimpinan Profil Organisasi Penghargaan Ditjen Migas 2019	8 10 14 16 20 25
02	BAB TEMATIK PERIZINAN ONLINE MENUJU INDUSTRI 4.0	26
03	BAB CAPAIAN DITJEN MIGAS 2019 Capaian Hulu Migas Capaian Hilir Migas Capaian Infrastruktur Migas Dukungan Kegiatan Pengelolaan Migas Lainnya Dukungan Kegiatan Lainnya	32 34 70 112 124 146

CAPAIAN KINERJA 2019

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI



PERISTIWA PENTING 2019

8 Januari 2019

Resmikan Jaringan Gas Kota Pasuruan, Jonan: Wujud Keberpihakan Pemerintah Kepada Rakyat
Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan meresmikan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga (Jargas) Di Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Pembangunan jargas di Kota Pasuruan dilakukan pada tahun 2018 melalui penugasan kepada PT PGN sebanyak 6.314 SR.



2019 01



17 Januari 2019

Penandatanganan Perubahan Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja (Wk) Dukung Menjadi Gross Split
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar, menyaksikan penandatanganan perubahan kontrak kerja sama Wilayah Kerja (WK) Dukung yang semula menggunakan skema bagi hasil cost recovery menjadi gross split. Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Dukung sebelumnya ditandatangani tanggal 16 Januari 2007 dan saat ini masih berstatus Wilayah Kerja Eksplorasi dengan kontraktor West Natuna Exploration Ltd.

6 Februari 2019

Menteri Jonan Lantik 26 Pejabat
Bertempat di Ruang Sarulla, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, melantik dan mengambil sumpah 26 pejabat di lingkungan Kementerian ESDM. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Jonan meminta agar para pejabat dapat bekerja dengan lebih baik, berkarya dan mengabdikan untuk bangsa dan negara.



02



21 Februari 2019

Penawaran WK Migas Tahap I Tahun 2019: Pemerintah Lelang 5 WK Konvensional
Bertempat di Ruang Damar Kementerian ESDM, Pemerintah mengumumkan Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahap I Tahun 2019 yang terbuka kepada seluruh Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap pada kegiatan hulu minyak dan gas bumi. Wilayah kerja (WK) migas yang ditawarkan sebanyak 5 WK, terdiri dari 2 WK eks produksi yaitu WK Selat Panjang dan West Kampar serta 3 WK eksplorasi yaitu WK Anambas, West Galan, dan West Kaimana.

5 Maret 2019

Indonesia – US – Japan LNG Workshop
Indonesia – US – Japan LNG Workshop diselenggarakan di Hotel Pullman Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah terus berupaya meningkatkan ketahanan energi nasional dengan mendorong pemanfaatan gas di Indonesia melalui kerjasama dengan Pemerintah Amerika Serikat dan Jepang dalam mengembangkan bisnis LNG di Indonesia.



03



28 Maret 2019

Aplikasi e-Lelang WK Migas Raih Penghargaan Teknologi Informasi dan Inovasi Terbaik
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meraih Penghargaan Top IT & Innovation: Leadership on Energy & Mineral Resources Sector Transformation 2019 pada Itech Awards di Jakarta. Penghargaan ini diraih Kementerian ESDM melalui tiga aplikasi pelayanan publik, yakni Aplikasi Mineral Online Monitoring System (MOMS), e-PNBP Mineral dan Batubara, dan e-Lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

9 April 2019

Pemerintah Operasikan PLTMG Ternate
Pemerintah melalui Kementerian ESDM mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) berkapasitas 30 MW di PLN Kastela, Kota Ternate, Maluku Utara. Peresmian pengoperasian PLTMG yang merupakan satu-satunya di wilayah Indonesia Timur ini, dilakukan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto.



04



29 April 2019

Penandatanganan Kerja Sama antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berkomitmen mengurangi emisi gas buang demi menciptakan lingkungan yang lebih baik. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan campuran minyak sawit (CPO) dengan minyak solar. Saat ini, campuran keduanya telah mencapai 20%.

7 Mei 2019

Pengumuman Pemenang Lelang WK Migas Tahap I 2019
Dari 5 WK yang ditawarkan diperoleh 2 pemenang yaitu WK Anambas (Eksplorasi) dimenangkan oleh Kufpec Regional Ventures (Indonesia) Limited dan WK Selat Panjang (Produksi) dimenangkan oleh Konsorsium Sonoro Energy Ltd - PT Menara Global Energi. Total bonus tanda tangan yang diterima dari 2 WK tersebut senilai US\$ 7.500.000 dan total komitmen pasti US\$ 109.200.000.



05



28 Mei 2019

Kesepakatan Pengembangan Blok Masela
Pemerintah dan Inpex Corporation menandatangani kesepakatan pengembangan Blok Masela mencapai US\$ 20 miliar. Selain itu, skema bagi hasil mencapai win-win solution di mana Pemerintah mendapat bagian sekurang-kurangnya 50%. Kesepakatan ini diperoleh dalam pertemuan lanjutan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dengan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda di Tokyo.

13 Juni 2019

Launching Road Test Penggunaan Bahan Bakar B30
Menteri ESDM Ignasius Jonan didampingi Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, melakukan Launching Road Test Penggunaan Bahan Bakar B30 (campuran biodiesel 30% pada bahan bakar solar) pada kendaraan bermesin diesel. Launching Road Test B30 ini ditandai dengan pelepasan keberangkatan 3 unit truk dan 8 unit kendaraan penumpang berbahan bakar B30 yang masing-masing akan menempuh jarak 40 ribu dan 50 ribu kilometer.



06



12 Juni 2019

Presiden Jokowi Tetapkan Aturan Tentang Penyediaan LPG untuk Nelayan dan Petani
Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 12 Juni 2019 telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran. Penetapan ini dengan pertimbangan bahwa untuk menjamin ketahanan energi nasional serta meningkatkan kesejahteraan nelayan sasaran dan petani sasaran.

PERISTIWA PENTING 2019

23 Juli 2019

Pertemuan 8th ASEAN+3 Oil Market and Natural Gas Forum and Business Dialogue

Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Soerjaningsih, membuka Pertemuan 8th ASEAN+3 Oil Market and Natural Gas Forum and Business Dialogue yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (23/7). Pertemuan ini merupakan rangkaian pertemuan sektor energi negara-negara ASEAN bersama negara +3 (RRT, Jepang, Korea Selatan) yang secara khusus membahas mengenai perkembangan sektor minyak dan gas bumi di kawasan ASEAN dan +3.



2019 07



14 Juli 2019

Menteri ESDM Teken PoD Blok Gas Raksasa Masela

Menteri ESDM Ignasius Jonan menandatangani revisi rencana pengembangan (PoD) Blok Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku. Penandatanganan PoD merupakan tindak lanjut diketennya *Head of Agreement* (HoA) di Jepang tanggal 16 Juni lalu, oleh Kepala Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto dan Shunichiro Sugaya, President Direktur INPEX Indonesia serta disaksikan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang, Hiroshige Seko.

6 Agustus 2019

Kementerian ESDM Luncurkan Aplikasi Perizinan Online

Kementerian ESDM meluncurkan Aplikasi Perizinan Online ESDM yang meliputi perizinan di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) di Ruang Sarulla Kementerian ESDM. Peluncuran tersebut sebagai upaya Kementerian ESDM untuk meningkatkan layanan investasi dan mempermudah proses pengajuan berusaha serta mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).



08



15 Agustus 2019

Konferensi Pers Peristiwa sumur YYA-1 milik Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java (PHE ONWJ)

Pada kesempatan tersebut, Kasubdit Keselamatan Hulu Direktorat Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Mirza Mahendra menjelaskan, pihaknya menurunkan tim untuk melakukan pengawasan dan pemantauan atas upaya penanganan yang dilakukan di lapangan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pertamina bersinergi dalam menangani peristiwa yang terjadi di sumur YYA-1 milik Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java (PHE ONWJ).

4 September 2019

43rd IPA Convention & Exhibition

Pada acara pembukaan 43rd IPA Convention & Exhibition tersebut, Menteri ESDM menegaskan kepada KKKS pentingnya melakukan efisiensi atas biaya produksi atau biaya eksplorasi dengan menggunakan teknologi yang lebih *up to date*.



09



27 September 2019

Malam Penghargaan Subroto

Malam Penghargaan Subroto digelar di Djakarta Theater. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan didampingi Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, menyerahkan Penghargaan Subroto 2019 kepada 8 perusahaan migas yang memperoleh Penghargaan Keselamatan Migas Kategori Tanpa Kehilangan Jam Kerja Sebagai Akibat Kecelakaan.

15 Oktober 2019

Peresmian Gedung Ibnu Sutowo

Disaksikan para pejabat serta segenap tamu undangan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), peresmian gedung ditandai dengan penekanan sirine secara bersama-sama, oleh Plt. Direktur Jenderal Migas dan putra-putri Ibnu Sutowo yakni Pontjo Nugro Susilo, dr. Sri Hartati, Endang Utari, dan Handara. Sebagai informasi, Ibnu Sutowo adalah Menteri Minyak dan Gas Bumi (saat ini dikenal dengan Menteri ESDM) pada Kabinet Dwikora II dan Dwikora III (21 Februari 1966 – 25 Juli 1966). Dia merupakan Menteri Minyak dan Gas Bumi ketiga, setelah Chaerul Saleh dan Armunanto.



10



23 Oktober 2019

Serah Terima Jabatan Menteri ESDM

Presiden Joko Widodo telah melantik dan mengambil sumpah Arifin Tasrif sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2019-2024 di Istana Negara, Rabu (23/10) pagi. Usai pelantikan, dilakukan serah terima jabatan dari Ignasius Jonan kepada Arifin Tasrif di Ruang Sarulla, Kementerian ESDM.

12 November 2019

Pembagian Paket Konkrit untuk Nelayan

Pemerintah c.q Kementerian ESDM membagikan paket perdana Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran Tahun 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Jumlah tersebut merupakan terbesar untuk tahun ini.



11



12 November 2019

Pembagian Paket Perdana Konversi BBM ke LPG 3 Kg untuk Petani

Mulai tahun 2019, Program Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) diperluas, menasar para petani. Sebanyak 1.000 paket perdana Konversi BBM ke LPG 3 Kg untuk Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran dibagikan secara gratis, di mana 350 petani di Kabupaten Sragen berkesempatan menjadi penerima pertama program Pemerintah ini.

17 Desember 2019

Peresmian SPBG di Karawang

Bertempat di SPBG (Karawang International Industrial City/KIIC) Jl Permata Raya, Puseurjaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahril, didampingi Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto, serta First Secretary Embassy of Japan in Indonesia, Nakayama Fumihiro, meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Kabupaten Karawang.



12



23 Desember 2019

Presiden Jokowi Resmikan Implementasi B30

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meresmikan implementasi pencampuran Bahan Bakar Nabati atau Biodiesel sebanyak 30% (B30) pada BBM jenis minyak solar mulai 1 Januari 2020, di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta. Program B30 merupakan upaya Pemerintah melepaskan diri terhadap energi fosil, mengurangi ketergantungan impor BBM, serta menghemat devisa negara Rp 63 triliun. Indonesia pun tercatat sebagai negara pertama yang mengimplementasikan B30 di dunia.

LAPORAN PIMPINAN



Assalamu alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Salam Energi!

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, dan berhasil melalui tahun 2019 dengan pencapaian kinerja yang baik.

Di tengah tantangan perekonomian global dan efisiensi anggaran, Direktorat Jenderal Migas tetap fokus pada tujuan pencapaian target kinerjanya dalam mendukung pembangunan nasional dan memberikan pelayanan publik. Bentuk keseriusan tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan belanja publik fisik dan non-fisik yang mencapai 96,89% dari pagu yang dianggarkan, meningkat dari tahun sebelumnya. Sebanyak 67% anggaran dialokasikan untuk Belanja Modal di mana sebagian besar merupakan kegiatan pembangunan infrastruktur yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Tantangan menghadapi industri 4.0 juga telah kami jawab melalui peluncuran aplikasi Perizinan *Online* ESDM untuk meningkatkan layanan investasi dan mempermudah proses pengajuan berusaha serta mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Beberapa capaian penting pada tahun 2019 telah berhasil kami raih. Di antaranya, keberhasilan ditandatanganinya 3 wilayah kerja baru eksplorasi migas hasil lelang 2019 menggunakan skema kontrak PSC *Gross Split* dengan bonus tanda tangan sebesar USD 37,6 juta, dan 5 Wilayah Kerja Perpanjangan/ Alih Kelola dengan bonus tanda tangan sebesar USD 1,04 miliar.

Di samping itu, sebagai upaya untuk meningkatkan investasi migas dan mendorong kegiatan eksplorasi dalam rangka penemuan cadangan baru, Direktorat Jenderal Migas telah berperan aktif dalam penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagai pengganti Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 tahun 2006. Dengan peraturan baru tersebut, data kegiatan hulu migas menjadi lebih terbuka, mudah diakses dan gratis melalui sistem *membership*.

Pemerintah terus berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan energi yang terjangkau bagi masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap impor produk. Salah satu upayanya adalah dengan menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 187 K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan. Melalui penyesuaian harga tersebut, Pemerintah berharap mampu menjangkau daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

Dalam upaya untuk mengurangi impor BBM, pemerintah telah berhasil mengimplementasikan program pencampuran biodiesel 20% pada bahan bakar solar atau yang lebih dikenal dengan nama Program Mandatori B20,



dengan *potensial saving* dari pengurangan impor solar sebesar USD 2,94 miliar. Program tersebut akan terus dijalankan dengan senantiasa meningkatkan tingkat campuran biodiesel pada bahan bakar solar secara bertahap.

Pada kegiatan infrastruktur migas yang mayoritas didanai APBN, target pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 74.496 Sambungan Rumah telah terealisasi dengan baik. Sehingga dari 2009 sampai dengan 2019 ini, total kumulatif jaringan gas bumi untuk rumah tangga yang sudah terbangun adalah sebanyak 400.269 Sambungan Rumah. Untuk mendukung program pembangunan jaringan gas tersebut, Direktorat Jenderal Migas juga telah menyiapkan regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

Program konversi BBM ke BBG berupa pembagian paket converter kit untuk nelayan kecil yang sudah dimulai sejak tahun 2016 juga terus dilaksanakan. Pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui penugasan kepada PT Pertamina (Persero) telah melaksanakan kegiatan konversi BBM ke BBG untuk nelayan sebanyak 13.305 paket yang terdistribusi di 38 kabupaten/kota. Sehingga sampai dengan tahun 2019 ini, paket converter kit yang sudah dibagikan adalah sebanyak 60.859 paket. Program konversi BBM ke BBG juga dilakukan pada bidang pertanian dengan harapan para petani dapat meningkatkan produktivitasnya. Pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Migas telah melaksanakan kegiatan konversi BBM ke BBG untuk Petani sebanyak 1.000 paket yang terdistribusi di 4 Kabupaten/kota. Program Konversi BBM ke BBG untuk Petani tersebut merupakan *Pilot project* yang akan terus dilanjutkan secara bekesinambungan.

Berbagai capaian pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi lainnya juga telah terdokumentasikan dalam buku ini. Hal tersebut tidak terlepas dari usaha seluruh unit dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Maka, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan atas capaian kinerja yang tertuang dalam Laporan ini.

Akhir kata, semoga Laporan Tahunan ini dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pembaca.

Jakarta, Januari 2020
Plt. Direktur Jenderal

DR. Ir. Djoko Siswanto M.B.A

PROFIL PIMPINAN



Dr. Ir. Djoko Siswanto, MBA

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Djoko Siswanto telah mengemban amanat sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi sejak tahun 2018. Sebelumnya, berbagai jabatan strategis lainnya juga pernah disandang pria kelahiran Jakarta, 23 Mei 1965 ini, misalnya Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi (2016-2017), Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (2015-2018), Direktur Gas Bumi BPH Migas (2014-2016), Direktur BBM BPH Migas, Sekretaris BPH Migas (2013-2014), Ketua Pokja BPH Migas serta Kasubag Evaluasi dan Laporan Ditjen Migas. Pengabdianya kepada negara sejak tahun 1992, membuat lulusan S3 Institut Teknologi Bandung Jurusan Teknik Perminyakan ini menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya X Tahun 2002 dan Satyalancana Karya Satya XX Tahun 2012. Sebelumnya, pada pertengahan tahun 2019 ia dilantik menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional hingga saat ini dan sempat merangkap jabatan sebagai Plt Dirjen Migas hingga awal tahun 2020.



Iwan Prasetya Adhi S.E.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Sejak tahun 2018, pria kelahiran Malang, 21 Juni 1962 ini menempati posisi Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Beberapa jabatan lulusan S1 Universitas Diponegoro Jurusan Akuntansi ini sebelumnya antara lain Sekretaris Inspektorat Jenderal (2017-2018), Inspektur III (2017), Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2016-2017), dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (2015-2016), Kepala Bagian Keuangan 2014 - 2015. Merintis karier sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sejak tahun 1983, ia pun telah mendapat tiga penghargaan, yakni Satyalancana Karya Satya XXX Tahun 2013, Satyalancana Karya Satya X Tahun 2015, dan Satyalancana Karya Satya XX Tahun 2015.



Dra. Soerjaningsih M.K.K.K.

Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi

Wanita kelahiran Pacitan, 14 Mei 1966 ini menduduki jabatan Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi sejak tahun 2018. Pemilik gelar S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Universitas Indonesia mulai meniti karier dari bawah. Sebelum menempati jabatan Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi, sejumlah jabatan sebelumnya yang ditempati oleh ibu satu anak ini di antaranya Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi (2018), Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi (2017-2018), Kepala Subdirektorat Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi (2015-2017), dan Kepala Subdirektorat Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi (2011-2015). Atas pengabdianya, Soerjaningsih telah menerima tanda jasa berupa Satyalancana Karya Satya X Tahun 2001 dan Satyalancana Karya Satya XX Tahun 2010. Selain itu, telah puluhan kali dirinya mendapat penugasan hingga ke luar negeri.



Ilr. Mustafid Gunawan M.E.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Pada tahun 2018, ia menempati jabatan Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi. Di tahun yang sama, pria lulusan S2 Universitas Indonesia Jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik ini juga menduduki posisi Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Jabatan terakhir inilah yang tetap diembannya sampai sekarang. Sejumlah jabatan lainnya yang pernah diamanatkan kepada ayah dua anak ini antara lain Kepala Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional (2015-2018), Kepala Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional (2013-2015), dan Kepala Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (2011-2013). Mengabdikan kepada negara sejak 1992, pria kelahiran Yogyakarta, 8 September 1965 ini mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya X Tahun 2002 dan Satyalancana Karya Satya XX Tahun 2012. Tak hanya itu, beberapa kali dirinya juga mendapat penugasan ke luar negeri, seperti promosi WK Migas Konvensional pada Pameran Asia Petroleum Geoscience Conference & Exhibition (APGCE) tahun 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia dan pameran Promosi Penawaran WK Migas tahun 2008 pada Forum Society of Exploration Geophysicists di Amerika Serikat (AS).

PROFIL PIMPINAN



Ir. Mohammad Hidayat

Direktur Pembinaan Usaha Hilir
Minyak dan Gas Bumi

Sebelum mengemban amanat sebagai Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2019, pria kelahiran Gresik, 2 Juli 1960 ini menempati jabatan sebagai Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana. Sejumlah jabatan lainnya yang pernah diembannya antara lain Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tahun 2017-2019, Direktur Pembinaan Perusahaan Mineral (2015-2017), Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (2013-2014), Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (2013), dan Kepala Subdirektorat Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (2011-2013). Lulusan S1 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jurusan Teknik Kimia ini tiga kali menerima penghargaan, yakni Satyalancana Karya Satya XXX Tahun 2017, Satyalancana Karya Satya XX Tahun 2007, dan Satyalancana Karya Satya X Tahun 1999. Dia beberapa kali juga mendapat penugasan hingga ke luar negeri, misalnya menghadiri pameran Promosi Penawaran Wilker Migas Tahun 2008 pada Forum Society of Exploration geophysicists (SEG) dan the 34 meeting of the APEC Energy Working Group and Associated Meetings di tahun 2007.



Dr. Ir. Adhi Wibowo M.Sc.

Direktur Teknik dan Lingkungan
Minyak dan Gas Bumi

Pria lulusan S3 Institut Teknologi Bandung (ITB) Jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika ini menempati jabatan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi sejak tahun 2018. Sebelumnya, sejumlah posisi pernah diembannya, antara lain Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi, Kepala Biro Umum, dan Analis Kebijakan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS". Pria kelahiran Yogyakarta, 23 November 1960 ini telah meniti karier sejak tahun 1993 di Direktorat Jenderal Pertambangan Umum. Atas pengabdian panjangnya ayah dua anak ini menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya X Tahun 2001, Satyalancana Karya Satya XX Tahun 2009, dan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun 2018. Selain itu, ia juga kerap mendapat penugasan hingga ke luar negeri, seperti menghadiri 74th Meeting of the Committee on Energy Research and Technology dan The 4th Indonesia-France Working Group on Energy and Mineral Resources di Perancis tahun 2016 serta Pertemuan 11th ASOMM (ASEAN senior Officials Meeting on Minerals), 8th ASOMM Working Groups, 4th ASOMM+3 Consultations dan 3rd AMMin (ASEAN Ministerial Meeting on Minerals) di Vietnam tahun 2011.



Alimuddin Baso S.T. M.A.B.

Direktur Perencanaan dan
Pengembangan Infrastruktur Minyak
dan Gas Bumi

Perjalanan kariernya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dimulai sejak tahun 1997. Saat itu, pangkatnya adalah penata muda. Tahap demi tahap, karier ayah empat anak ini beranjak naik hingga menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi yang dipercayakan kepadanya sejak tahun 2016. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan (2014-2016), Auditor Madya (2012-2014), Auditor Muda (2007-2012) dan Auditor Ahli Pertama (2004-2007). Lulusan S2 Magister Administrasi Bisnis di STIA LAN ini menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya X Tahun 2007 atas sumbangsuhnya kepada bangsa. Dalam menjalankan tugasnya, ia juga menambah bekal pengetahuan dengan mengikuti sejumlah pelatihan atau kursus hingga ke luar negeri, seperti Extractive Industries and Sustainable Development Executive Training Program di Columbia University, Amerika Serikat (AS) tahun 2016 dan Eighth Training Course on Energy Conservation di Tokyo, Jepang tahun 2008.

PROFIL ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. penyusunan norma, standar, produser, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

NILAI-NILAI ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1808 K/07/MEM/2015 tentang Nilai-nilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ditetapkan bahwa nilai-nilai Kementerian ESDM terdiri atas :

JUJUR

Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara.

PROFESIONAL

Bekerja dengan semangat, cermat, akuntabel, disiplin, akurat, dan tuntas atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab, komitmen yang tinggi, membangun sinergi internal dan eksternal, serta mampu melihat perkembangan jauh ke depan.

MELAYANI

Memberikan layanan prima dengan memahami kebutuhan pemangku kepentingan, dilakukan dengan sepenuh hati, proaktif, profesional, simpel, efisien, dan tepat waktu dalam rangka memenuhi kepuasan internal dan publik.

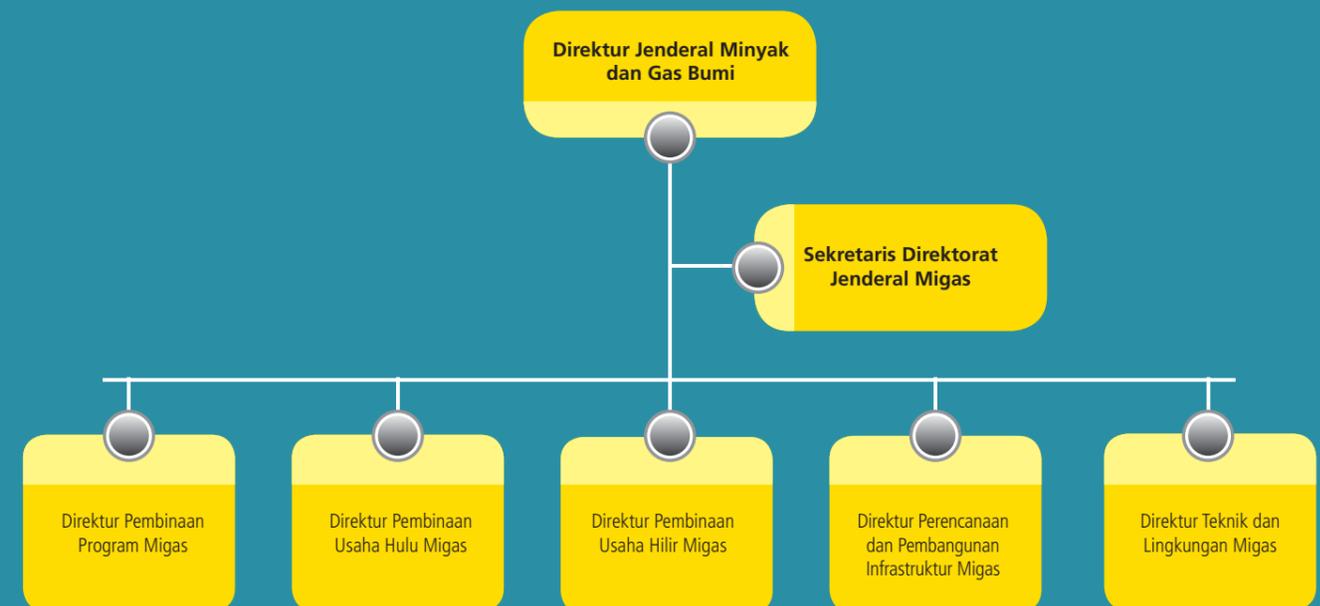
INOVATIF

Berwawasan terbuka, selalu belajar untuk peningkatan diri, memiliki ide baru yang bermanfaat, mampu membuat solusi alternatif dalam pekerjaan untuk mempercepat tercapainya target kinerja.

BERARTI

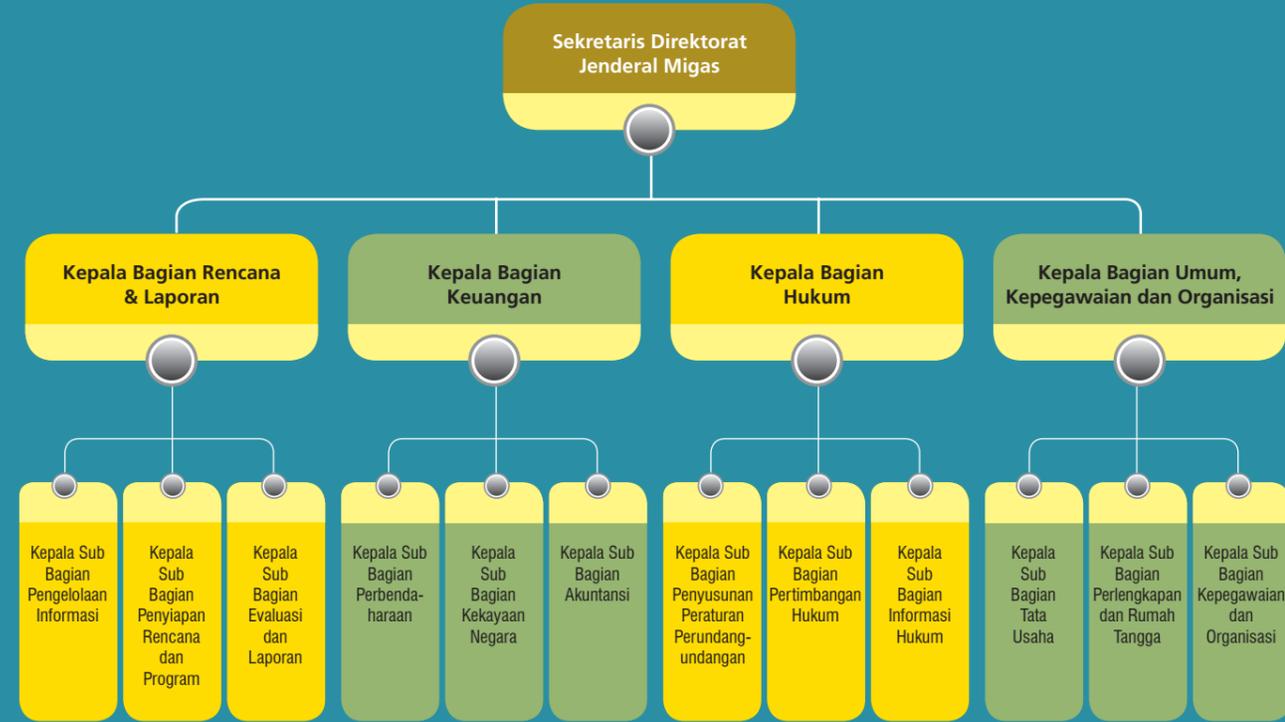
Menjadi manusia yang memanusiakan manusia, memberi manfaat bagi diri sendiri, orang lain, Kementerian ESDM, masyarakat, bangsa dan negara, sehingga menjadi teladan, tempat bertanya, mampu memimpin, dan memecahkan masalah.

STRUKTUR ORGANISASI DITJEN MIGAS

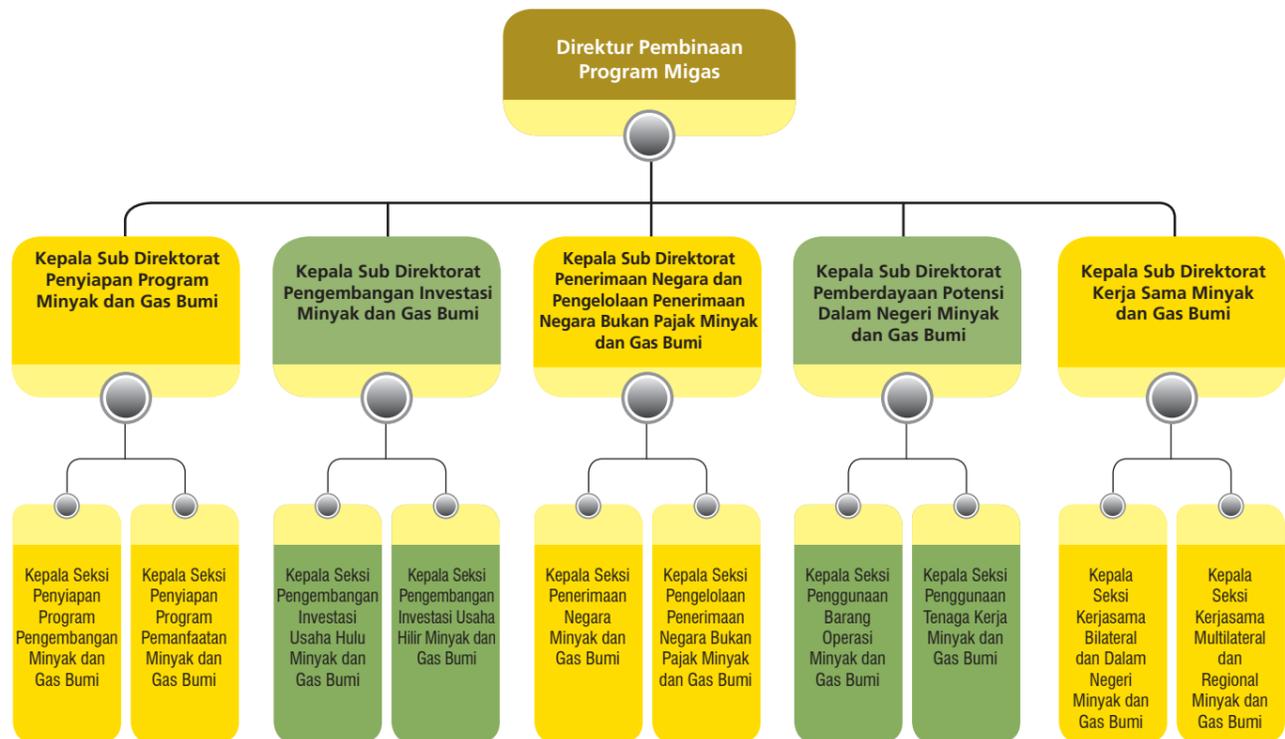


STRUKTUR ORGANISASI

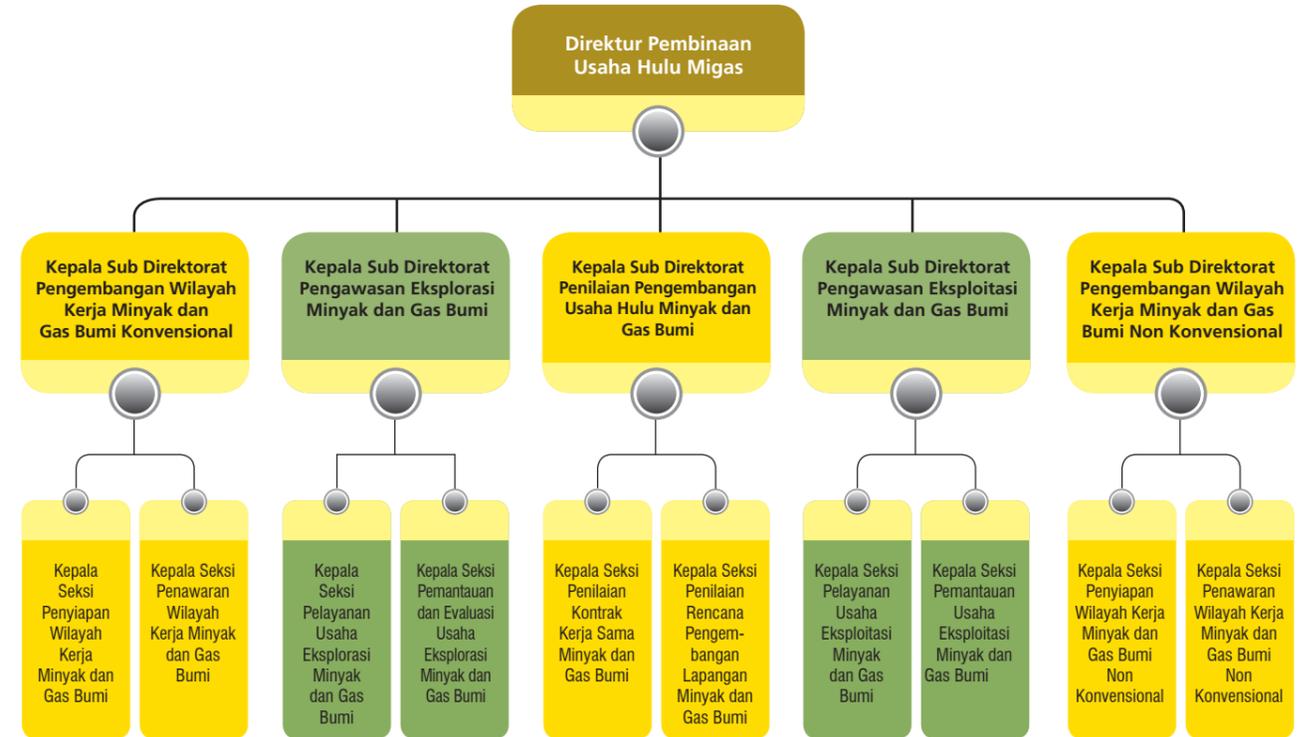
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL MIGAS



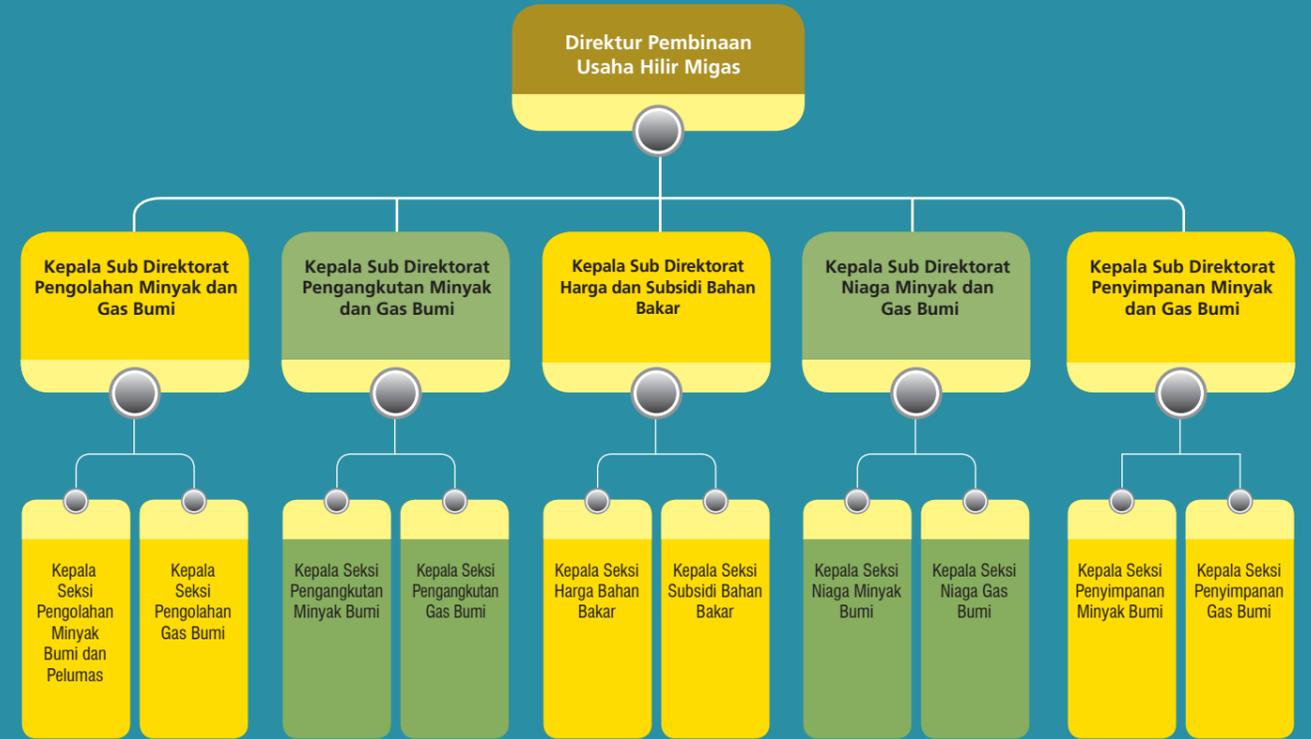
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MIGAS



DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS



DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HILIR MIGAS

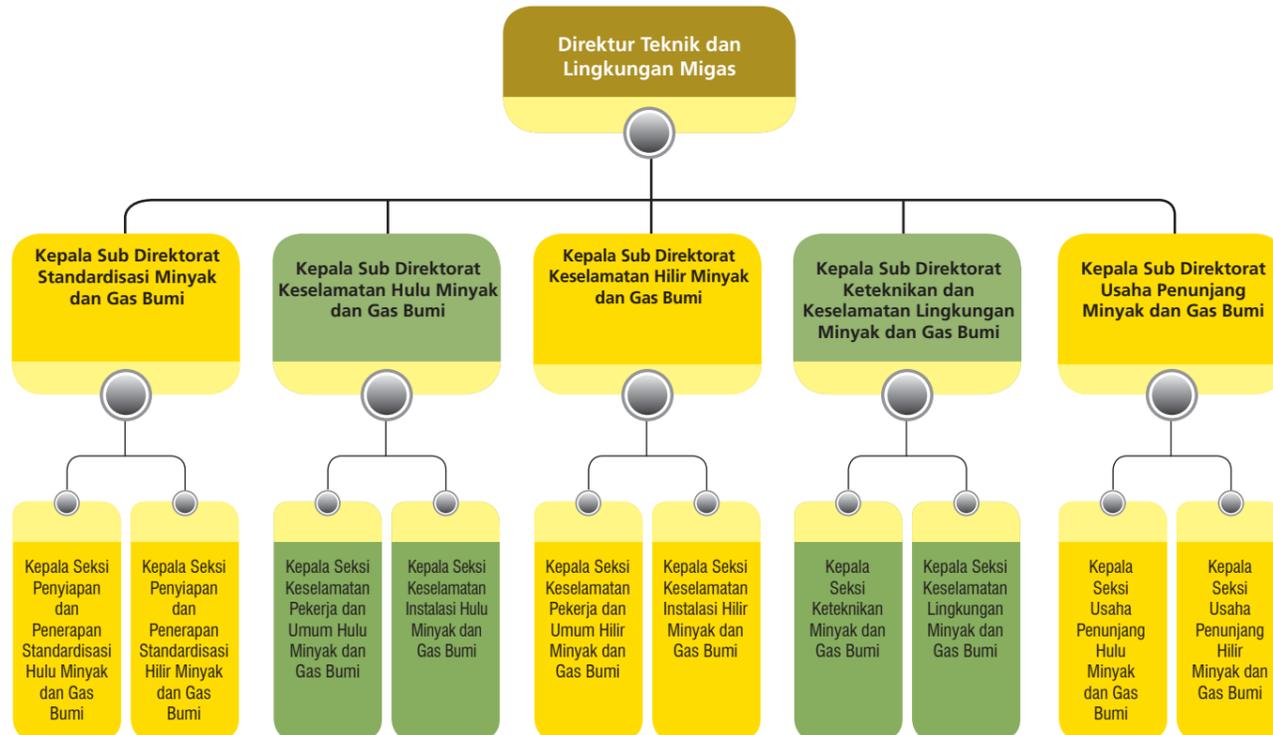


STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MIGAS



DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS



PENGHARGAAN | 2019 DITJEN MIGAS



Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), kembali menunjukkan komitmen untuk pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah bebas dari Korupsi (WBK). Komitmen tersebut diwujudkan dengan diterimanya penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Dr. Ir. Adhi Wibowo, M.Sc. sebagai Pelopor Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian ESDM pada tahun 2019.



Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi mendapat penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas prestasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).



Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai Peringkat I Satker Infrastruktur, Nilai IKPA Tahun 2019 di lingkungan Kementerian ESDM.



Menteri ESDM memberikan Penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral Muda tahun 2019 kepada Agustiawan yang telah berhasil melaksanakan pengelolaan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta integrasi data dan aplikasi perizinan di lingkungan kementerian ESDM yang semula tersebar di masing-masing unit utama kini menjadi satu pintu dalam satu aplikasi perizinan.



Menteri ESDM memberikan Penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral Muda tahun 2019 kepada Dwi Aryani yang telah berhasil melaksanakan pengelolaan system teknologi informasi dan komunikasi serta integrasi data dan aplikasi perizinan di lingkungan kementerian ESDM yang semula tersebar di masing-masing unit utama kini menjadi satu pintu dalam satu aplikasi perizinan.



LAPORAN TAHUNAN

Capaian Program
dan Kegiatan

2019

PERIZINAN ONLINE MENUJU INDUSTRI 4.0



BAB TEMATIK PERIZINAN ONLINE MENUJU INDUSTRI 4.0

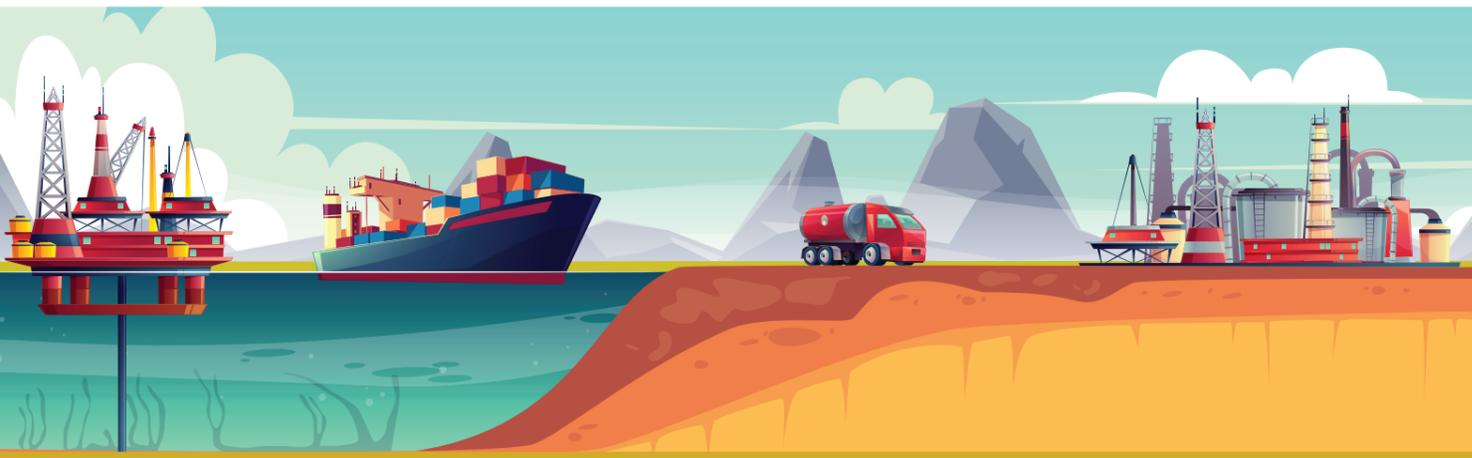




Three potentially game-changing disruptions in Oil and Gas Industry:

1. A world of resource abundance is leading to sustained lower oil prices and a focus on cost, efficiency, and speed.
2. Profound technological advances are disrupting old ways of working and enabling step changes in productivity
3. Demographic shifts mean that employees are demanding changes in the working environment and expressing concerns about the role of oil and gas companies in society.”

McKinsey & Company



Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran”

Presiden RI
Joko Widodo



Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan jaringan terjadi dengan pesat, penggunaan teknologi informasi akan sangat membantu pengelolaan data, terutama dalam kemudahan berinteraksi secara *online*,”

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Ignasius Jonan

Memasuki era Industri 4.0, era digital, era dunia tanpa batas, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Ketersediaan infrastruktur yang mumpuni, kemudahan dan kecepatan akses serta keamanan berselancar di dunia maya, harus menjadi fokus utama yang harus diwujudkan oleh pemerintah dalam menghadapi kondisi saat ini dan yang akan datang. Kemunculan beberapa *start up*, layaknya jamur di musim hujan, tentunya menjadi cambuk bagi pemerintah untuk mulai berbenah diri dan menyiapkan segala sesuatunya, memberikan yang terbaik dalam menghadapi era ini. Peningkatan kualitas tidak hanya terbatas pada infrastruktur, tapi juga pada pelayanan.

Dahulu sering sekali kita mendengar istilah atau cuitan seperti “birokrasi kompleks”, “perizinan berbelit”, “pelayanan lamban dan buruk”, “kalau bisa susah kenapa dipermudah”, dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan segala bentuk jasa pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat atau yang biasa kita sebut Pelayanan Publik.

Pelayanan Publik memang menjadi momok bagi masyarakat, tanpa terkecuali bagi pemerintah. Kualitas pelayanan seringkali menjadi terabaikan karena belum adanya pemahaman yang baik terhadap tingkat kepuasan masyarakat yang pada dasarnya menjadi salah satu keluaran (*outcome*) penting dalam birokrasi. Seiring berjalannya waktu dan adanya peningkatan konsentrasi terhadap tingkat kepuasan masyarakat, atau yang lebih dikenal dengan nama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di berbagai bidang, pemerintah telah melakukan langkah strategis melalui Reformasi Birokrasi.

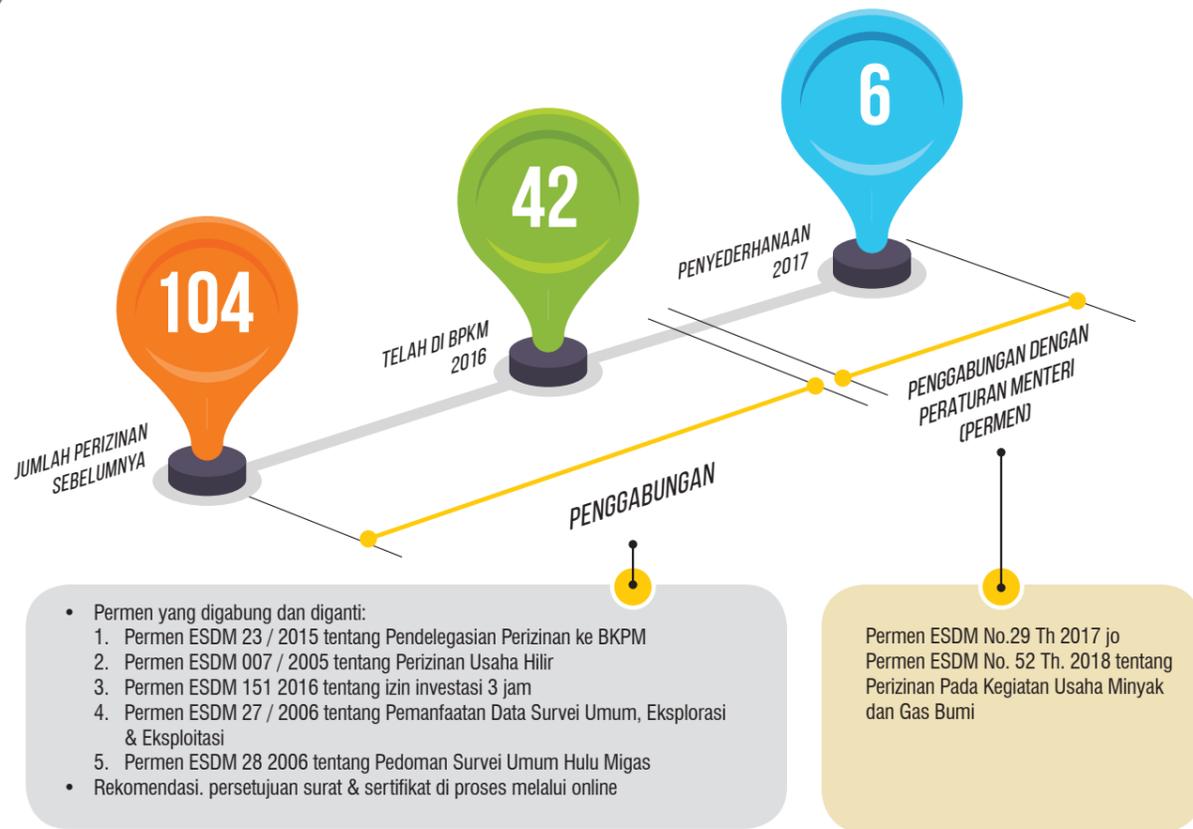
Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar

terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), khususnya Direktorat Jenderal Migas telah melaksanakan reformasi birokrasi, salah satunya melalui Penyederhanaan Perizinan.

Industri migas masih memegang peranan dan sangat berpotensi dalam mendatangkan investasi dan menghasilkan penerimaan negara. Perbaikan terhadap birokrasi tentunya dapat mendongkrak hal-hal tersebut dan dapat meningkatkan pertumbuhan industri migas secara berkesinambungan.

Penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Migas dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTPS) kepada Kepala BKPM, yang di kemudian hari digantikan oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang Pemberian Perizinan Bidang Migas dalam Rangka PTPS kepada Kepala BKPM, menjadi tonggak bagi Kementerian ESDM khususnya Direktorat Jenderal Migas dalam mendukung upaya pengoptimalan Pelayanan Publik dan peningkatan investasi di industri migas.

Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Migas telah melakukan langkah spektakuler dengan mereduksi secara signifikan perizinan bidang Migas yang sebelumnya sebanyak 104 izin menjadi hanya 6 izin utama saja. 6 Izin tersebut terdiri dari, Izin Survey Umum, Izin Pemanfaatan Data Migas, Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Niaga, yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 tahun 2017.



Di sisi lain, pemerintah juga telah merespons kebutuhan di era Industri 4.0 yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kementerian ESDM pun tidak ketinggalan untuk memulai langkah konkrit dengan membangun suatu aplikasi perizinan online yang memuat seluruh izin-izin di lingkungan Kementerian ESDM.

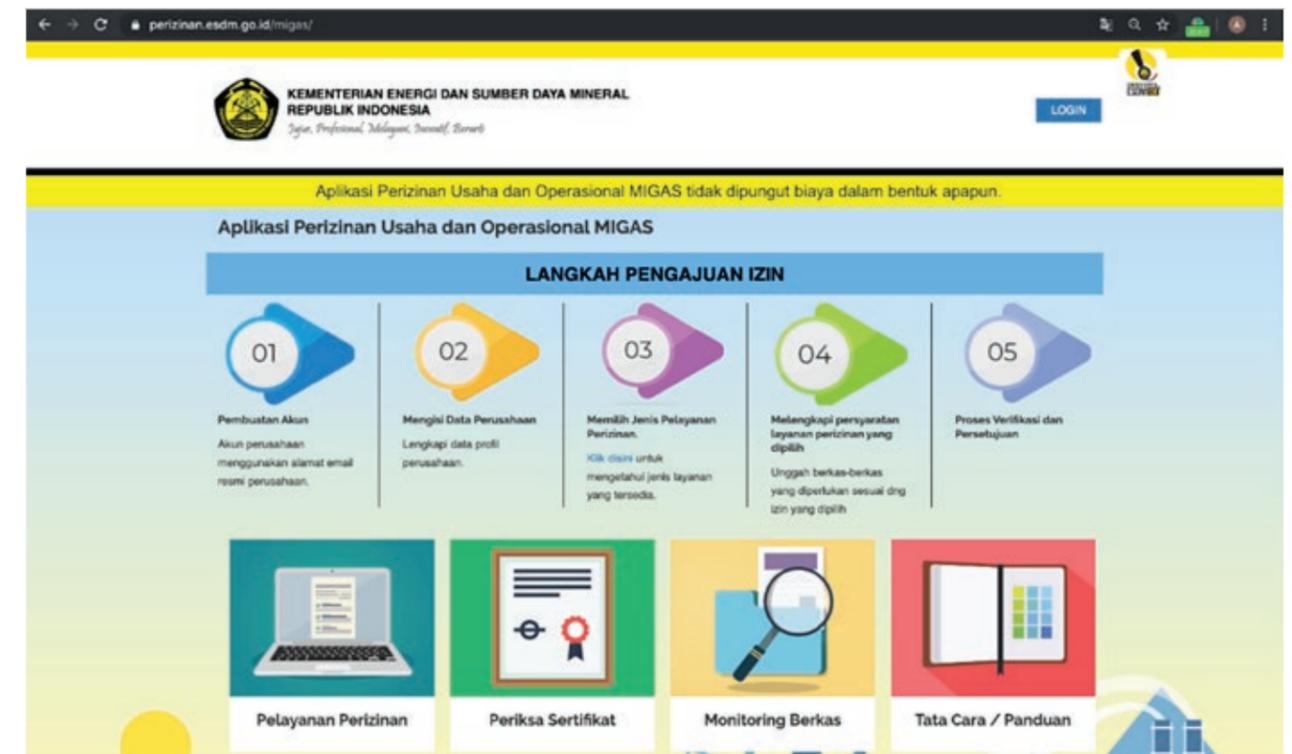
Sebenarnya Direktorat Jenderal Migas telah memulai pendigitalisasian dokumen perizinan dan pembangunan aplikasi pengajuan perizinan sejak tahun 2013. Pendigitalisasian tersebut merupakan inisiatif dari Subdirektorat Pengangkutan Migas, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas dengan membangun aplikasi Perizinan Pengangkutan Migas, sebagai jawaban atas keresahan pegawai terhadap dokumen perizinan yang semakin hari semakin menumpuk. Seiring berjalannya waktu, aplikasi tersebut terus dikembangkan hingga menjadi suatu aplikasi komprehensif yang memuat Perizinan untuk seluruh Kegiatan Usaha Hilir Migas pada tahun 2016. Beberapa aplikasi lainnya seperti aplikasi Nomor Pelumas Terdaftar dan aplikasi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) juga pernah dibangun oleh Direktorat Jenderal Migas.

Pada tahun 2019 ini, seiring dengan komitmen pimpinan dalam memperkuat bidang Teknologi Informasi (TI) Kementerian ESDM, dilakukan penyeragaman dan integrasi sistem secara masif. Sepuluh dari delapan belas (18) layanan perizinan dan non-perizinan Direktorat Jenderal Migas, diintegrasikan dalam sistem daring

(online) perizinan terpadu Kementerian ESDM. Layanan tersebut meliputi, perizinan Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas yang terdiri dari Izin Survei Umum Migas dan Izin Pemanfaatan Data Migas; perizinan dan non-perizinan Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas yang terdiri dari Izin Usaha Pengolahan, Rekomendasi Ekspor Impor Pengolahan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Niaga, dan Rekomendasi Ekspor Impor Niaga Migas; Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas antara lain Izin Gudang Bahan Peledak dan Pengesahan Kualifikasi Ahli Las.

Aplikasi Perizinan Online ESDM yang diluncurkan pada 6 Agustus 2019 tersebut tidak hanya mengubah sistem pemberkasan dari dokumen cetak menjadi berkas digital, tetapi juga diterapkannya *business process reengineering* (BPR) terhadap layanan tersebut. Dampak positifnya adalah terjadinya efisiensi alur pemrosesan, simplifikasi dokumen persyaratan perizinan/non-perizinan dan transparansi proses perizinan.

Saat proses pembangunan aplikasi, Direktorat Jenderal Migas memiliki peranan dalam penyediaan infrastruktur dan memberikan masukan berupa konsep-konsep formulir pengajuan dan dokumen teknis yang akan dimuat dalam aplikasi. Dalam perjalanannya, Direktorat Jenderal Migas yang telah memiliki aplikasi perizinan sebelumnya, terus berkoordinasi dengan pihak Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) ESDM sebagai penanggung jawab kegiatan, agar proses transisi atau migrasi ke aplikasi perizinan yang baru dapat berjalan dengan lancar.



Aplikasi Perizinan Online ESDM tersebut secara efektif telah mampu memangkas waktu pemrosesan perizinan. Sebagai contoh pada Perizinan Hilir Migas, mekanisme pemrosesan internal secara manual yang sebelumnya membutuhkan jangka waktu 20 hari kerja kini dipangkas hanya maksimal 13 hari kerja (apabila diperlukan kunjungan lapangan/presentasi tambahan). Untuk konsep izin usaha yang telah disetujui, selanjutnya akan dikirim ke BKPM melalui sistem untuk ditandatangan. Badan Usaha pun dapat menelusuri perkembangan permohonannya dengan memasukkan kode *tracking* dalam menu Monitoring Berkas, sehingga aplikasi tersebut menjadi lebih transparan. Sejak diluncurkannya aplikasi ini, telah ada 1.464 permohonan pengajuan izin dan 449 di antaranya telah disetujui.

Dalam menyongsong masa depan dan mengikuti perkembangan zaman, Direktorat Jenderal Migas akan terus berbenah dan terus berupaya untuk meningkatkan Pelayanan Publik. Salah satu yang telah dilakukan adalah pembahasan terkait wacana untuk memasukkan perizinan/rekomendasi/persetujuan Bidang Migas ke dalam *Online Single Submission* (OSS). OSS sendiri merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota

yang dilakukan secara elektronik. Saat ini, Kementerian ESDM tengah menyusun Peraturan Menteri ESDM tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria OSS. Rencananya akan ada 17 jenis perizinan/rekomendasi/persetujuan Bidang Migas yang akan dimasukkan dalam OSS dalam waktu dekat ini.

Di samping itu, pengelolaan terhadap permintaan dan keluhan masyarakat, serta respons cepat juga terus ditingkatkan. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian ESDM telah menyediakan *contact center* ESDM 136. Respons terhadap keluhan seperti kendala login, kesulitan mengunggah dokumen, dan kendala teknis lainnya pun langsung ditangani oleh Subbagian Data dan Informasi dengan melakukan pendampingan kepada konsumen. Koordinasi secara aktif juga terus dilakukan dengan Pusdatin ESDM untuk meningkatkan performa aplikasi. Hal tersebut menjadi kunci baik atau buruknya rapor sebuah institusi, karena pada hakikatnya pemerintah merupakan pelayan bagi masyarakat.

Pada akhirnya semua itu tidak lain adalah untuk menggairahkan iklim investasi di Indonesia, menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang berujung pada peningkatan penerimaan negara, demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.



LAPORAN TAHUNAN

Capaian Program
dan Kegiatan

2019

PERIZINAN ONLINE

MENUJU INDUSTRI 4.0



BAB CAPAIAN DITJEN MIGAS 2019



CAPAIAN HULU MIGAS

HASIL LELANG WK MIGAS

LELANG TAHUN 2019

3 WK MIGAS

Selat Panjang,
Anambas, West Ganal

TOTAL KOMITMEN PASTI

USD **268,5** juta

TOTAL BONUS TANDA TANGAN

USD **37,6** juta

LELANG TAHUN 2018

3 WK MIGAS

Maratua, South Andaman,
South Sakakemang

Penandatanganan di 2019

EKSPLORASI MIGAS

Survei Seismik 2D

11.918 km

Survei Seismik 3D

876,48 km²

Pemboran Eksplorasi

28 Sumur

TKDN Hulu Migas

60%

CADANGAN MIGAS

Minyak Bumi

3.775 MMSTB

Gas Bumi

77 TSCF

POD

Persetujuan POD I/
Revisi POD I

5

PRODUKSI MIGAS

Minyak dan
Kondensat

745 MBOPD

Gas Bumi

7.235 MMSCFD

Pemanfaatan Gas
Domestik

64,89%

LIFTING MIGAS

Minyak **746** MBOPD
(Target: 775 MBOPD)

Gas **1.058** MBOEPD
(Target: 1.250 MBOEPD)

PNBP SDA

SDA Rp **127,05** triliun
(Target Rp 159,77 triliun)

Fungsional

USD **324,86** juta
(Target USD 8,06 juta)

ICP Rata-rata

USD **62,37** per barel

ALIH KELOLA WK MIGAS

5 Kontrak
Perpanjangan/
Alih Kelola

Total
Komitmen Pasti

USD **855,38** juta

Total Bonus
Tanda Tangan

USD **1,04** miliar





Kepada para Kontraktor (KKKS) yang penting adalah melakukan efisiensi atas biaya produksi atau biaya eksplorasi dengan menggunakan teknologi yang lebih *up to date*, sehingga biaya produksi bisa lebih rendah.”

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Ignasius Jonan



Dengan dibukanya akses data ini kemungkinan untuk menemukan cadangan migas baru lebih terbuka kalau datanya lebih komprehensif.”

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Arcandra Tahar

Kegiatan operasi migas terutama kegiatan usaha hulu migas merupakan kegiatan yang tinggi resiko, biaya, dan teknologi. Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengamanatkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilakukan oleh Pemerintah c.q.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan usaha hulu migas juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.



PENAWARAN WILAYAH KERJA MIGAS

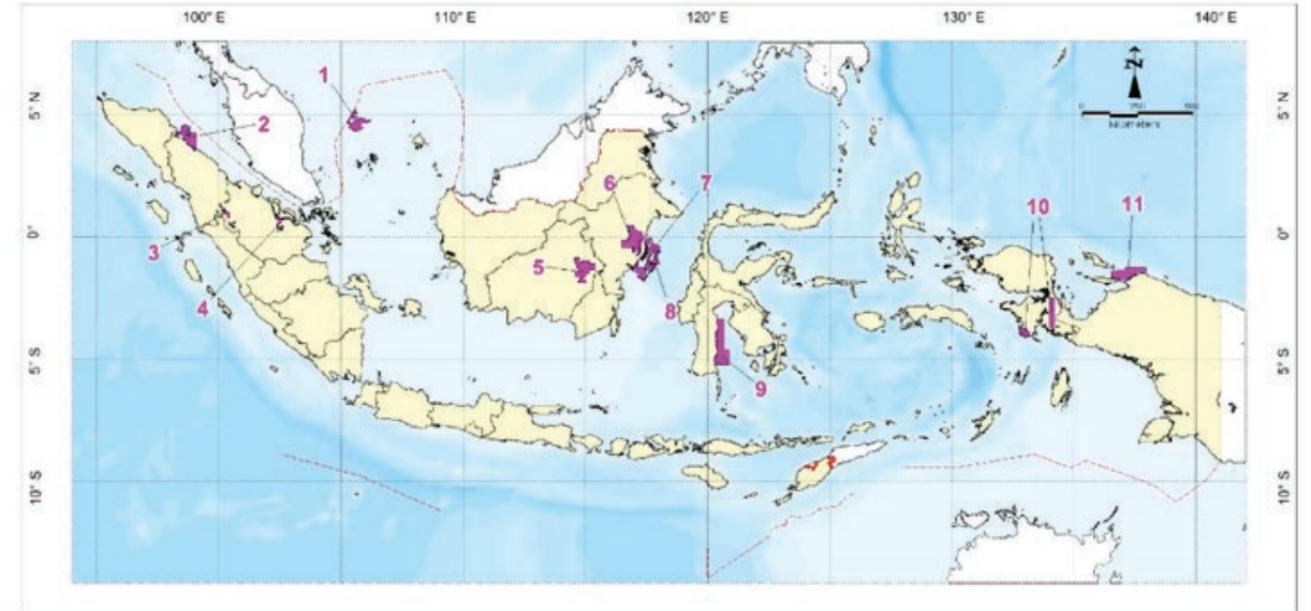


A. WILAYAH KERJA KONVENSIONAL

Pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Migas telah menawarkan sejumlah 13 Wilayah Kerja (Wilayah Kerja West Ganal dan West Kampar ditawarkan dalam 2 kali

periode lelang) yang seluruhnya ditawarkan melalui Lelang Reguler.

PETA PENAWARAN WK MIGAS KONVENSIONAL TAHUN 2019



KETERANGAN :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. ANAMBAS | 6. BELAYAN I |
| 2. EAST GEBANG | 7. KUTAI |
| 3. WEST KAMPAR | 8. WEST GANAL |
| 4. SELAT PANJANG | 9. BONE |
| 5. WEST TANJUNG I | 10. WEST KAIMANA |
| | 11. CENDRAWASIH VIII |

NO	TAHAP LELANG	WILAYAH KERJA	PEMENANG LELANG
1.	Tahap I	Selat Panjang *	Ada
2.	25 Feb – 7 Mei	Anambas	Tidak ada
3.		West Kampar	Ada
4.		West Ganal *	Tidak ada
5.		West Kaimana	Tidak ada
6.		Tahap II	West Kampar *
7.	8 Mei – 26 Agt	Bone	Tidak ada
8.		Kutai	Tidak ada
9.		West Ganal *	Ada
10.	Tahap III	East Gebang	Tidak ada
11.	26 Jul – 18 Okt	West Tanjung I	Tidak ada
12.		Belayan I	Tidak ada
13.		Cenderawasih VIII	Tidak ada

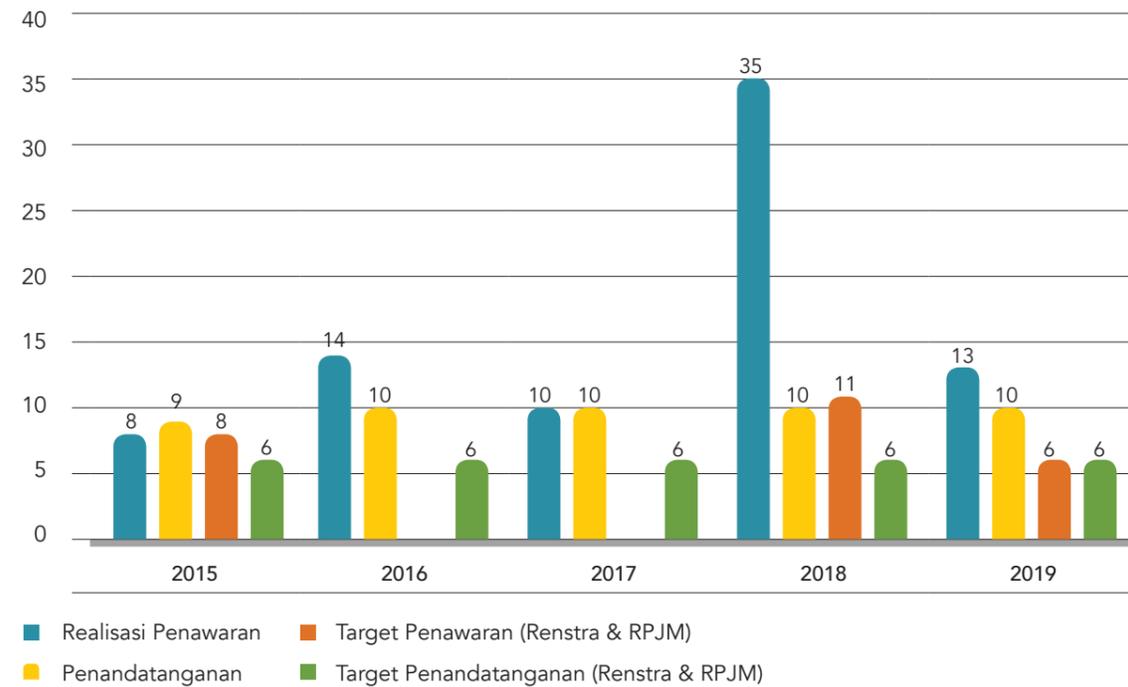
*) Wilayah Kerja West Ganal dan West Kampar ditawarkan dalam 2 kali periode lelang

Dari 13 Wilayah Kerja yang ditawarkan tersebut, terdapat 3 Wilayah Kerja yang diminati dan ditandatangani kontraknya pada tahun 2019.

NO.	WILAYAH KERJA	KKKS	SIGNATURE BONUS	KOMITMEN KERJA PASTI / KOMITMEN PASTI
1.	Anambas	Kufpec Indonesia (Anambas) B.V.	\$2.500.000	G&G, 600 Km ² Seismik 3D (<i>licence & repro</i>), 1 Sumur \$ 35.200.000
2.	Selat Panjang	PT. Sumatra Global Energi – Zamatra Bakau Straits Ltd	\$5.000.000	G&G, 200 Km ² Seismik 3D, 500 Km Seismik 2D, 6 Sumur \$ 74.000.000
3.	West Ganal	ENI West Ganal Limited – PT Pertamina Hulu West Ganal – Neptune Energy West Ganal B.V	\$30.100.000	G&G, 600 Km ² Seismik 3D, 600 Km Seismik 2D, 4 Sumur \$ 159.300.000

Di samping itu, terdapat 3 Wilayah Kerja hasil lelang tahun 2018 yang juga ditandatangani pada tahun 2019. Ketiga Wilayah Kerja tersebut antara lain, Wilayah Kerja Maratua, South Andaman, dan South Sakakemang.

Selama periode 2015-2019, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Migas telah menawarkan total 80 Wilayah Kerja. Dan pada kurun waktu 2017-2019 telah diperkenalkan skema kontrak baru yaitu bentuk Kontrak Kerja Sama PSC *Gross Split*.



Sebagai informasi, pada proses penawaran wilayah kerja, investor cenderung memilih pola penawaran langsung dibandingkan dengan skema lelang reguler, karena dengan penawaran langsung ini mereka dapat melakukan beberapa hal seperti kustomisasi terhadap wilayah kerja yang dipilih, kesempatan melakukan studi pra-kontrak, dan segera dapat memberikan keputusan yang efektif untuk melanjutkan/tidak melanjutkan menjadi sebuah kontrak.

Pada tahun 2019, jumlah peminat Studi Bersama mencapai 10 persetujuan, meningkat dari tahun sebelumnya sejumlah 6 persetujuan (2017) dan 8 persetujuan (2018). Berdasarkan data historis, mekanisme Penawaran Langsung melalui Studi Bersama memberikan tingkat kesuksesan wilayah kerja laku sampai dengan 75% sedangkan melalui lelang reguler hanya 25%.

GRAFIK HISTORY PERBANDINGAN LELANG REGULER DAN LELANG PENAWARAN LANGSUNG



Di sisi regulasi, Direktorat Jenderal Migas telah berperan aktif dalam penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagai pengganti Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi. Peraturan baru ini mengubah paradigma fungsi data, bukan lagi sebagai aset untuk mendapatkan PNBPN namun bertujuan mengundang

investasi pada kegiatan hulu migas. Data kegiatan hulu migas menjadi lebih terbuka, mudah diakses dan gratis melalui sistem *membership*.

Selain itu, untuk memberikan kemudahan bagi investor memperoleh gambaran mengenai lokasi wilayah-wilayah yang terbuka dan wilayah yang sedang dilakukan Studi Bersama, telah disediakan peta informasi pada situs yang dikhususkan bagi pelaksanaan lelang wilayah kerja yaitu <http://e-wkmigas.esdm.go.id>.



B. WILAYAH KERJA NONKONVENSIONAL

Beberapa upaya untuk menarik investasi pada pengembangan Wilayah Kerja Migas Nonkonvensional terus dilakukan baik dalam persiapan wilayah kerja, sistem pelelangan hingga *terms & conditions*, dan bentuk kontrak yang diberlakukan. Namun demikian hal tersebut masih belum menarik investor, dibuktikan dengan tidak terdapatnya lagi Usulan Penawaran Langsung melalui Studi Bersama.

Pada tahun 2019, sejalan dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk terus menyederhanakan peraturan, Perusahaan Migas Nonkonvensional diharapkan dapat dilakukan bersamaan dengan Wilayah Kerja Migas (Konvensional) yang sedang berjalan menjadi satu kontrak kerja sama, sehingga Lelang Wilayah Kerja Migas Nonkonvensional untuk sementara waktu ditangguhkan dan masih dalam proses pembahasan.

Selain itu, beberapa hal yang telah dilakukan dalam Perusahaan Migas Nonkonvensional antara lain:

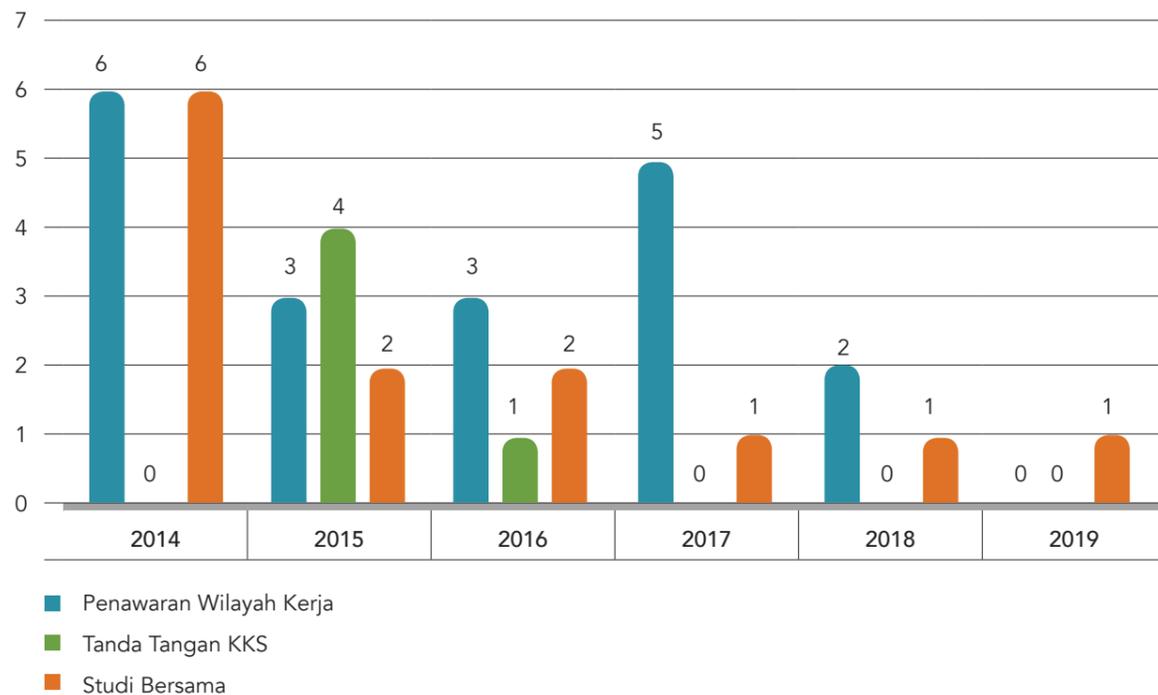
1. Menyelesaikan pelaksanaan Studi Bersama Migas

Nonkonvensional area Jambi yang diusulkan oleh PT Pertamina (Persero) dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dari hasil analisis, perhitungan Sumber Daya Migas NonKonvensional didapatkan total sumber daya sebesar 22,41 TCF dan 136,2 MMBO;
- b. Untuk studi risiko permukaan (surface facility), area Jambi telah memiliki fasilitas produksi minyak yang sedang berjalan dan untuk skenario produksi gas akan masuk dalam sistem Grissik Terminal;
- c. Keekonomian lapangan akan menguntungkan apabila harga 1 sumur Vertikal berada pada kisaran USD 11.000.000 dan sumur horizontal berada pada kisaran USD 22.000.000.

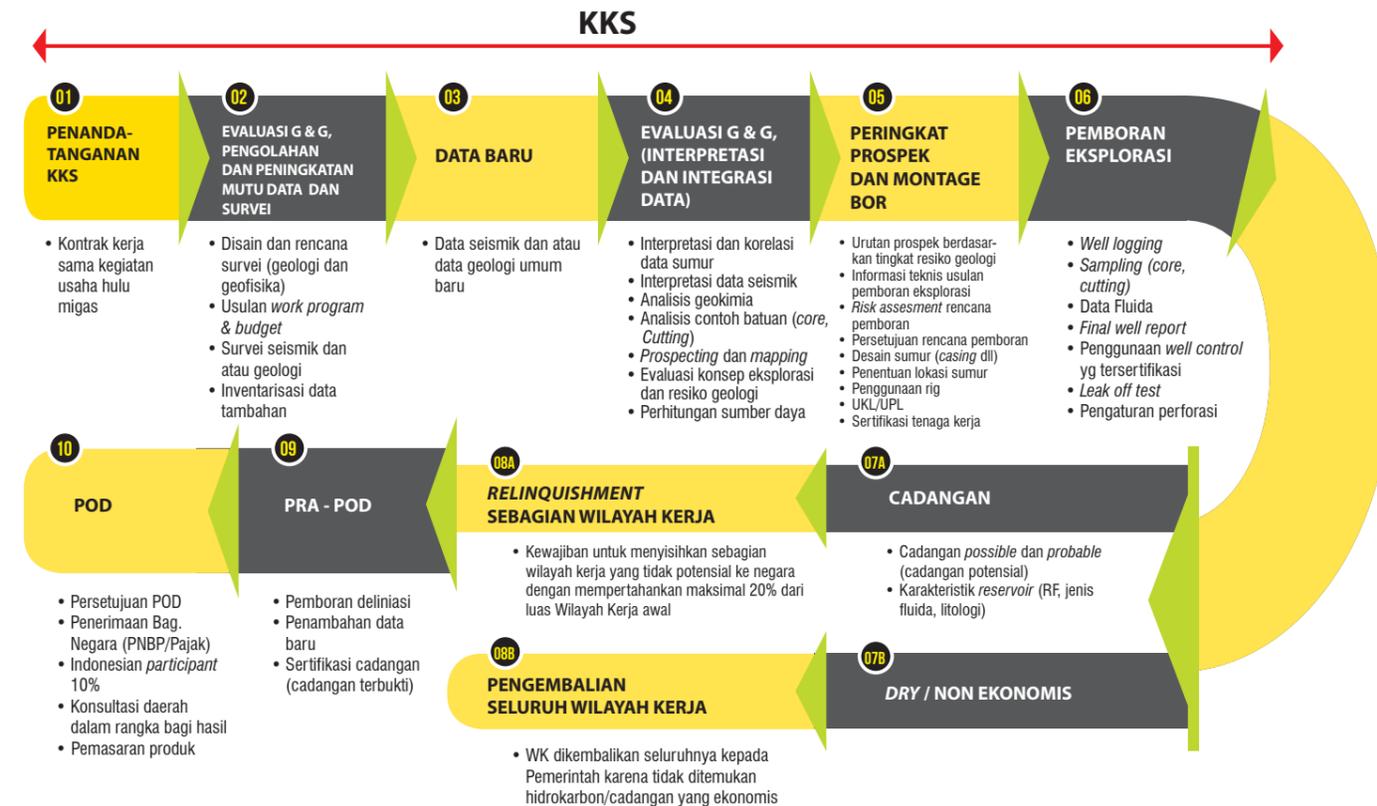
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur *Terms & Conditions* Wilayah Kerja Migas NonKonvensional Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* yang lebih memudahkan untuk investor.

GRAFIK STATISTIK PELAKSANAAN STUDI BERSAMA, PENAWARAN DAN PENANDATANGANAN WILAYAH KERJA MIGAS NONKONVENSIONAL



EKSPLORASI MIGAS

GAMBAR TAHAPAN KEGIATAN EKSPLORASI



Pada tiga tahun pertama masa eksplorasi terdapat kewajiban kegiatan eksplorasi oleh Kontraktor sesuai dengan Kontrak Kerja Sama (KKS) yang disebut Komitmen Pasti. Komitmen Pasti bersifat mengikat selama Kontrak Kerja Sama aktif dan akan menjadi terutang Kontraktor kepada Negara jika tidak dikerjakan sementara kontrak sudah berakhir. Komitmen Pasti pada umumnya dapat berupa Study G&G, Seismik 2D atau 3D, Pengeboran Sumur Eksplorasi, dan Analisis Lab.

Dalam menjalankan kegiatan eksplorasi sebagai upaya penemuan cadangan baru, kegiatan yang dilakukan antara lain:

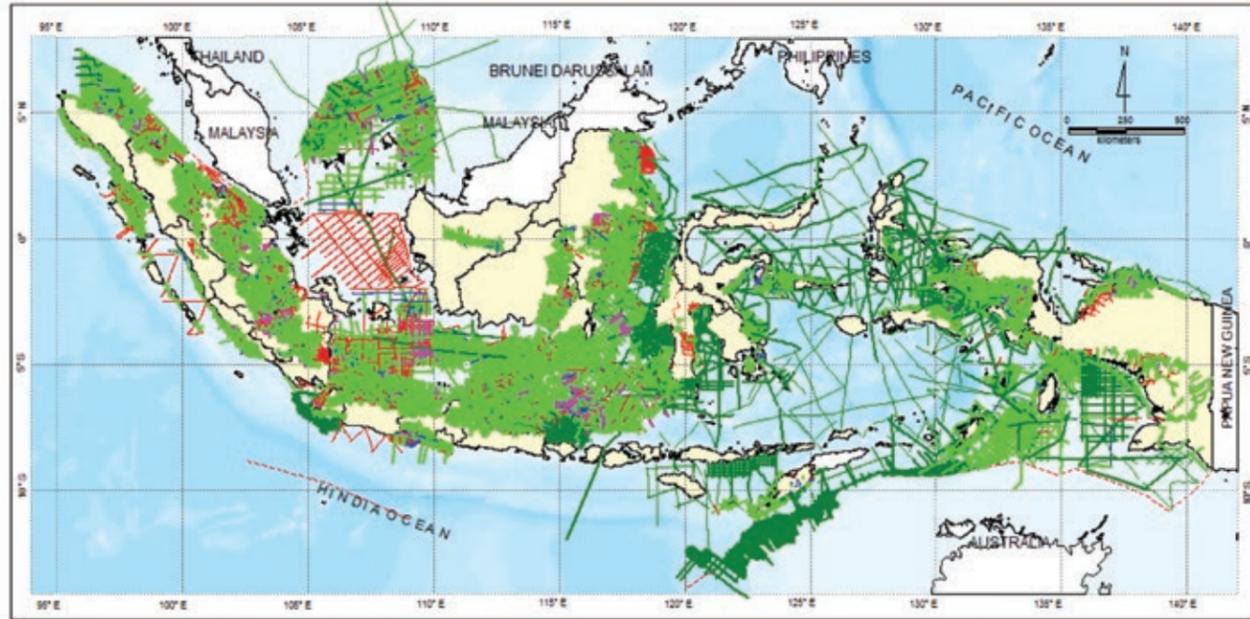
1. Survei Seismik 2D dan 3D

Kegiatan survei seismik di Indonesia telah dimulai

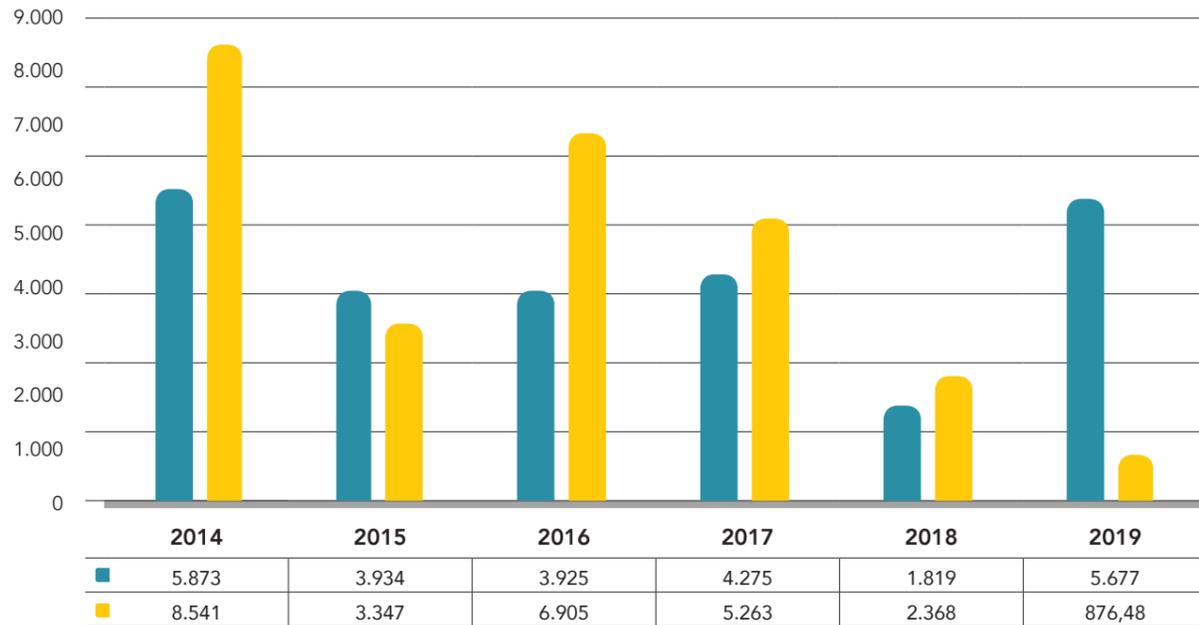
sejak 1 Desember 1957. Sampai saat ini ketersediaan data seismik 2D di Indonesia adalah sebanyak 1.363.163 km, dan 3D sebesar 35.105 km².

Pada tahun 2019, KKKS telah merealisasikan kegiatan survei seismik 2D sepanjang 5.677 km. Dua di antaranya berasal dari Wilayah Kerja Eksplorasi, yaitu West Bangkanai dan Abar sepanjang 2.279 km. Adapun laporan seismik tersebut belum termasuk kegiatan seismik 2D yang dilakukan PHE Jambi Merang sebagai pemenuhan Komitmen Kerja Pasti sepanjang 6.241 km. Sementara itu, total luasan seismik 3D yang dilakukan selama tahun 2019 adalah 876,48 km², yang seluruhnya berasal dari Wilayah Kerja Eksploitasi.

PETA SEBARAN SURVEI SEISMIK 2D & 3D DI INDONESIA



GRAFIK REALISASI SURVEI SEISMIK 2D & 3D TAHUN 2014-2019



2. Pemboran Sumur Eksplorasi

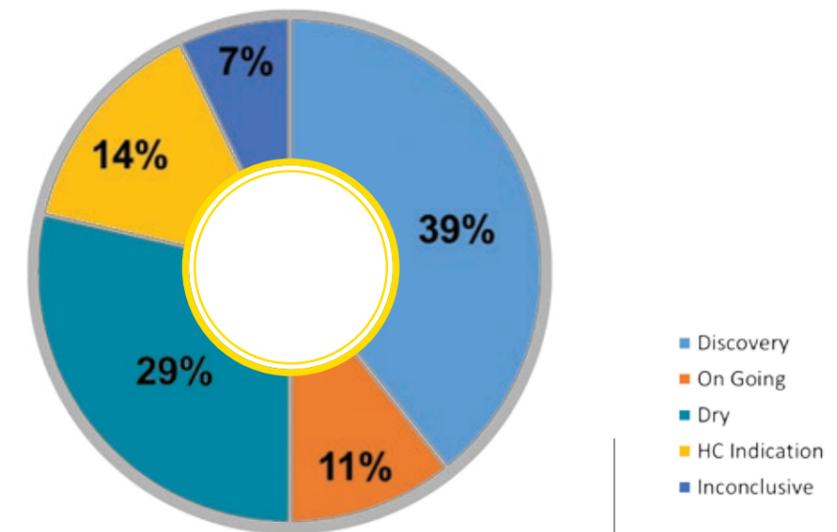
Salah satu pembuktian keberadaan hidrokarbon pada bawah permukaan (*subsurface*) adalah dengan melakukan pengeboran sumur eksplorasi. Kegiatan

pengeboran eksplorasi dilakukan setelah mendapat data-data bawah permukaan yang cukup.

GAMBAR MOBILISASI RIG PADA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEBORAN EKSPLORASI



GRAFIK STATUS TEMUAN PADA TAJAK SUMUR EKSPLORASI 2019



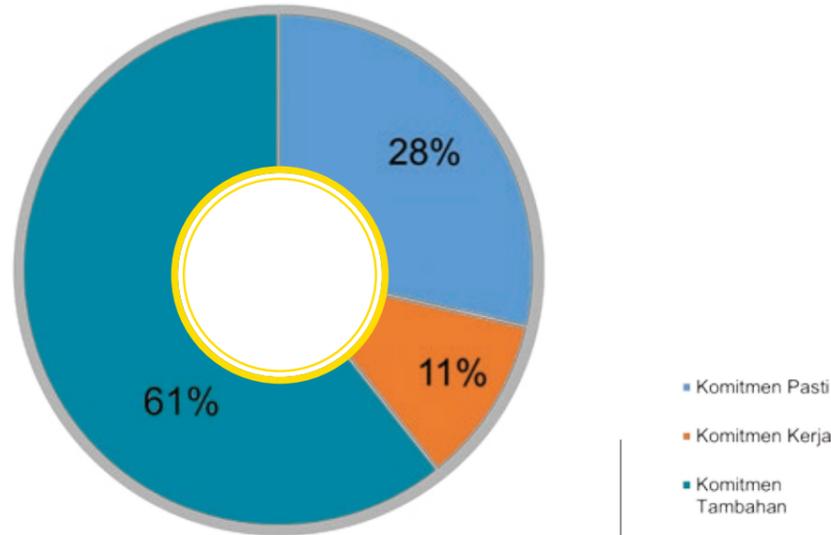
Tajak sumur yang dilakukan selama tahun 2019 menunjukkan hasil yang cukup baik. Dari total 28 sumur eksplorasi, sebanyak 11 sumur (39% dari total tajak sumur) didapati penemuan hidrokarbon. Empat sumur lainnya mengindikasikan adanya hidrokarbon di

lapisan yang dibor atau 14% dari total tajak sumur, dan 3 sumur masih dalam proses pengerjaan dan belum diketahui hasilnya. Diharapkan ketiganya dapat memberikan hasil yang baik.

Perlu diketahui bahwa dari seluruh tajak sumur yang dikerjakan, terdapat 8 sumur yang merupakan bagian dari pemenuhan Komitmen Pasti. Dari 8 sumur

tersebut hanya 3 sumur yang berasal dari Wilayah Kerja Eksplorasi yaitu 1 sumur dari Wilayah Kerja Sebatik dan 2 sumur dari Wilayah Kerja Mahato.

GRAFIK STATUS TAJAK SUMUR TERHADAP KOMITMEN



Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Migas terus melakukan upaya-upaya pendukung kegiatan eksplorasi dan mendorong percepatan penemuan cadangan minyak dan gas bumi baru. Upaya fasilitasi eksplorasi tersebut dapat berupa kebijakan dan persetujuan yang diberikan kepada KKKS terkait pengembangan Wilayah Kerja Eksplorasi. Fasilitasi eksplorasi tersebut meliputi:

- Perizinan online terkait Pemanfaatan Data
Sejak bulan Agustus 2019 Kontraktor dapat mengajukan permohonan izin pemanfaatan data secara online. Fasilitasi eksplorasi yang diberikan adalah pemanfaatan data dalam rangka studi, pengolahan, mencari investor, hingga pertukaran data serta memberikan kemudahan dan kepastian perizinan melalui SLA (service-level agreement) selama 7 hari kerja.
- Kebijakan Tambahan/Penggantian Waktu Eksplorasi Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004, masa eksplorasi migas adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang selama 4 (empat) tahun. Tambahan/penggantian jangka waktu di luar masa

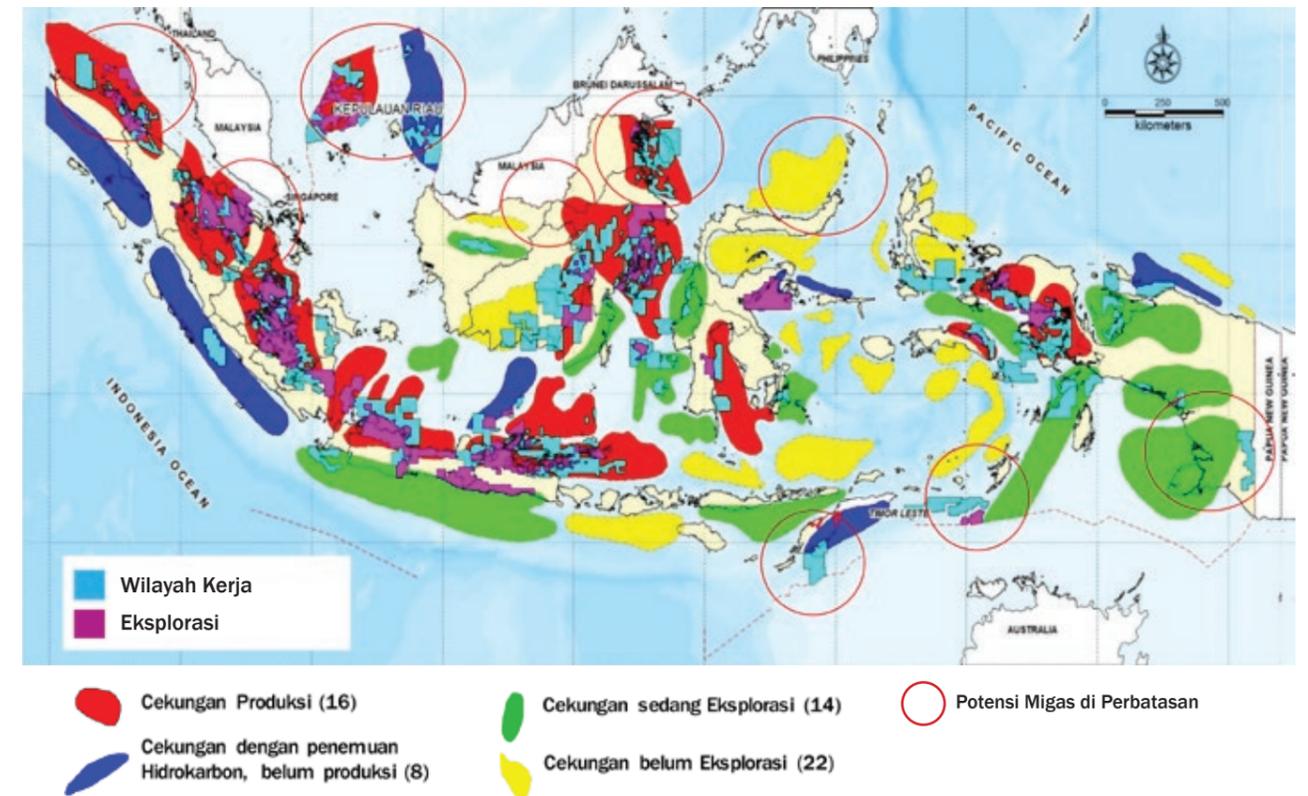
eksplorasi 10 (sepuluh) tahun merupakan sebuah kebijakan dan belum diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan tersebut diberikan oleh Pemerintah kepada KKKS dengan mempertimbangkan adanya waktu eksplorasi yang hilang disebabkan oleh beberapa hal seperti jaminan keamanan dan kepastian hukum, kendala operasional di lapangan akibat dari sengketa batas negara, berlarut-larutnya penyelesaian tumpang tindih lahan migas dengan lahan lainnya, dan keinginan Kontraktor untuk meningkatkan kajian keekonomian lapangan setelah menemukan kandungan hidrokarbon namun masih memerlukan pembuktian dan tambahan data dari kegiatan lainnya.

- Koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau Institusi Terkait
Direktorat Jenderal Migas telah beberapa kali melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau Institusi terkait seperti saat pengadaan lahan di Wilayah Kerja Lampung III yang tumpang tindih dengan perkebunan sawit.

- Perundingan Landas Kontinen
Direktorat Jenderal Migas juga berpartisipasi aktif dalam rapat-rapat koordinasi terkait Landas Kontinen dan potensi Migas di daerah perbatasan

yang dikordinir oleh Kementerian Koordinator Maritim. Berikut adalah peta potensi migas di wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara-negara tetangga.

GAMBAR POTENSI MIGAS INDONESIA



PEMBERDAYAAN POTENSI DALAM NEGERI

Dalam mendukung kelancaran kegiatan operasi hulu migas tanpa mengesampingkan lokal konten (TKDN) dan optimalisasi penggunaan produksi dalam negeri, Direktorat Jenderal Migas telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Program Guna Bina Dalam Negeri (PRO GUNADI) dan Program Substitusi Impor (PRO SUSI) dalam upaya peningkatan nilai TKDN

Kegiatan ini dilakukan secara terintegrasi bersama dengan KKKS, SKK Migas, Kementerian Perindustrian dan Produsen Dalam Negeri untuk mendukung kegiatan usaha migas guna memenuhi kebutuhan KKKS akan Barang Operasi berkualitas, kompetitif dan pengiriman tepat waktu, melalui langkah-langkah:

- Evaluasi kemampuan usaha industri dalam negeri penunjang di subsektor migas;
- Pengawasan penggunaan produk dalam negeri di subsektor migas;
- Pembaruan Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri (APDN);
- Pemantauan realisasi Tingkat Komponen Produk Dalam Negeri (TKDN) barang di subsektor migas;
- Pembinaan dan pengembangan terhadap peningkatan usaha industri dalam negeri penunjang migas (*capacity building*) dengan berkoordinasi bersama instansi terkait;

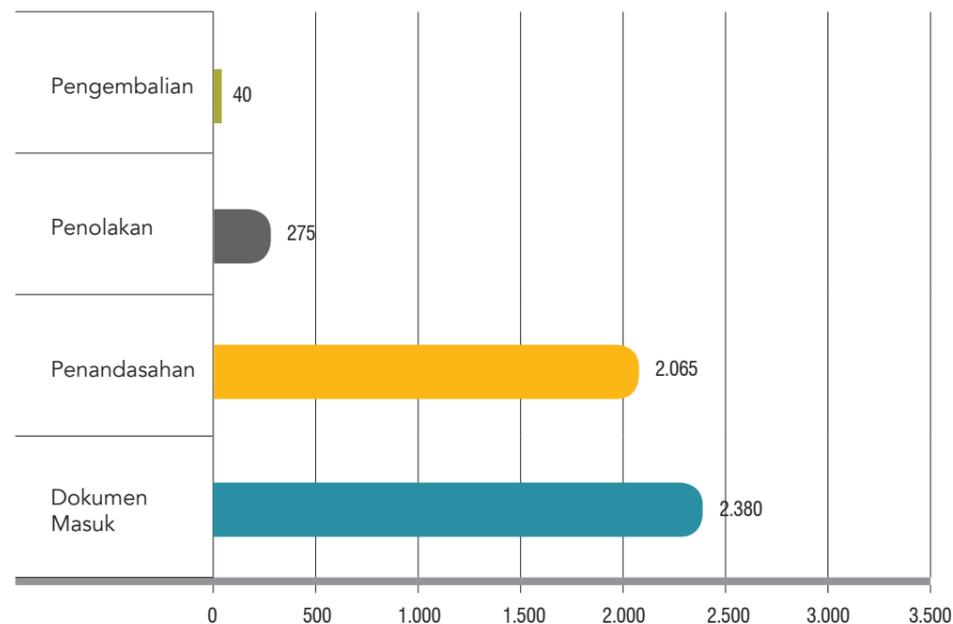
f. Mendorong usaha industri dalam negeri penunjang migas untuk bekerjasama dengan perusahaan *service* atau produsen barang internasional.

2. Kegiatan *pre-masterlist* bagi para KKKS

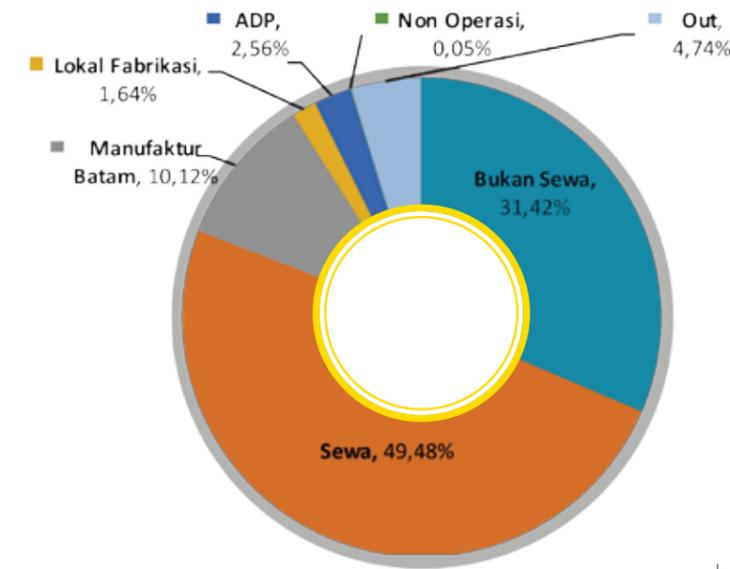
Kegiatan ini merupakan sarana bagi Direktorat Jenderal Migas dalam rangka pengendalian impor Barang Operasi hulu migas dan sebagai sarana pula bagi KKKS untuk mendapatkan pengetahuan untuk bertukar pikiran dalam memenuhi kebutuhan Barang Operasi hulu migas yang dapat diperoleh dari produsen dalam negeri.

Hasil *Pra-Masterlist* akan digunakan oleh KKKS sebagai acuan dalam pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI). *Pra-Masterlist* juga menjadi pegangan SKK Migas dan Direktorat Jenderal Migas dalam mengevaluasi RKBI yang diajukan KKKS sehingga penolakan pengajuan RKBI yang berpotensi menghambat kegiatan operasional hulu migas tidak terjadi. Dalam kurun waktu 2019, telah dilakukan kegiatan *Pre-Masterlist* sebanyak 20 kegiatan oleh 12 KKKS.

GRAFIK RINCIAN DOKUMEN RKBI TAHUN 2019



GRAFIK DETAIL STATUS BARANG RKBI TAHUN 2019



Sementara itu, jumlah kebutuhan Barang Operasi/Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) yang diajukan oleh KKKS mengalami peningkatan pada tahun 2019 sejumlah 2.380 dokumen dibandingkan dengan pengajuan pada tahun 2018 sejumlah 1.957 dokumen.

Berdasarkan hasil analisis atas pengajuan dokumen RKBI, didapati hasil bahwa persentase persetujuan kebutuhan Barang Operasi impor (USD 2,65 miliar) pada tahun 2019 adalah sebesar 92,65% dari nilai pengajuannya sebesar USD 2,86 miliar, dengan kategori nilai terbesar adalah untuk Barang Operasi impor yang disewa (49,48%). Hal ini disebabkan oleh terbatasnya produsen dalam negeri yang memiliki Barang Operasi sewa, serta adanya pergeseran trend dari kegiatan operasi darat dan laut dangkal menuju kegiatan operasi laut dalam yang membutuhkan Barang Operasi berteknologi tinggi dan masih diperoleh secara impor.

3. Pengajuan RKBI melalui Sistem Integrasi Online Satu Pintu (portal PP INSW) - Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Impor.

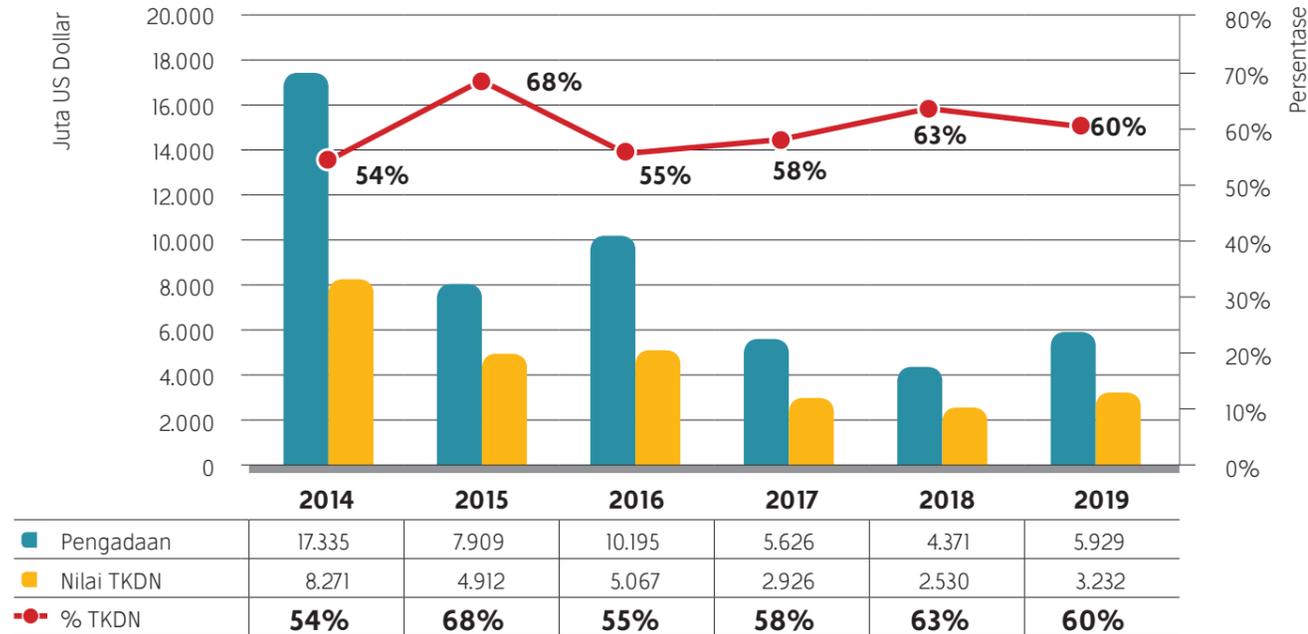
Pada 14 Oktober 2019, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan Kementerian Keuangan, dan Indonesian National Single Window (INSW) meluncurkan aplikasi Sistem Integrasi Online Satu Pintu pelayanan fasilitas fiskal atas impor barang operasi kegiatan usaha hulu migas. Melalui aplikasi ini, INSW menjembatani aplikasi di masing-masing K/L seperti SI-PRS (SKK Migas), SI-RIB (ESDM), dan SOFAS (Bea Cukai), sehingga durasi waktu layanan yang semula memerlukan 42 hari kerja dapat diupayakan menjadi 15 hari. Hingga akhir 2019, aplikasi ini telah digunakan oleh 5 (lima) KKKS (Pertamina Hulu

Mahakam, BP Berau, Medco, ExxonMobil, dan Pertamina EP) untuk barang seperti *fast moving item* dan *consumable*. Rencana ke depannya, aplikasi ini akan diintegrasikan dengan aplikasi manajemen aset yang berasal dari KKKS hulu migas yang telah tersedia guna menunjang akuntabilitas K/L dalam mewujudkan *good corporate governance*.

4. Pengawasan sekaligus pembinaan bersama dengan SKK Migas, KKKS dan Kementerian Perindustrian.

Pembinaan dan Pengawasan terhadap SKUP dilakukan berdasarkan kategori produk. Tahun 2019, kegiatan usaha hulu migas telah mencapai realisasi TKDN sebesar 60%.

GRAFIK CAPAIAN TKDN TAHUN 2019



Beberapa kendala yang terjadi dalam menjalankan program pengembangan barang operasi produk dalam negeri antara lain:

- Pengelolaan data dan informasi yang masih manual (belum dapat dilakukan secara *online*) menyebabkan tidak dinamisnya pemutakhiran data kemampuan produk dalam negeri dan menjadi salah satu kendala dalam penentuan perencanaan pengadaan barang dan jasa dalam negeri;
- Spesifikasi dan standar produk yang diproduksi perusahaan penunjang migas sepenuhnya belum dapat memenuhi standar dan kualitas kebutuhan operasi migas;
- Keterbatasan modal, pengetahuan dan teknologi perusahaan penunjang migas dalam menciptakan produk yang berkualitas sesuai dengan standar kegiatan operasi migas;
- Masih kurangnya kepercayaan para pengguna terhadap kualitas dan kepastian pasokan produk dalam negeri;
- Masih terbatasnya informasi implementasi kebijakan penggunaan produk di kegiatan usaha migas (terutama di kegiatan EPCI dan usaha hilir migas).

Beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hal tersebut antara lain:

- Penguatan sistem penilaian kemampuan produksi dalam negeri terintegrasi berbasis *online*;
- Peningkatan kualitas pengelolaan pemutakhiran data dan informasi kemampuan produk dalam negeri pada daftar Apresiasi Produk Dalam Negeri;
- Monitoring* realisasi penggunaan produk dalam negeri (TKDN) berkala di kegiatan usaha hulu migas;
- Mengupayakan adanya *transfer knowledge* dan teknologi di kegiatan usaha penunjang migas;
- Optimalisasi pengendalian dan pengawasan impor melalui sistem informasi terintegrasi satu pintu (portal PP INSW);
- Optimalisasi kegiatan *pre-masterlist* bagi KKKS dalam rangka peningkatan penggunaan atau pemanfaatan Barang Operasi produksi dalam negeri.

CADANGAN MIGAS

Cadangan minyak bumi status 01.01.2019 adalah sebesar 3.774,6 juta standar barel (atau MMSTB). Cadangan tersebut terdiri dari cadangan Terbukti (P1) sebesar 2.483,97 MMSTB dan cadangan Potensial sebesar 1.290,62 MMSTB (terdiri dari cadangan Mungkin (P2) sebesar 616,58 MMSTB dan cadangan Harapan (P3) sebesar 674,04 MMSTB).

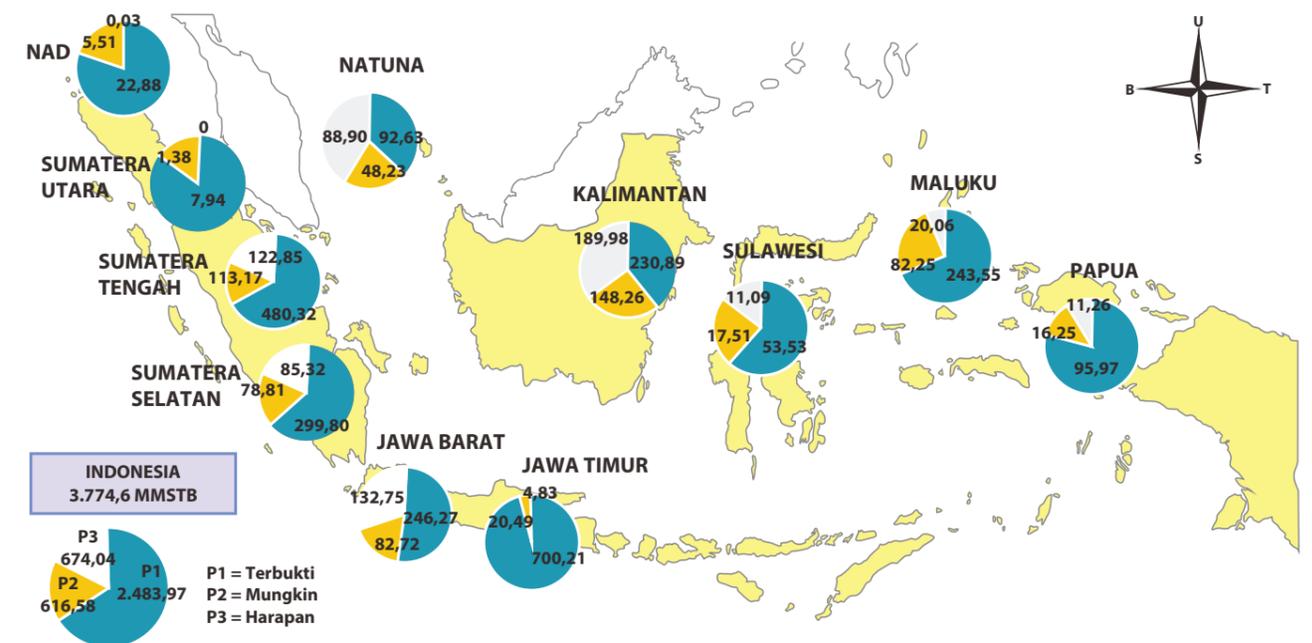
Realisasi cadangan tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Adanya perubahan perhitungan klasifikasi cadangan yang didasarkan pada *Petroleum*

Resources Management System (PRMS) 2018, di mana lapangan-lapangan yang tidak ada kegiatan pemroduksian (tidak diusahakan), status cadangannya berpindah kelas menjadi *contingent* dan *unrecoverable*. Perubahan klasifikasi cadangan minyak bumi yang signifikan terjadi antara lain di lapangan-lapangan milik Pertamina EP, PHE ONWJ, dan Rokan.

- Penurunan besaran cadangan Kontraktor karena adanya perhitungan ulang dengan adanya pengeboran-engeboran baru, ataupun adanya data penunjang baru yang lain.

GAMBAR CADANGAN MINYAK BUMI (STATUS 01.01.2019)



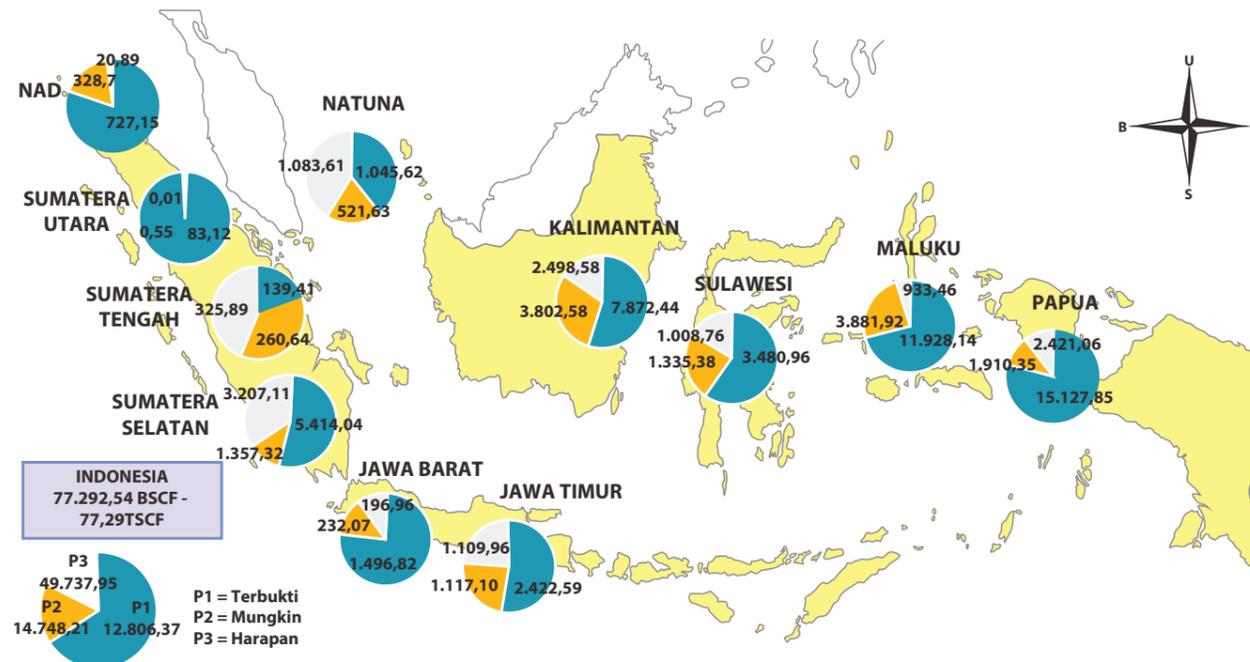
Dari jumlah cadangan minyak bumi terbukti tersebut, sebesar 1.712,48 MMSTB (atau 68,94%) berada di lapangan daratan dan sisanya sebesar 751,42 MMSTB (30,25%) berada di lautan.

Sementara itu, cadangan gas bumi status 01.01.2019 adalah sebesar 77,29 Triliun kaki kubik (TSCF). Cadangan tersebut terdiri dari cadangan Terbukti (P1) sebesar 49,74 TSCF dan cadangan Potensial sebesar 27,55 TSCF (terdiri dari cadangan Mungkin (P2) sebesar 14,75 TSCF dan cadangan Harapan (P3) sebesar 12,81 TSCF).

Cadangan gas bumi juga mengalami penurunan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Adanya perubahan perhitungan klasifikasi cadangan yang didasarkan pada *Petroleum Resources Management System* (PRMS) 2018, dimana lapangan-lapangan yang tidak ada kegiatan pemroduksian (tidak diusahakan), status cadangannya berpindah kelas menjadi *contingent* dan *unrecoverable*.
- Penurunan besaran cadangan Kontraktor karena adanya perhitungan ulang dengan adanya pengeboran-engeboran baru, ataupun adanya data penunjang baru yang lain.

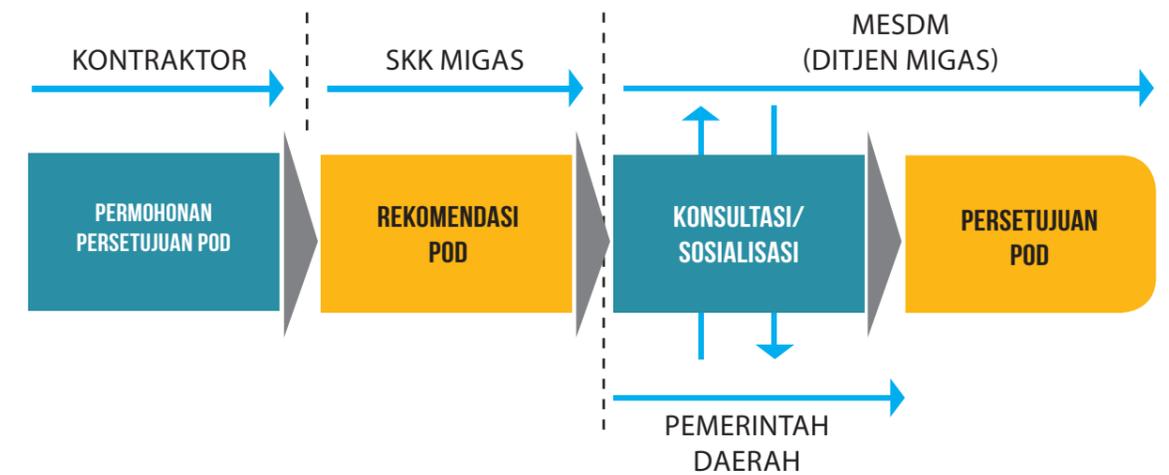
GAMBAR CADANGAN GAS BUMI
(STATUS 01.01.2019)



RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN/PLAN OF DEVELOPMENT (POD) I

Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali (POD I) yang akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja wajib mendapatkan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdasarkan pertimbangan dari SKK Migas serta berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan (Gubernur dan perlu mengikutsertakan

Bupati/Walikota yang wilayah administrasinya meliputi lapangan yang akan dikembangkan). Dalam mengembangkan dan memproduksi lapangan Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor Kontrak Kerja Sama wajib melakukan optimasi dan melaksanakannya sesuai kaidah keteknikan yang baik.



Pada tahun 2019, terdapat 5 surat persetujuan Menteri ESDM terkait rencana pengembangan lapangan yang pertama. Tahun 2019 juga menjadi tonggak bersejarah bagi industri migas di Indonesia karena pada tahun tersebut telah disetujui revisi rencana pengembangan lapangan yang pertama (Revisi POD I) lapangan gas terbesar di Indonesia yaitu Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela dengan perkiraan investasi mencapai ±

USD 19 miliar. Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela ini diharapkan dapat menambah besaran produksi gas bumi nasional, menciptakan *multiplier effects* pada ekonomi nasional, baik dampak secara langsung maupun tidak langsung, serta mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan khususnya di wilayah Indonesia Bagian Timur.

TABEL PERSETUJUAN POD I TAHUN 2019

NO.	LAPANGAN	WILAYAH KERJA	KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA	PERSETUJUAN POD I
1.	Randugunting	Randugunting	PT Pertamina Hulu Energi Randugunting	14 Januari 2019
2.	Mako	Duyung	West Natuna Exploration Ltd.	22 Februari 2019 (POD GS)
3.	Abadi	Masela	Inpex Masela Ltd.	5 Juli 2019 (Revisi POD I)
4.	Peusangan	Lhokseumawe	Zaralex N.V.	27 September 2019
5.	Kemuning	Alas Dara Kemuning	PT Pertamina EP Cepu ADK	18 November 2019



Konsultasi Daerah dengan Pemerintah Aceh terkait POD I Lapangan Peusangan Wilayah Kerja Lhokseumawe (8 Juli 2019)



Konsultasi Daerah dengan Pemerintah Jawa Tengah terkait POD I Lapangan Kemuning Wilayah Kerja Alas Dara Kemuning (17 Oktober 2019)

PENAWARAN *PARTICIPATING INTEREST* (PI) 10% KEPADA BUMD DAN/ATAU PERUSAHAAN NASIONAL

Participating Interest (PI) 10% merupakan besaran maksimal 10% pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketentuan mengenai PI 10% diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta daerah dalam pengelolaan industri migas di Indonesia.

Pada tahun 2019 terdapat pencapaian penting terkait Penawaran PI 10% kepada BUMD, yaitu pada

Wilayah Kerja Mahakam. Pada tanggal 12 September 2019, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengeluarkan persetujuan pengalihan PI 10% Wilayah Kerja Mahakam dari PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) kepada PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam (MMPKM). PT MMPKM merupakan BUMD yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan wilayah administrasinya terdapat pelampiran reservoir migas dari WK Mahakam. Dengan pengalihan PI ini, sinergi antara PHM dengan MMPKM serta Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dan Kutai Kartanegara diharapkan dapat memperlancar kegiatan operasi di Wilayah Kerja ONWJ.

TABEL PENGALIHAN PI 10% WK MAHAKAM

WILAYAH KERJA	KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA	BUMD PENGELOLA PI 10%	KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM BUMD PENGELOLA PI 10%	PERSETUJUAN PENGALIHAN PI 10%
Mahakam	PT Pertamina Hulu Mahakam	PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam	<ul style="list-style-type: none"> Prov. Kalimantan Timur (66,5%) Kab. Kutai Kartanegara (33,5%) 	12 September 2019

Direktorat Jenderal Migas secara rutin melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah terkait dalam bentuk sosialisasi dan konsultasi kebijakan. Sepanjang 2019, pemerintah daerah yang melakukan konsultasi terkait PI 10% antara lain Sumatera Barat,

Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Jawa Timur dan Jambi. Pembinaan ini diharapkan dapat mempercepat proses penawaran PI 10% sehingga dapat meningkatkan peran serta daerah dalam pengelolaan industri hulu migas.

PRODUKSI MIGAS

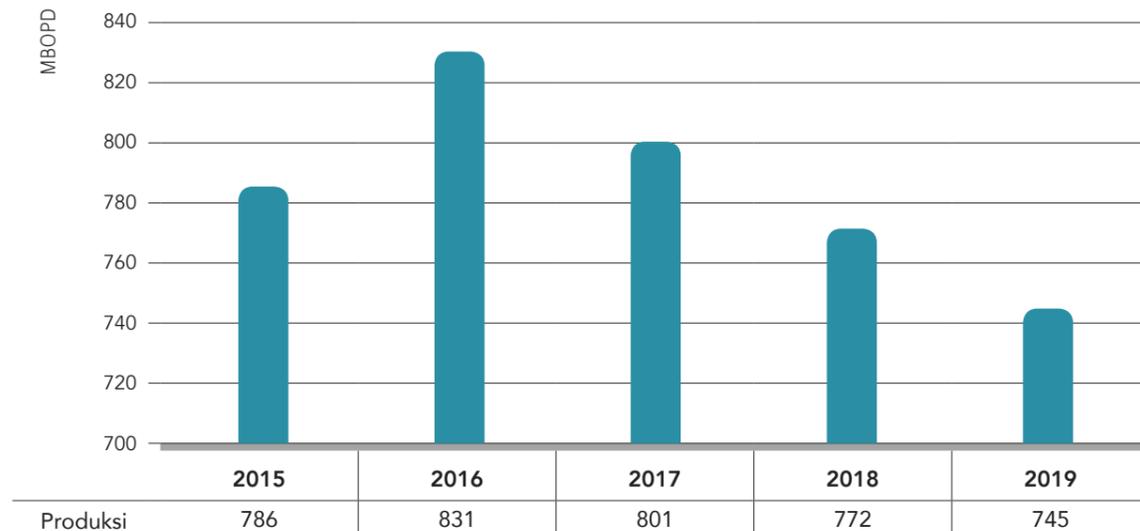
Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan produksi migas di antaranya:

1. Mendorong SKK Migas dan KKKS untuk melakukan:
 - a. Peningkatan kegiatan eksplorasi *onshore* dan *offshore* (termasuk laut dalam) dalam rangka meningkatkan cadangan migas.
 - b. Optimasi produksi pada lapangan yang sudah ada antara lain melalui *infill drilling* dan *workover*.
 - c. Penerapan *Enhanced Oil Recovery* (EOR) pada lapangan-lapangan minyak yang berpotensi.
 - d. Percepatan produksi dari pengembangan lapangan baru.
 - e. Percepatan pengembangan struktur *idle* di KKKS termasuk di PT Pertamina EP.
 - f. Peningkatan keandalan fasilitas produksi untuk mengurangi gangguan produksi mengingat mayoritas fasilitas produksi yang sudah ada merupakan fasilitas yang sudah cukup tua.

2. Meningkatkan penawaran Wilayah Kerja.
3. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perijinan, tumpang tindih dan pembebasan lahan, serta keamanan.

Realisasi produksi minyak bumi dan kondensat tahun 2019 adalah sebesar 745 ribu barel per hari (BOPD). Pencapaian produksi rata-rata minyak bumi 2 (dua) tahun terakhir mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan *performance reservoir* secara alami (*natural decline*) dan juga tidak ditemukannya cadangan besar yang akan menggantikan cadangan yang terus diproduksi.

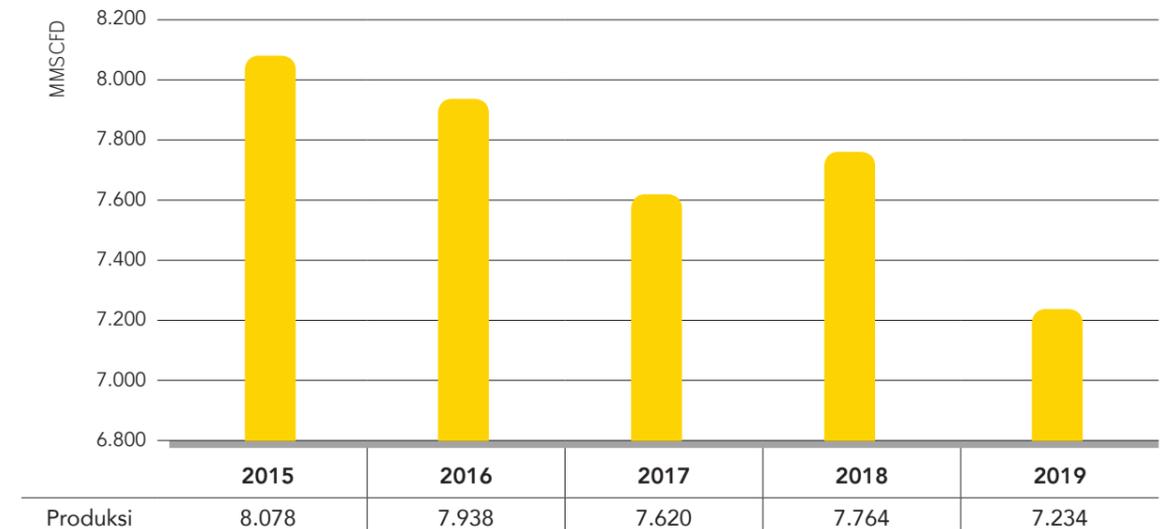
GRAFIK REALISASI PRODUKSI MINYAK BUMI TAHUN 2015-2019



Sementara itu, produksi gas bumi net pada tahun 2019 adalah sebesar 7.234 MMSCFD. Sama halnya dengan produksi minyak, pencapaian produksi rata-rata gas bumi juga mulai menurun yang disebabkan

oleh penurunan *performance reservoir* secara alami (*natural decline*) dan juga tidak ditemukannya cadangan besar baru.

GRAFIK REALISASI PRODUKSI GAS BUMI TAHUN 2015-2019



Pada tahun 2019 ini juga terdapat proyek-proyek yang sudah selesai pekerjaannya dan mulai *onstream*. Proyek-proyek tersebut terdiri dari 3 proyek terkait

minyak bumi dan 6 proyek terkait gas bumi seperti yang terlihat pada Gambar di bawah ini.

GAMBAR PROYEK ONSTREAM TAHUN 2019



Upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan produksi migas antara lain:

1. Mendorong SKK Migas dan KKKS untuk melakukan:
 - a. Peningkatan kegiatan eksplorasi di onshore dan offshore (termasuk laut dalam) dalam rangka meningkatkan cadangan migas.
 - b. Optimasi produksi pada lapangan eksisting antara lain melalui infill drilling dan workover.
 - c. Penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR) pada lapangan-lapangan minyak yang berpotensi.
 - d. Percepatan produksi dari pengembangan lapangan baru.
 - e. Percepatan pengembangan struktur idle di KKKS termasuk di PT Pertamina EP.

f. Peningkatan kehandalan fasilitas produksi untuk mengurangi gangguan produksi mengingat mayoritas fasilitas produksi eksisting merupakan fasilitas yang sudah cukup tua.

2. Meningkatkan penawaran Wilayah Kerja dalam rangka mencari cadangan migas baru.

3. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perijinan, tumpang tindih dan pembebasan lahan, serta keamanan.



Sumber daya energi bukan semata-mata untuk ekspor-impor. Ekspor kita makin lama makin turun dan sebaliknya (pasokan) untuk domestik makin lama makin besar. Kita gunakan migas untuk modal pembangunan.”

Plt. Direktur Jenderal Migas
Djoko Siswanto

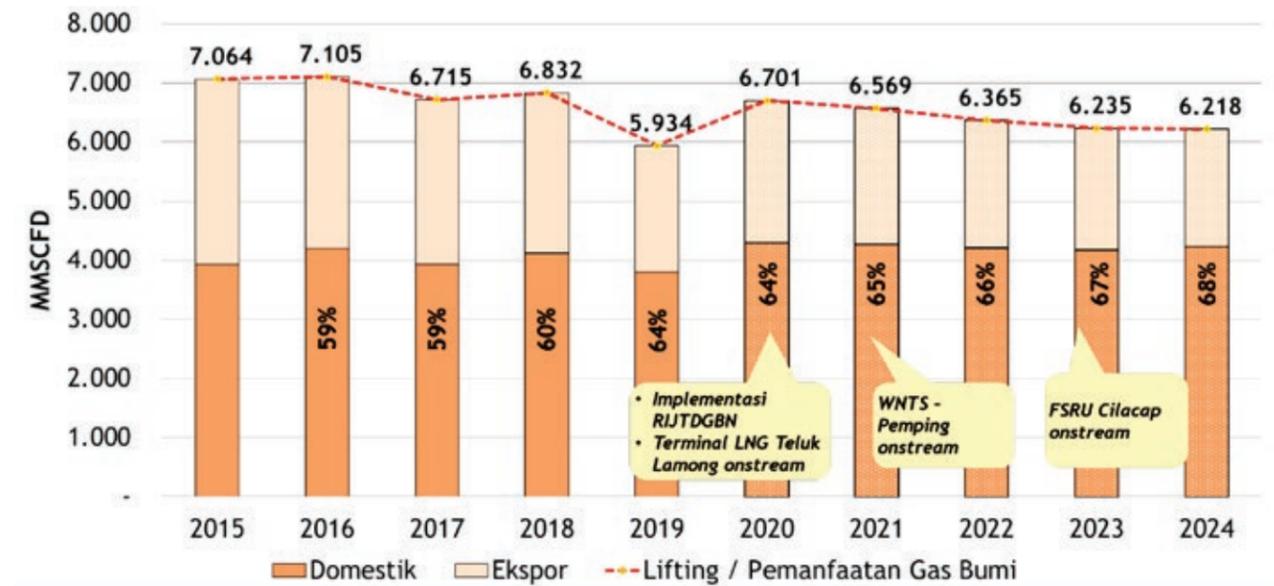


PEMANFAATAN GAS BUMI INDONESIA

Pemerintah terus berkomitmen agar seluruh kekayaan alam Indonesia dipergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia, sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat (3), tanpa terkecuali pemanfaatan gas bumi untuk kepentingan domestik.

Dalam RPJMN 2020 – 2024, target pemanfaatan gas tiap tahunnya ditargetkan untuk terus meningkat dari tahun 2020 sebesar 64% menjadi 68% di tahun 2024.

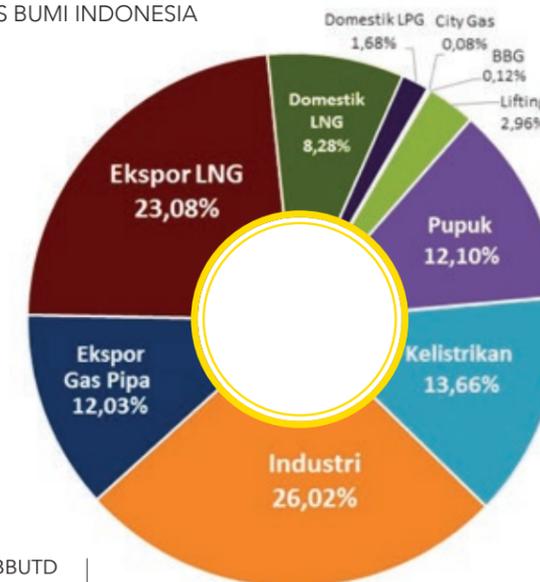
GRAFIK TARGET PEMANFAATAN GAS BUMI UNTUK DOMESTIK



Pada Tahun 2019, persentase pemanfaatan gas untuk domestik mencapai 64,89% dari target 64%. Sebagaimana ditunjukkan pada pie chart di bawah ini, sektor dalam negeri yang paling besar menggunakan

gas bumi adalah sektor Industri sebesar 26,02%, diikuti oleh sektor Kelistrikan sebesar 13,66% dan sektor Pupuk sebesar 12,10%.

GRAFIK PEMANFAATAN GAS BUMI INDONESIA

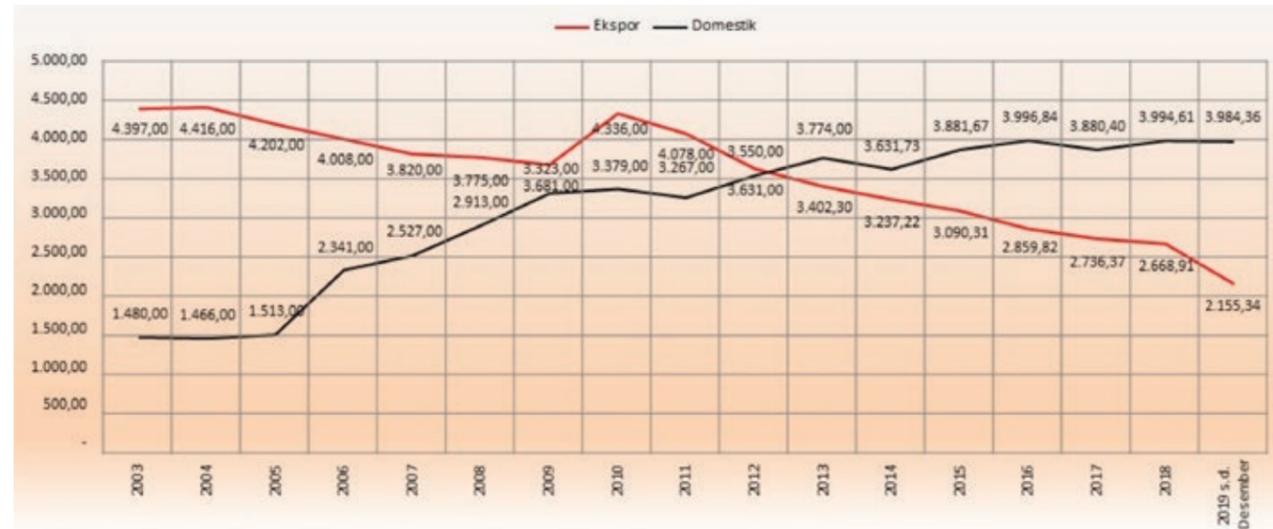


Dalam BBUTD

Sejak tahun 2009, realisasi penggunaan gas bumi untuk sektor kelistrikan lebih kecil dari kontrak yang ada dikarenakan sektor tersebut memiliki komoditas energi lain yang lebih kompetitif dibandingkan gas bumi dan juga terdapat penurunan beban listrik di beberapa daerah. Untuk sektor pupuk, realisasi penggunaan gas bumi cenderung stabil karena didasari kontrak jangka

panjang. Sementara itu, realisasi penggunaan gas bumi pada sektor industri lebih fluktuatif dikarenakan pengaruh harga gas yang berdampak kepada nilai kompetitif barang. Selain itu, terdapat juga penurunan pasokan gas ke pabrik dikarenakan penurunan alamiah gas. Berikut gambaran perkembangan pemanfaatan gas bumi Indonesia.

GRAFIK PERBANDINGAN PASOKAN EKSPOR DAN DOMESTIK
(IN BBTUD)



Beberapa upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan gas dalam negeri antara lain:

1. Mempersiapkan rencana gas untuk rumah tangga yang lebih masif hingga 4 juta Sambungan Rumah pada tahun 2024;
2. Pembangunan industri petrokimia di Indonesia Timur;
3. Rencana pemanfaatan gas dari Wilayah Kerja Corridor yang kontrak ekspornya akan berakhir di 2023 untuk dialihkan seluruhnya bagi pemanfaatan di dalam negeri;
4. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Bumi pada wilayah-wilayah terpencil di Timur Indonesia agar LNG Indonesia dapat dimanfaatkan maksimal untuk dalam negeri.

5. Untuk industri Pupuk dan Petrokimia, Pemerintah bersama DPR sepakat menjamin kepastian pasokan gas bumi untuk menjaga kelangsungan produktivitas Industri Pupuk, Petrokimia dan industri lainnya.

Dalam rangka peningkatan kapasitas distribusi gas bumi yang lebih masif, Pemerintah juga akan mendorong pembangunan pipa gas yang menghubungkan Sumatera hingga Jawa.

Di sisi harga, Pemerintah tengah melakukan evaluasi formula harga gas dengan harapan memberikan keuntungan bagi semua pihak, dari hulu, hilir hingga konsumen. Formula penentuan harga gas saat ini bervariasi, tergantung kepada harga gas di hulu, ongkos angkut, biaya distribusi dan margin trader.

INDONESIA CRUDE PRICE DAN LIFTING MINYAK DAN GAS BUMI

Lifting merupakan proses pengangkatan minyak dan gas bumi ke atas permukaan dengan menggunakan teknologi dan alat-alat tertentu yang siap diserahkan di tempat penjualan. Capaian lifting minyak dan gas

bumi pada tahun 2019 (periode Januari s.d. Desember 2019) mencapai 1.804 MBOPD atau sekitar 89% dari target APBN tahun 2019 sebesar 2.025 MBOPD. Rinciannya adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	2017		2018		2019		CAPAIAN %
			APBN	REALISASI	APBN	REALISASI	APBN	REALISASI	
1	Indonesia Crude Price	US\$/barel	48	51,19	48	67,47	70	62,37	89%
2	Lifting Migas								
	a. Lifting Minyak Bumi	MBOPD	815	804	800	778	775	746	96%
	b. Lifting Gas Bumi	MBOEPD	1.150	1.141	1.200	1.133	1.250	1.058	85%
	c. Total Lifting Migas		1.965	1.945	2.000	1.911	2.025	1.804	89%



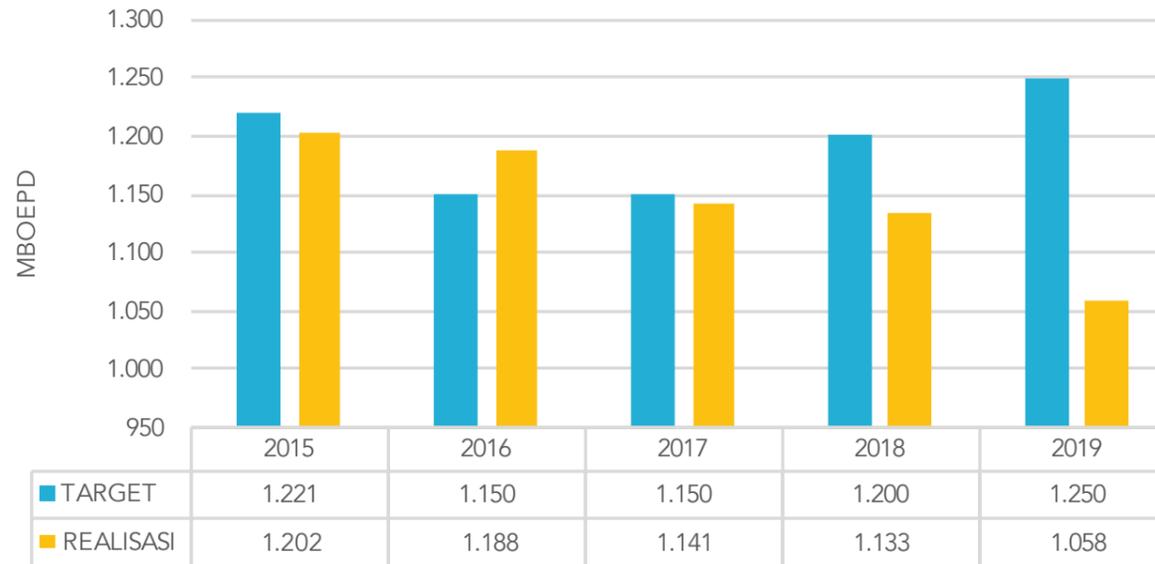
Pencapaian target *lifting* migas tersebut masih menghadapi banyak kendala di lapangan, baik kendala operasi, kegiatan pengembangan, maupun kendala nonteknis lainnya. Untuk mengatasi kendala tersebut.

Kementerian ESDM bersama dengan SKK Migas dan seluruh KKKS senantiasa berusaha untuk dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan pencapaian target *lifting* migas melalui:

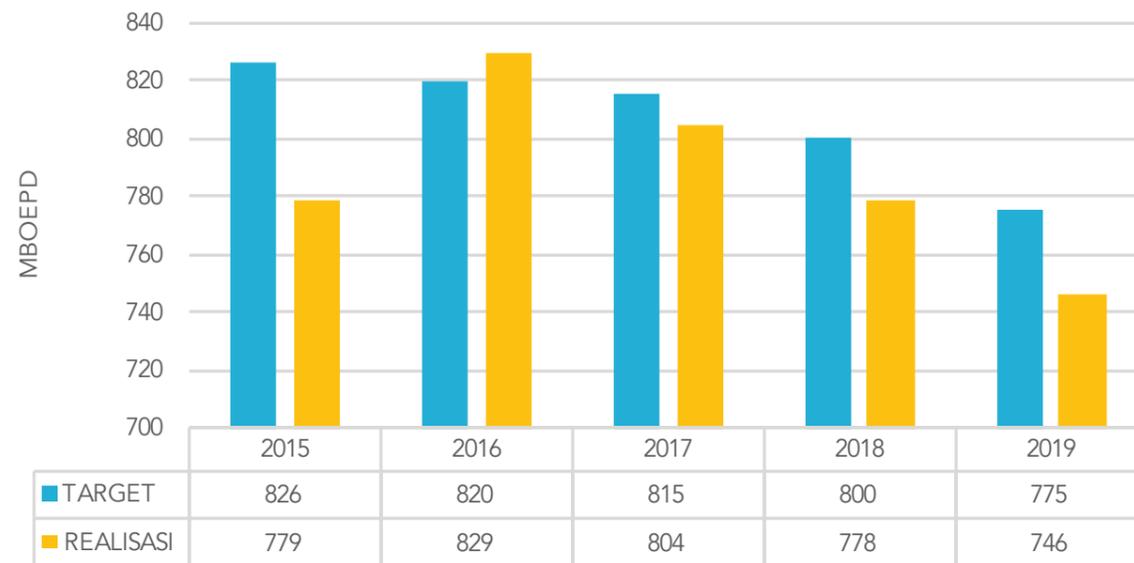
- Percepatan eksplorasi dan penyelesaian pengembangan wilayah kerja migas;
- Penerapan teknologi terkini dan tepat guna;
- Mengupayakan metode-metode baru penemuan sumber daya dan cadangan migas;
- Monitoring proyek pengembangan lapangan *onstream* tepat waktu;
- Melakukan pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan fasilitas produksi;
- Pengembangan Wilayah Kerja Migas;
- Monitoring pencapaian target *lifting*.

Dalam lima tahun terakhir, realisasi *lifting* minyak bumi maupun gas bumi cenderung bergerak menurun seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini.

GRAFIK LIFTING GAS BUMI 2019



GRAFIK LIFTING MINYAK BUMI 2019



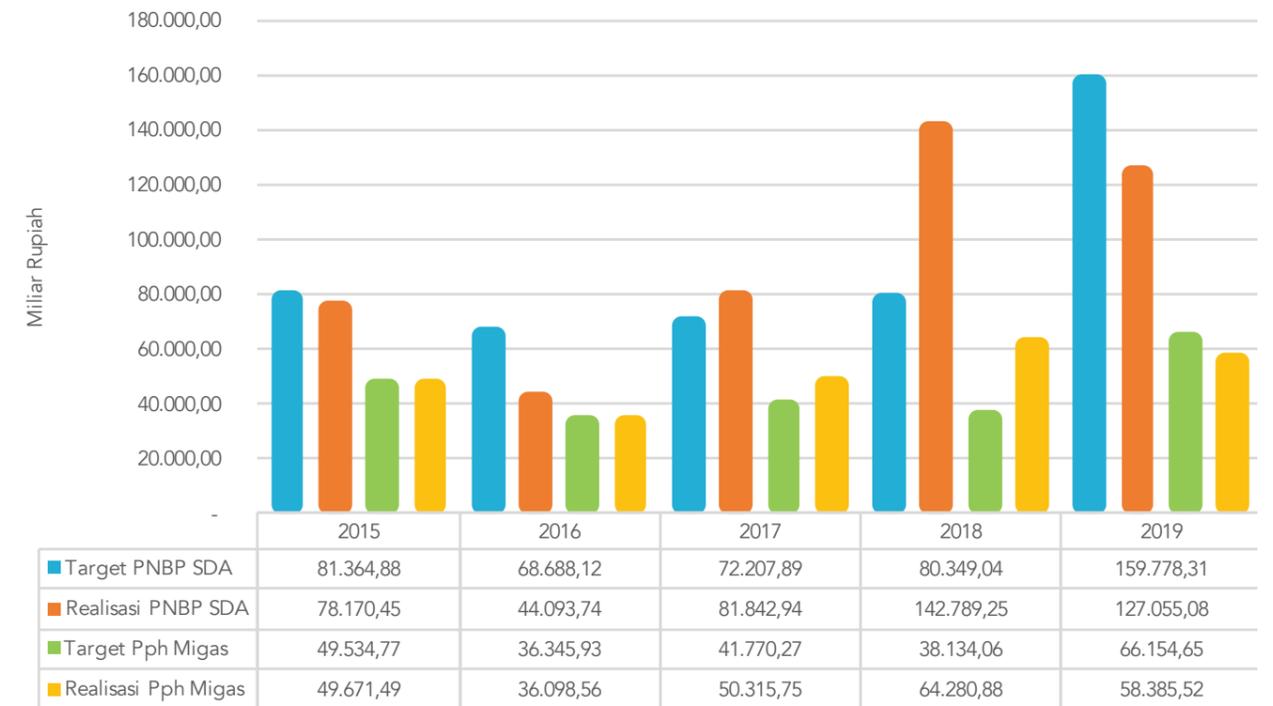
PENERIMAAN NEGARA MINYAK DAN GAS BUMI

• REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SUMBER DAYA ALAM (SDA) MIGAS

Realisasi PNBP SDA subsektor migas pada tahun 2019 mencapai Rp 127,05 triliun atau sekitar 79,52% dari target APBN yang ditetapkan sebesar Rp 159,7 triliun.

Perkembangan realisasi penerimaan negara minyak dan gas bumi lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

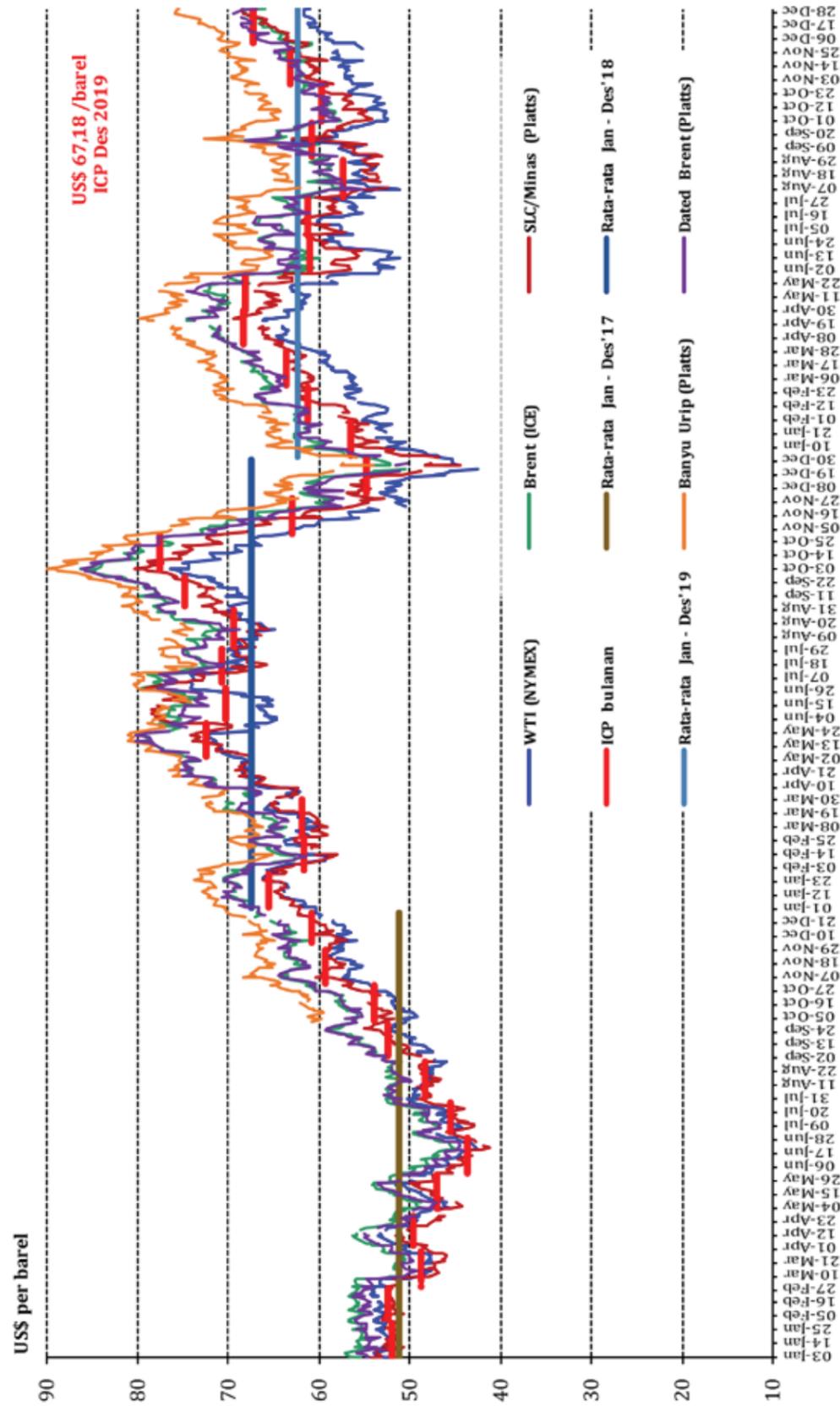
GRAFIK REALISASI PENERIMAAN NEGARA MIGAS 2015-2019



Besaran realisasi penerimaan negara subsektor migas tersebut sangat dipengaruhi oleh realisasi *lifting* migas, harga minyak mentah Indonesia (ICP), *cost recovery*, dan nilai tukar Rupiah (kurs) terhadap USD. Hal ini dapat terlihat pada diagram di bawah di mana penerimaan negara subsektor migas terindikasi sangat elastis terhadap harga minyak mentah Indonesia. ICP yang tinggi cenderung diikuti dengan tingginya penerimaan negara subsektor migas dan demikian

sebaliknya. Hal ini menjadikan pencapaian indikator kinerja penerimaan negara subsektor migas sangat terpengaruh signifikan pada dinamika harga minyak mentah Indonesia dan dunia, mengingat harga ICP cenderung mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia, WTI, dan Brent. ICP pada bulan Desember 2019 tercatat sebesar USD 67,18 per barel sedangkan ICP Rata-rata bulan Januari sampai dengan Desember 2019 adalah sebesar USD 62,37/ barel.

GRAFIK PERKEMBANGAN HARGA MINYAK MENTAH



ICP Des 2019
US\$ 67,18/bbl;
ICP Rata-rata Jan - Des '19
US\$ 62,37/bbl;
ICP Rata-rata Jan - Des '18
US\$ 67,47/bbl;
ICP Rata-rata Jan - Des '17
US\$ 51,19/bbl;

• REALISASI PNBP FUNGSIONAL

Realisasi PNBP Fungsional dari kegiatan usaha migas pada tahun 2019 mencapai USD 324.863.601 atau sekitar Rp 4,56 triliun. Realisasi penerimaan

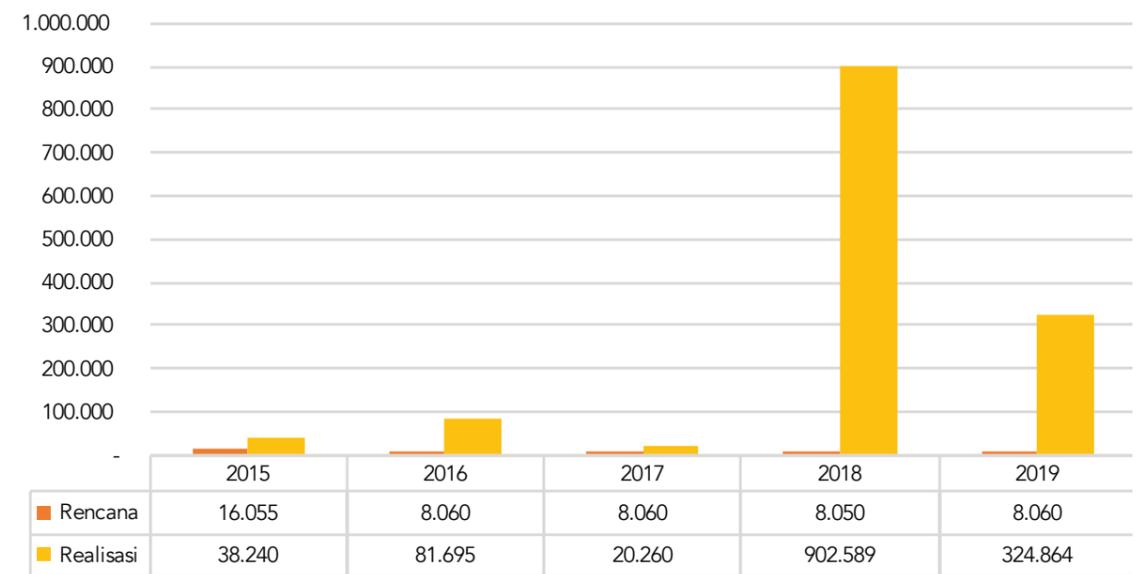
PNBP Fungsional dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

NO	KODE AKUN JENIS PENDAPATAN	REALISASI PNBP MIGAS (DALAM USD)		
		2017	2018	2019
1	Jasa informasi potensi lelang wilayah kerja migas dan gas metana batubara (<i>bid document</i>)	110.000	230.000	200.087
2	Bonus tanda tangan (<i>signature bonus</i>) yang menjadi kewajiban kontraktor minyak dan gas bumi	6.000.000	881.248.000	304.600.000
3	Kewajiban finansial atas pengakhiran kontrak kerjasama (<i>terminasi</i>) yang belum memenuhi komitmen pasti eksplorasi	14.150.000	21.110.695	20.063.514
Jumlah		20.260.000	902.588.695	324.863.601
Setara dengan Rp. (milyar)		302,11	13.116,16	4.566,82

Penerimaan negara bukan pajak pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2018 hal ini disebabkan karena adanya penurunan pembelian *bid document* dari 46 *bid document* menjadi 40 *bid document*, dan penurunan *signature*

bonus dari 31 *signature bonus* menjadi 14 *signature bonus* sampai akhir tahun 2019. Namun demikian bila dibandingkan dengan tahun 2017, realisasi 2019 masih mengalami kenaikan yang signifikan.

PENERIMAAN PNBP FUNGSIONAL 2015-2019
DALAM RIBU USD



KESELAMATAN HULU MIGAS

Kegiatan usaha hulu migas yang tinggi risiko, biaya, dan teknologi sangat membutuhkan pengawasan dan pembinaan. Terjadinya kecelakaan dan kegagalan dalam kegiatan usaha hulu migas dapat menyebabkan timbulnya pencemaran lingkungan, kerugian harta benda bahkan juga nyawa manusia. Oleh karena itu, kegiatan di sektor hulu migas harus senantiasa diawasi dan dibina agar tidak menimbulkan kerugian-kerugian tersebut.

Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengamanatkan bahwa pembinaan dan

pengawasan terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilakukan oleh Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Inspeksi yang dibantu oleh para Inspektur Migas.

Dalam rangka peningkatan budaya keselamatan migas pada kegiatan usaha hulu migas, Direktorat Jenderal Migas telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

GAMBAR UPAYA PENERAPAN PENINGKATAN BUDAYA KESELAMATAN



1. Audit SMK

Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) atau dikenal dengan audit sistem keselamatan kerja dan kesehatan kerja migas adalah suatu kegiatan untuk mengetahui dan memverifikasi apakah sistem manajemen pengamanan dan keselamatan kerja yang terdapat di suatu kegiatan usaha sudah berjalan dengan

baik. Pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Migas telah melakukan audit SMK pada kegiatan usaha hulu migas pada 6 KKKS di 6 wilayah operasi. Berikut adalah pelaksanaan audit SMK yang dilaksanakan pada tahun 2019.

NO	PERUSAHAAN	PELAKSANAAN AUDIT SMK	NILAI
1	Ophir Indonesia (Bangkanai) Ltd.	19 s.d. 22 Maret 2019	80
2	PT Pertamina EP Asset 3 Field Tambun	25 Maret 2019	91
3	Husky CNOOC Madura Limited	24 s.d. 26 April 2019	90
4	PT Pertamina EP Asset 3 Field Subang	28 Juni 2019	84
5	JOB Pertamina – Medco E&P Tomori Sulawesi	22 s.d. 23 Juli 2019	92,8
6	BOB PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu	6 s.d. 7 Agustus 2019	81



Audit SMK di Ophir Indonesia (Bangkanai) Ltd. 19-22 Maret 2019



Audit SMK di PT Pertamina EP Asset 3 Field Tambun, 25 Maret 2019

2. Bimbingan Teknis Kepala Teknik

Bimbingan teknis Kepala Teknik dilaksanakan sebagai wadah pemberian pembinaan kepada KKKS dalam menjamin keselamatan pada kegiatan usaha hulu migas. Upaya-upaya dan strategi yang dilakukan pada pelaksanaan bimbingan teknis kepala teknik adalah:

- Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan pada usaha hulu migas.

- Melakukan kegiatan pembinaan kepada para Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik.
- Memberikan penghargaan kepada Kepala Teknik.

Bimbingan teknis di tahun 2019 diselenggarakan bersamaan dengan acara Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Migas Tahun 2019.



Bimbingan Teknis Kepala Teknik dan Penganugerahan Penghargaan, Jakarta, 26 November 2019

EVALUASI PERPANJANGAN DAN/ATAU ALIH KELOLA KONTRAK KERJA SAMA

Evaluasi Perpanjangan dan/atau Alih Kelola Kontrak Kerja Sama mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya dan Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir Kontrak Kerja

Samanya. Berdasarkan data yang ada, terdapat 30 Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja yang akan berakhir di tahun 2018-2026.

Selama tahun 2019, jumlah Wilayah Kerja yang selesai diproses usulan perpanjangan/alih kelola Kontrak Kerja Samanya adalah sejumlah 5 (lima) Wilayah Kerja. Kelima Wilayah Kerja tersebut antara lain:

NO	WILAYAH KERJA	KONTRAKTOR	KONTRAK KERJA SAMA	
			TANGGAL TANDA TANGAN	TANGGAL EFEKTIF
1	Rokan	PT Pertamina Hulu Rokan (100%)	9 Mei 2019	9 Agustus 2021
2	Rimau	PT Medco E&P Rimau (95%) Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (5%)	14 Februari 2019	23 April 2023
3	Corridor	ConocoPhillips (Grissik) Ltd. (46%) PT Pertamina Hulu Energi Corridor (30%) Talisman (Corridor) Ltd. (24%)	11 November 2019	20 Desember 2023
4	Pangkah	Saka Indonesia Pangkah Limited (65%) Saka Indonesia Pangkah BV (25%) Saka Pangkah LLC (10%)	18 Oktober 2019	8 Mei 2026
5	Masela	Inpex Masela Ltd. (65%) Shell Upstream Overseas Services (I) Limited (35%)	10 Oktober 2019	16 November 2035

Dari penandatanganan kelima Wilayah Kerja Perpanjangan/Alih Kelola tersebut, Pemerintah memperoleh total PNBP dari *signature bonus* yang dibayarkan oleh Kontraktor sebesar USD 1,04 miliar.

Selain itu, Pemerintah juga memperoleh komitmen investasi di bidang eksplorasi migas melalui Komitmen Kerja Pasti (KKP) 5 tahun pertama sebesar USD 855,38 juta.

GAMBAR 5 (LIMA) WILAYAH KERJA PERPANJANGAN/ ALIH KELOLA TAHUN 2019



Penandatanganan Kontrak Kerja Sama Perpanjangan Wilayah Kerja Rimau (14 Februari 2019)

CAPAIAN HILIR MIGAS

KAPASITAS PENGOLAHAN MIGAS

Kilang Minyak **1.169 MBSD**
Kilang LPG **4,74 MTPA**
Kilang LNG **44,09 MTPA**

PRODUKSI HASIL OLAHAN MIGAS

BBM **44,52 Juta KL**
LPG **1,96 Juta Ton**
LNG **16,43 MTPA**

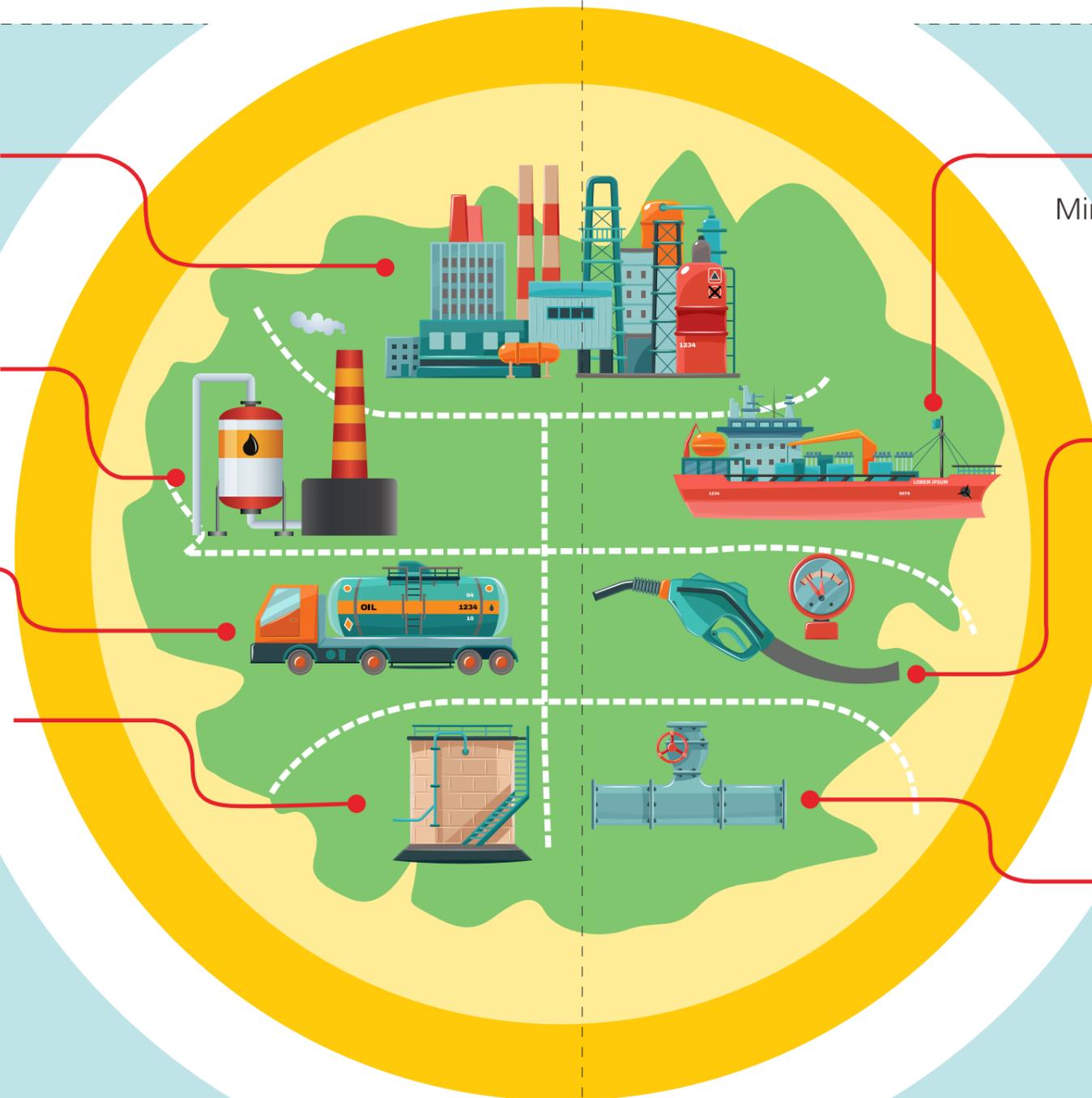
PENYALUR BBM

6.928 titik

KAPASITAS PENYIMPANAN MIGAS

Minyak Bumi dan BBM **84,31 ribu KL**
LPG **5,55 Ribu Ton**
CNG **334 Ribu M³**

Tersebar di seluruh wilayah NKRI,
menunjang kemudahan distribusi
dan peningkatan ketahanan energi
nasional.



KAPASITAS PENGANGKUTAN MIGAS

Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan: **19.878 KL**
LPG: **3.683 Ton**
CNG: **5.920 M³**
Gas Pipa: **288 MMSCFD**
LNG: **18.565 M³**

REALISASI PENJUALAN BBM DAN LPG

SUBSIDI

BBM **16,37 Juta KL**
LPG **6,84 Juta MT**

NON SUBSIDI

BBM **60,42 Juta KL**
LPG **0,93 Juta MT**

PENYALURAN FAME

BBM **6,18 Juta KL**
LPG -

PENYALUR LPG

SP(P)BE **550 (PSO)**
Penyalur / Agen **4.412 (PSO dan Non PSO)**
Pangkalan **167.119 (PSO)**



Program B30 merupakan upaya Pemerintah melepaskan diri terhadap energi fosil, mengurangi ketergantungan impor BBM, serta menghemat devisa negara Rp 63 triliun.”

Presiden Republik Indonesia
Joko Widodo

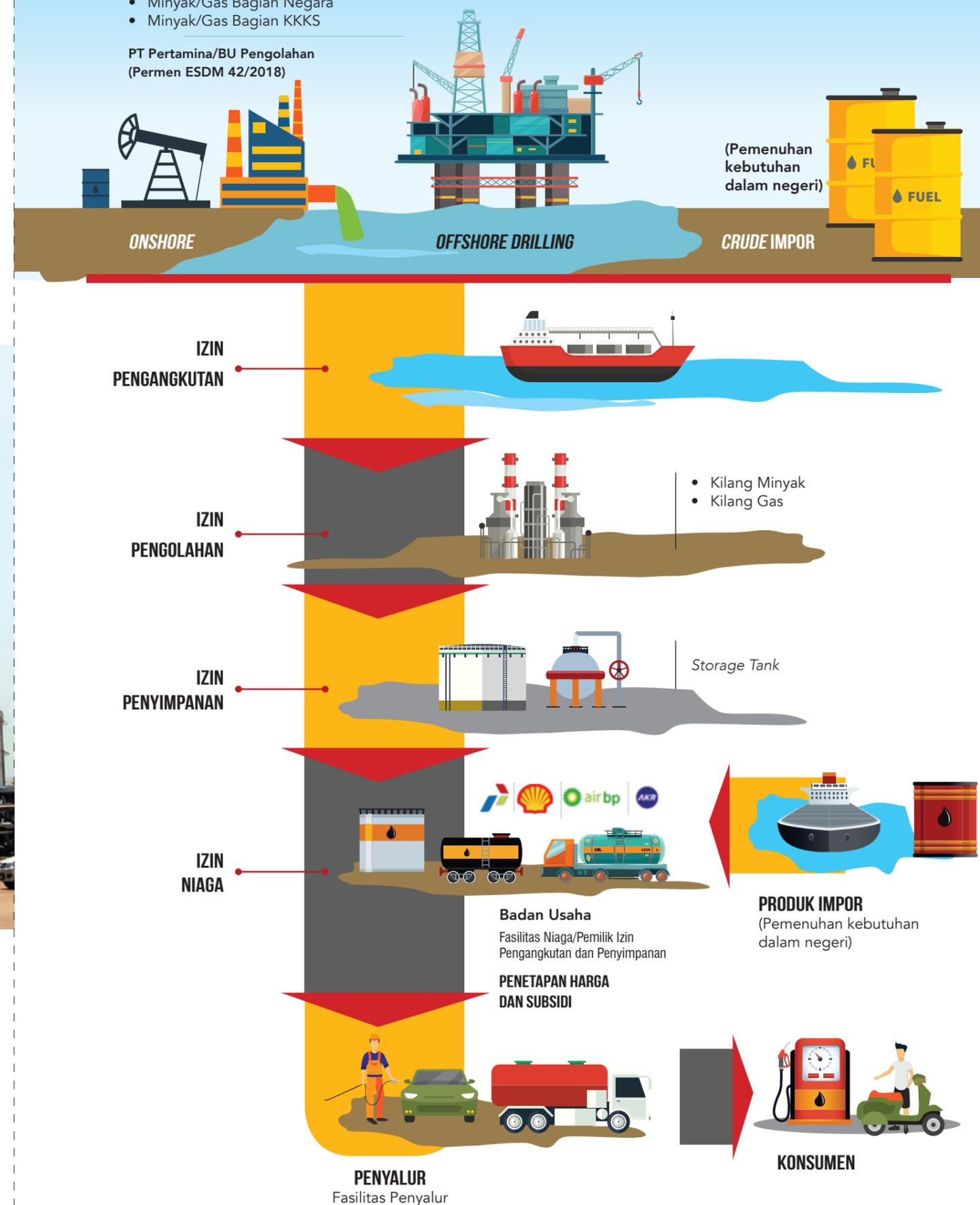


Sarana pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak dan gas bumi dilakukan secara terintegrasi agar penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Nasional sampai ke konsumen akhir/masyarakat dapat berlangsung dengan lancar. Kegiatan Usaha Hilir Migas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Proses bisnis dan pemantauan kegiatan

usaha hilir migas pada dasarnya mengacu kepada perizinan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Migas dan diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

- Minyak/Gas Bagian Negara
- Minyak/Gas Bagian KKKS

PT Pertamina/BU Pengolahan
(Permen ESDM 42/2018)



PENGOLAHAN MIGAS

A FASILITAS PENGOLAHAN MINYAK BUMI EKSTISTING

Sejak tahun 2014 kegiatan usaha pengolahan minyak bumi di Indonesia dilakukan di 4 kilang, yaitu Kilang Pertamina dengan 6 Unit pengolahan (RU II Dumai, RU III Plaju, U IV Cilacap, RU V Balikpapan, RU VI Balongan dan RU VII Kasim), Kilang PT Trans Pacific Petrokimia Indotama (PT TPPI), PT Tri Wahana Universal (PT TWU) dan Kilang Cepu. Akan tetapi sejak tahun 2018 PT Tri Wahana Universal berhenti beroperasi disebabkan keterbatasan pasokan bahan baku kilang. Pada tanggal 31 Desember 2019, ijin usaha pengolahan PT TWU pun berakhir.

Kegiatan operasi kilang-kilang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Operasi Kilang BBM, terdiri dari seluruh kilang baik

Pertamina maupun swasta yang memproduksi BBM dan non-BBM serta produk lainnya.

2. Operasi Kilang Petrokimia, terdiri dari Kilang RU III Plaju yang memproduksi Polytam (Polypropylene Pertamina), Kilang RU IV Cilacap yang memproduksi Paraxylene dan Benzene serta produk lainnya, Kilang RU VI Balongan yang memproduksi Propylene, Kilang PT TPPI yang memproduksi Paraxylene, Ortoxylene, Benzene dan Toluene, dan Kilang Cepu yang memproduksi Pertasol.
3. Operasi Kilang Lube Base di RU IV Cilacap yang memproduksi Lube base, Paraffinic, Slack Wax, Minarex dan asphalt.

GAMBAR PETA KILANG MINYAK DI INDONESIA



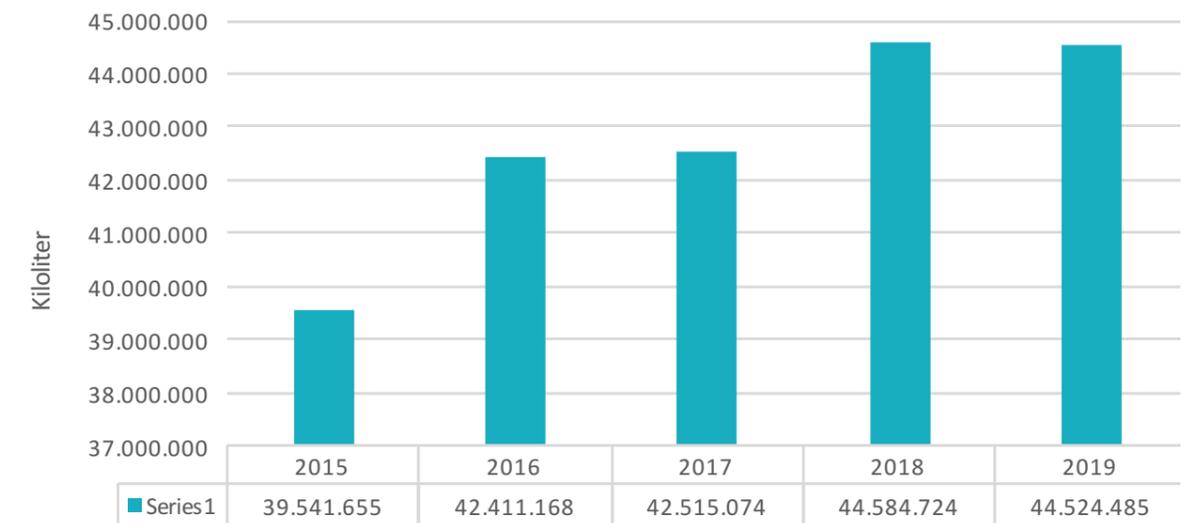
Selain menerbitkan Ijin pengolahan minyak bumi, Direktorat Jenderal Migas juga menerbitkan Ijin Pengolahan Hasil Olahan. Adapun kegiatan usahanya adalah mengolah minyak pelumas bekas menjadi BBM

di fasilitas pengolahan. Saat ini fasilitas pengolahan hasil olahan yang sudah memiliki ijin adalah sebagai berikut:

TABEL DATA BADAN USAHA PENGOLAHAN HASIL OLAHAN

NO	BADAN USAHA	KOMODITAS USAHA	KAPASITAS DISAIN
1	PT Patra SK	BBM	25.000 barel/hari
2	PT Tawu Inti Bati	BBM	48000 ton/tahun (Pelumas Bekas)
3	PT Isano Lopo Industri	BBM	2.500 KL/tahun (Pelumas Bekas)
4	PT Laguna Industri Nusantara	BBM	1.500 KL/bulan (Pelumas Bekas)
5	PT Primergy Solution	BBM	2.300 KL/bulan Pelumas Bekas
7	PT BSSTEC	BBM	12000 ton/tahun
8	PT Mega Green Technology	BBM	1.626 KL/month (Pelumas Bekas, Sludge & Slope Oil)
9	PT Metro Abadi Raya	BBM	2.400 KL/month (Pelumas Bekas)
10	PT Berdikari Jaya Bersama	BBM	1.200 KL/bulan (Pelumas Bekas)
11	PT Eminens Resources Indonesia	BBM	660 KL/month (Sludge Oil)
12	PT Berkat Restu Guru	BBM	1.200 Ton/bulan
13	PT Beringin Petroleum Energy	BBM	480 KL
14	PT Sinar Surya Maju Sentosa	BBM	2.145 KL/month (Pelumas Bekas) & 1.378 KL/month (Sludge Oil)

GRAFIK PRODUKSI BBM TAHUN 2015-2019



Produksi kilang dalam negeri selama 5 tahun terakhir terlihat cenderung meningkat. Hal ini disebabkan sejak tahun 2016 PT TPPI telah beroperasi kembali dan RFCC (*Residue Fluid Catalytic Cracker*) Cilacap sudah beroperasi. Selain itu, pada bulan April 2019, Proyek Langit Biru Cilacap telah *on stream* yang berdampak pada kenaikan produksi pertamax sebesar 68%. Akan tetapi produksi total pada tahun 2019 relatif sama dengan angka produksi tahun 2018 dikarenakan pada bulan Oktober 2019 dilakukan *turn around* di RU IV Cilacap sehingga produksinya lebih kecil dibandingkan pada saat kilang beroperasi normal.

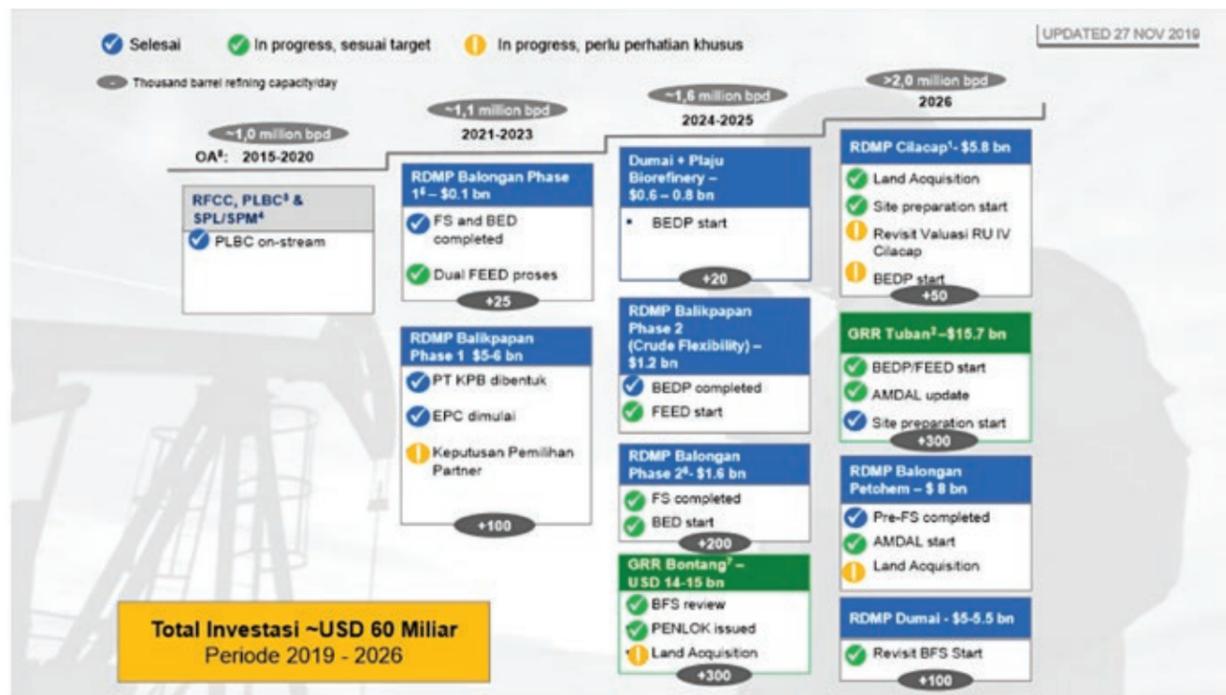
Sebagai informasi, produksi BBM dari kilang dalam negeri hanya mampu memenuhi kebutuhan nasional sekitar 55% sedangkan sisanya dipenuhi dari impor.

B. PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KILANG DALAM NEGERI

Sebagai respon terhadap permasalahan impor tersebut, Pemerintah terus berupaya melakukan pengawasan dan pengimplementasian Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri, dengan terus berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero).

PT Pertamina (Persero) pun telah melakukan berbagai upaya demi terselenggaranya pembangunan dan pengembangan kilang minyak tersebut. Salah satunya adalah melalui Akselerasi Masterplan Megaprojek seperti gambar di bawah ini.

GAMBAR AKSELERASI MASTERPLAN MEGAPROYEK PT PERTAMINA (PERSERO)



Adapun schedule penyelesaian proyek dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR JADWAL PENYELESAIAN PROYEK RDMP DAN GRR PT PERTAMINA (PERSERO)

Nama proyek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Detail
RDMP Balikpapan												
- RDMP Balikpapan - Phase 1		BED/ FEED	EPC tender	EPC						Jul-23		Here
- RDMP Balikpapan - Phase 2				BED	DFC	FID + EPC				Dec-25	Jun-26	Here
RDMP Cilacap												
	BFS	Valuasi, Tax Holiday & Pengadaan Lahan		BED	DFC	EPC				May-26	Dec-26	Here
GRR Tuban												
	BFS	Pengadaan Lahan, Seleksi Eng. Consultant & Licensor		GED (BED & FEED)	EPC tender	EPC				Jun-26	Aug-26	Here
RDMP Balongan												
- Phase 1			FS + BED	DFC	FID + EPC					Apr-23		Here
- Phase 2			BFS	BED	DFC	EPC				Dec-25	Apr-26	Here
GRR Bontang												
			BFS	GED (BED/ FEED)	EPC					Feb-25	Jun-27	Here
RDMP Balongan Petchem												
			BFS	BED	DFC	EPC				Aug-26		Here
RDMP Dumai												
			BFS	BED	DFC	EPC				Dec-26	Aug-27	Here

Diharapkan proses pembangunan dan pengembangan kilang tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun sehingga tujuan pengurangan volume impor dapat terealisasi.

C. KAPASITAS KILANG PENGOLAHAN GAS BUMI

Kilang pengolahan gas bumi di Indonesia berdasarkan produk yang dihasilkan dibagi menjadi kilang LNG dan kilang LPG. Kilang LNG dan kilang LPG ada yang mengikuti skema hulu dan ada yang mengikuti skema hilir. Kilang LNG dan LPG skema hulu merupakan lanjutan kegiatan pengolahan lapangan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang bagian kegiatan pengolahannya masuk ke dalam *Cost Recovery*. Sedangkan kilang LNG dan LPG skema hilir bukan merupakan lanjutan kegiatan pengolahan lapangan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di mana Badan Usaha terlebih dahulu harus memiliki Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi yang diterbitkan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 yang diperbarui dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018.

a. Kapasitas Kilang LNG
Sampai dengan tahun 2019, kapasitas kilang LNG dalam negeri adalah sebesar 44,09 MMTPA, yang terdiri dari 3 (tiga) kilang LNG pola hulu, yaitu kilang PT Peta Arun, kilang PT Badak, kilang PT BP Tangguh, dan 1 (satu) kilang LNG pola hilir, yaitu kilang PT Donggi Senoro LNG. Saat ini hanya 2 (dua) kilang pola hulu yang beroperasi yaitu kilang PT Badak dan kilang PT BP Tangguh, sedangkan kilang PT Arun LNG telah berhenti beroperasi sejak bulan Oktober tahun 2014 karena telah berakhirnya *Sales Purchase Agreement* antara PT Arun LNG dengan pembeli.

PT Badak memperoleh pasokan bahan baku gas bumi dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga, PT Pertamina Hulu Kaltim, PT ENI Muara Bakau dan PT Chevron. PT BP Tangguh memperoleh pasokan bahan baku gas bumi dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT BP Tangguh. Sedangkan PT Donggi Senoro LNG memperoleh pasokan bahan baku gas bumi dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Pertamina EP dan JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi (JOB PMTS).

TABEL KAPASITAS KILANG LNG

NO	BADAN USAHA	LOKASI	KAPASITAS (MMTPA)	KETERANGAN
1	PT Arun LNG	Lhokseumawe	12,85	Skema hulu, berhenti beroperasi sejak 2014
2	PT Badak	Bontang	21,64	Skema hulu, beroperasi
3	PT BP	Tangguh	7,60	Skema hulu, beroperasi
4	PT Donggi Senoro LNG	Luwuk	2	Skema hilir, beroperasi
Total Kapasitas Terpasang			44,09	
Total kapasitas operasi			31,24	

Sebagai informasi, total kapasitas operasi kilang LNG hanya sebesar 31,24 MMTA dibandingkan total kapasitas terpasangnya. Angka kapasitas ini tidak mengalami perubahan sejak tahun 2015 dikarenakan belum adanya kilang LNG baru, baik pola hulu maupun pola hilir, yang beroperasi pada tahun 2019. Sebagai

upaya untuk menambah kapasitas kilang LNG dalam negeri di masa mendatang, Direktorat Jenderal Migas telah menerbitkan Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi dengan produk LNG bagi beberapa Badan Usaha yang menggunakan pola hilir.

TABEL BADAN USAHA POLA HILIR YANG MEMILIKI IZIN USAHA SEMENTARA PENGOLAHAN GAS BUMI DENGAN PRODUK LNG

NO	BADAN USAHA	LOKASI	KAPASITAS	KETERANGAN
1	PT Paraamartha LNG	Sidoarjo	170 ton per hari	• Nilai investasi USD 39.741.667
2	PT Kayan LNG Nusantara	Tana Tidung	500 ton per hari	• Nilai investasi USD 141.150.900
3	PT Sumber Aneka Gas	Tuban	15 MMSCFD	• Nilai investasi USD 46.690.000
4	PT Natgas	Batam	50 ton per hari	• Nilai investasi USD 24.120.000

b. Kapasitas Kilang LPG

Sampai dengan tahun 2019, kapasitas kilang LPG dalam negeri adalah 4,74 MTPA, yang terdiri dari 6 (enam) kilang LPG pola hulu, 18 (delapan belas) kilang LPG pola hilir dan LPG yang dihasilkan dari 5 (lima) kilang minyak PT Pertamina (Persero). Namun

demikian, beberapa kilang LPG pola hulu dan kilang LPG pola hilir tersebut telah berhenti beroperasi karena tidak mendapat pasokan bahan baku gas bumi dan telah habis Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi-nya.

TABEL KAPASITAS KILANG LPG DARI KILANG MINYAK

BADAN USAHA	LOKASI	KAPASITAS (TON/HARI)	KAPASITAS (MTPA)
PT. Pertamina (Persero)	Dumai	185	68
PT. Pertamina (Persero)	Plaju	360	131
PT. Pertamina (Persero)	Cilacap	871	318
PT. Pertamina (Persero)	Balikpapan	250	91
PT. Pertamina (Persero)	Balongan	1500	548
Sub Total Kilang Minyak			1.156

TABEL KAPASITAS KILANG LPG POLA HULU DAN POLA HILIR

NAMA BADAN USAHA	LOKASI	KAPASITAS (TON/HARI)	KAPASITAS (MTPA)
Kilang LPG Pola Hulu			
PT. Badak NGL	Bontang	2.740	1.000
PT. Chevron *	T. Santan	247	90
PT. Petrogas	Basin	38	14
PT. Petrochina	Jabung	1.644	600
PT. Conoco Phillips *	Belanak	1.439	525
PT. Saka Indonesia	Ujung Pangkah	310	113
Sub Total			2.342
Kilang LPG Pola Hilir			
PT. Pertamina (Persero) *	P. Brandan	120	44
PT. Maruta Bumi Prima *	Langkat	46,57	17
PT. Medco LPG Kaji *	Kaji	200	73
PT. Pertamina (Persero)	Mundu	101	37
PT. Titis Sampurna	Prabumulih	200	73
PT. Sumber Daya Kelola *	Tugu Barat	19	7
PT. Bina Bangun Wibawa Mukti	Tambun	151	55
PT. Surya Esa Perkasa	Lembak	225	82
PT. Yudhistira Haka Perkasa *	Cilamaya	120	44
PT. Wahana Insannugraha	Cemara	102	37
PT. Media Karya Sentosa Phase I *	Gresik	160	58
PT. Tuban LPG Indonesia	Tuban	480	175
PT. Yudistira Energi	Pondok Tengah	160	58
PT. Media Karya Sentosa Phase II	Gresik	230	84
PT. Gasuma Federal Indonesia	Tuban	71	26
PT. Pertasamtan Gas	Sungaigerong	710	259
PT. Sumber Daya Kelola *	Losarang	11	3,8
PT. Arsynergy Resources	Gresik	300	109,5
Sub Total			1.242,3
Grand Total Kapasitas LPG			4.740,3

Keterangan : * tidak beroperasi

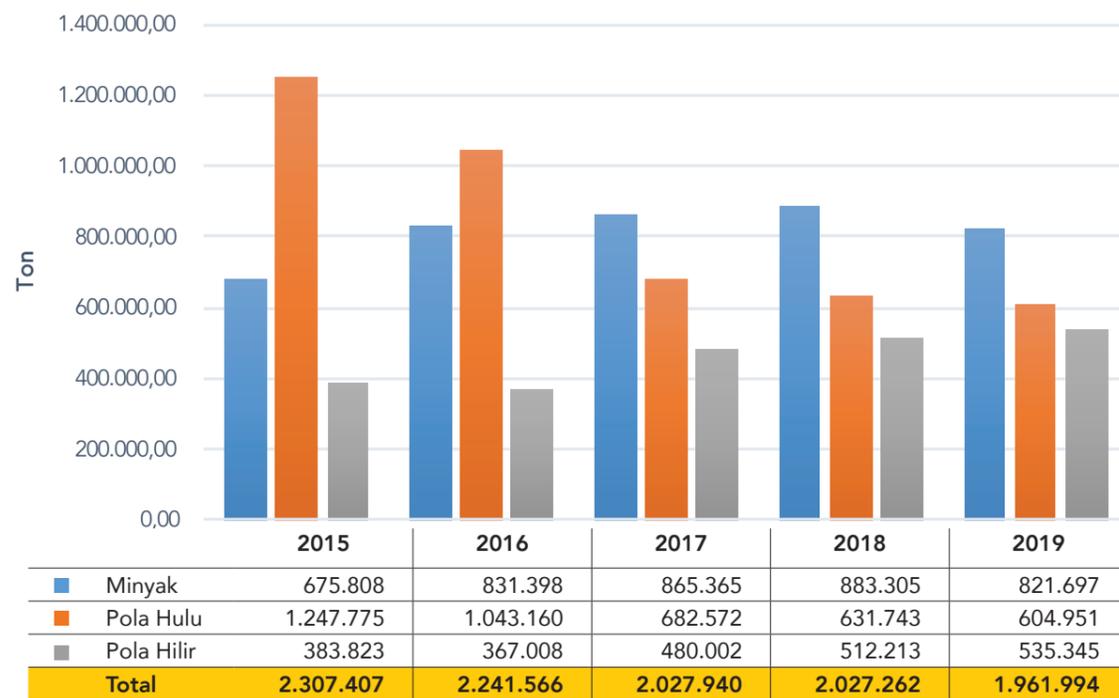
D. PRODUKSI KILANG PENGOLAHAN GAS BUMI

a. Produksi LPG

Pada tahun 2019, produksi LPG dalam negeri adalah sebesar 1,96 juta Ton (terdapat pengoreksian data oleh PT Pertamina (Persero) pada akhir tahun 2019). Penurunan produksi LPG tersebut disebabkan karena adanya *Turn Around* kilang RU IV Cilacap pada bulan

Oktober, *Turn Around* kilang RU V Balikpapan pada bulan Juni dan Juli, dan penurunan produksi kilang PT Petrochina (Jabung) dan kilang PT Saka Indonesia (Ujung Pangkah). Gambaran produksi LPG lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

GRAFIK PRODUKSI LPG 2015-2019

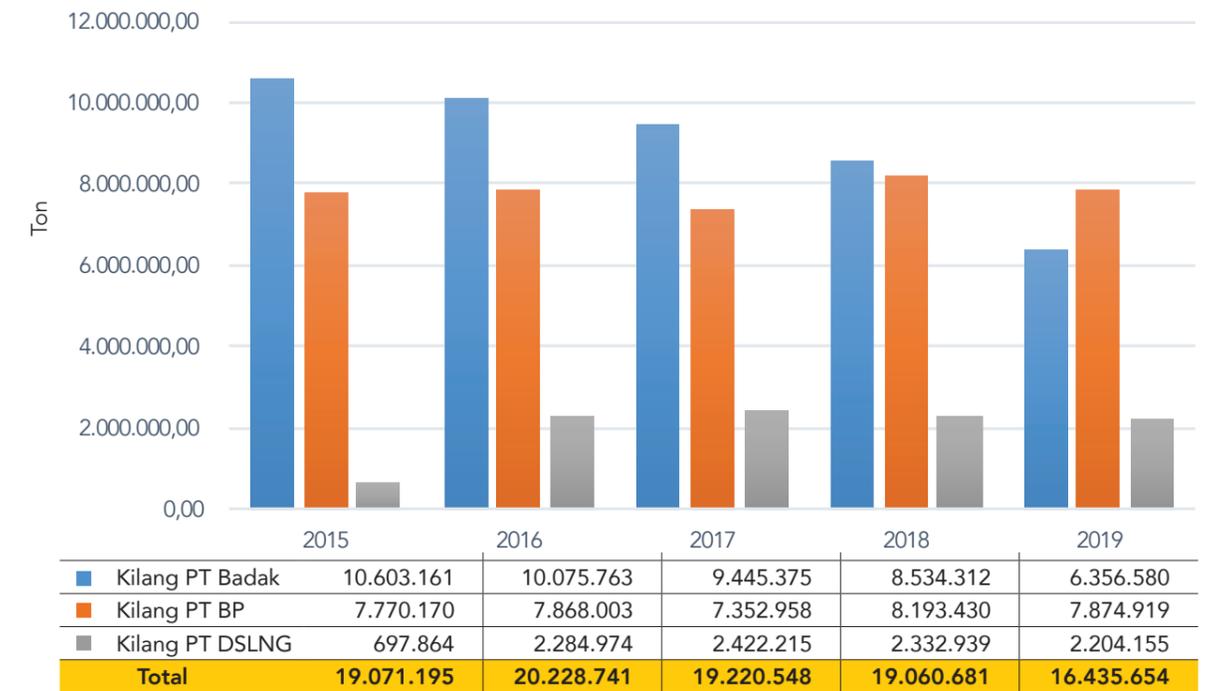


b. Produksi LNG

Pada tahun 2019, produksi LNG yang dihasilkan dari kilang LNG pola hulu dan kilang LNG pola hilir adalah sebesar 16,4 juta Ton. Penurunan produksi LNG yang paling signifikan disebabkan oleh penurunan produksi kilang PT Badak LNG (Bontang). Penurunan tersebut terjadi karena menurunnya *feed gas supply* dari Mahakam Gas Producers yang telah terjadi sejak tahun

2002 secara gradual. Sebagai informasi, saat ini kilang PT Badak LNG hanya mengoperasikan 2 (dua) *train* dari total 8 (delapan) *train* yang ada. Gambaran produksi LNG dari kilang PT Badak LNG (Bontang), kilang PT BP (Tangguh) dan kilang PT Donggi Senoro LNG dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

GRAFIK PRODUKSI LNG 2015-2019



Dari Grafik di atas dapat dilihat bahwa produksi LNG cenderung menurun selama lima tahun terakhir, kecuali pada tahun 2016 saat kilang PT Donggi Senoro LNG mulai beroperasi secara *full* kapasitas kilang.

Sama Kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk Menunjang Kegiatan Usaha Hulu, Kegiatan Usaha Hilir, Infrastruktur, dan Teknik Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.

E. PENGAWASAN MUTU BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) YANG BEREDAR DI DALAM NEGERI TAHUN 2019

Pada tahun 2019 juga telah dilakukan pengambilan sampel dalam rangka pengawasan mutu BBM dalam negeri berjumlah 264 sampel, dengan sebaran sampel di Provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali. Pengambilan sampel BBM dalam rangka pengawasan mutu BBM yang beredar di dalam negeri dilakukan di kilang PT Pertamina (Persero), terminal BBM (TBBM) PT Pertamina (Persero), dan SPBU baik SPBU PT Pertamina (Persero) maupun SPBU non-PT Pertamina (Persero).

Sampel BBM jenis Bensin dan Solar tersebut kemudian diuji di laboratorium PPPTMGB Lemigas sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Balitbang Kementerian ESDM dengan Direktorat Jenderal Migas tentang Kerja

Hasil dari kegiatan pengawasan mutu BBM tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Bensin 88 berjumlah 88 sampel dengan hasil pengujian semua sampel Bensin 88 telah memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Migas;
2. Bensin 90 berjumlah 88 sampel dengan hasil pengujian semua sampel Bensin 90 telah memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Migas;
3. Bensin 91 berjumlah 28 sampel dengan hasil pengujian semua sampel Bensin 91 telah memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Migas;
4. Bensin 95 berjumlah 16 sampel dengan hasil pengujian semua sampel Bensin 95 telah memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Migas;

5. Solar 48 sebanyak 28 sampel dengan hasil pengujian semua sampel Solar 48 telah memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Migas;
6. Solar 48 sebanyak 28 sampel dengan hasil pengujian semua sampel Solar 48 telah memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Migas.

Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa semua BBM hasil pengujian telah memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Migas. Namun demikian, masih perlu dilakukan peninjauan batasan kandungan FAME pada spesifikasi BBM jenis Solar 48 serta kajian/analisa lebih lanjut mengenai teknis pencampuran biodiesel ke dalam Solar 48 sehingga dapat memenuhi regulasi dengan baik.



Beberapa dokumentasi pengambilan sampel BBM dalam rangka pengawasan mutu BBM yang beredar di dalam negeri Tahun 2019

PENYIMPANAN MIGAS

Pembinaan kegiatan usaha penyimpanan Minyak dan Gas Bumi dilakukan dengan cara penerbitan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi. Dengan izin usaha tersebut, badan usaha pemegang izin usaha memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.

Adapun realisasi penerbitan Izin Usaha Penyimpanan Migas (baru) pada 2019 adalah sebagai berikut:

NO	JENIS KEGIATAN PENYIMPANAN	BADAN USAHA	JUMLAH
1	BBM	PT Rahardja Wirasakti Jaya Mandiri, PT Cosmic Petroleum Nusantara, Perum Perikanan Indonesia, PT Hokari Linex Pratama, PT Terminal Nilam Utara, PT Inti Lingga Sejahtera	6
2	LPG	PT Mitra Harun Gasindo, PT Trimulti Anugerah Abadi Jaya, PT Naumi Arumah Zoe, PT Era Gas Sentosa, PT Ghony Persada, PT Axis Pratama Indonesia, PT Erawan Multi Perkasa, PT Laris Berkah Ananda, PT Citra Mandiri Energi	9
3	LNG	-	-
4	CNG	PT Prima Layanan Nasional Enjiniring	1

Sehubungan masih terdapatnya kekurangan dokumen pada pengajuan Izin Usaha Penyimpanan LNG PT DPS Energi Sukses Pratama, maka pada tahun 2019 tidak ada izin yang diterbitkan.

Pada tahun 2019 juga terdapat penerbitan perpanjangan dan penyesuaian Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagai berikut:

NO	JENIS KEGIATAN PENYIMPANAN	BADAN USAHA	JUMLAH
Perpanjangan			
1	BBM	PT Jagad Energy, PT Orbit Terminal Merak, PT AKR Corporindo Tbk, PT Laban Raya Samodra, PT Jakarta Tank Terminal, PT Cakra Buanamas Utama, PT Petro Perkasa Indonesia	7
2	LPG	PT Mesindo Teknnesia, PT Mitra Gamma Energi, PT Bintang Prima Mandiri, PT Sarialam Dwitunggal Sejahtera, PT Linggajati Ekakarsa, PT Pesona Asia Sejahtera, PT Mitra Abadi Permai, PT Sentral Gas Asia, PT Gemilang Asia Sejahtera, PT. Maspion Energy Mitratama, PT Seha Gasindo	11
3	CNG	PT Dharma Pratama Sejati, PT Enviromate Teknologi International, PT Perta Daya Gas	3
Penyesuaian			
1	BBM	PT Astiku Sakti, PT Taruna Bina Sarana, PT Oiltanking Karimun, PT Pro Tank Terminal, PT Dover Chemical	5
2	LPG	PT Pertamina Patra Niaga, PT Tuah Berkah Morinda, PT Elnusa Petrofin, PT Patra Trading	4

Badan Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi yang baru tersebut memiliki lokasi yang tersebar di seluruh wilayah NKRI, sehingga diharapkan akan menunjang kemudahan pendistribusian bahan bakar ke seluruh wilayah NKRI dan dapat meningkatkan ketahanan energi nasional.

Penerbitan Izin Usaha baru maupun penyesuaian Izin Usaha (penambahan fasilitas) semakin menambah jumlah kapasitas penyimpanan BBM pada tahun 2019 yaitu sebesar 84.310 KL. Rinciannya adalah sebagai berikut:

NO	BADAN USAHA	JENIS	KAPASITAS (KL)	LOKASI	NILAI INVESTASI (USD)
1	PT Rahardja Wirasakti Jaya Mandiri	BBM	28.000	Bangka	5.658.068
2	Perum Perikanan Indonesia	BBM	910	Jakarta	-
3	PT Hokari Linex Pratama	BBM	3.000	Bangka	1.428.571
4	PT Terminal Nilam Utara	BBM	30.000	Surabaya	11.624.708
5	PT Inti Lingga Sejahtera	BBM	12.400	Cilegon	1.072.043
6	PT Petro Perkasa Indonesia	BBM	10.000	Kutai Kartanegara	2.500.000
Total			84.310		22.283.390

Penambahan kapasitas penyimpanan BBM tersebut meningkatkan keandalan pasokan dan distribusi BBM ke seluruh Indonesia, serta dapat mendukung peningkatan cadangan BBM Nasional.

Sedangkan realisasi penambahan kapasitas penyimpanan LPG tahun 2019 adalah 5.550 MTON, yang terdiri dari:

NO	NAMA BADAN USAHA	JENIS	LOKASI	KAPASITAS (MTON)	NILAI INVESTASI (USD)
1	PT Mitra Harun Gasindo	SPBE	Kab. Bogor	50	895.419
2	PT Trimulti Anugerah Abadi Jaya	SPBE	Cirebon	50	714.286
3	PT Pertamina Patra Niaga	Depot LPG	Lombok	3.000	15.851.929
4	PT Naumi Arumah Zoe	SPBE	Tuban	50	642.857
5	PT Era Gas Sentosa	SPBE	Wonosobo	50	625.000
6	PT Ghony Persada	SPBE	Brebes	50	807.143
7	PT Axis Pratama Indonesia	SPBE	Tanah Bumbu	50	732.857
8	PT Erawan Multi Perkasa	SPBE	Serang	50	785.714
9	PT Laris Berkah Ananda	SPBE	Kudus	50	714.290
10	PT Elnusa Petrofin	Depot LPG	Minahasa Selatan	2.000	17.411.352
11	PT Patra Trading	SPBE	Sumbawa	50	1.074.007
12	PT Citra Mandiri Energi	SPBE	Kab. Banjar	50	507.679
Total				5.550	40.762.533

Sementara itu, penambahan kapasitas penyimpanan CNG pada tahun 2019 adalah sebesar 334 ribu m³ yang terdiri dari:

1. fasilitas penyimpanan CNG PT Prima Layanan Nasional Enjiniring berkapasitas 206,7 ribu m³ yang berlokasi di Barito Utara dengan nilai investasi USD 19.213.342, dan

2. fasilitas penyimpanan CNG PT Dharma Pratama Sejati berkapasitas 127,2 ribu m³ yang berlokasi di Gresik dengan nilai investasi USD 18.480.642.

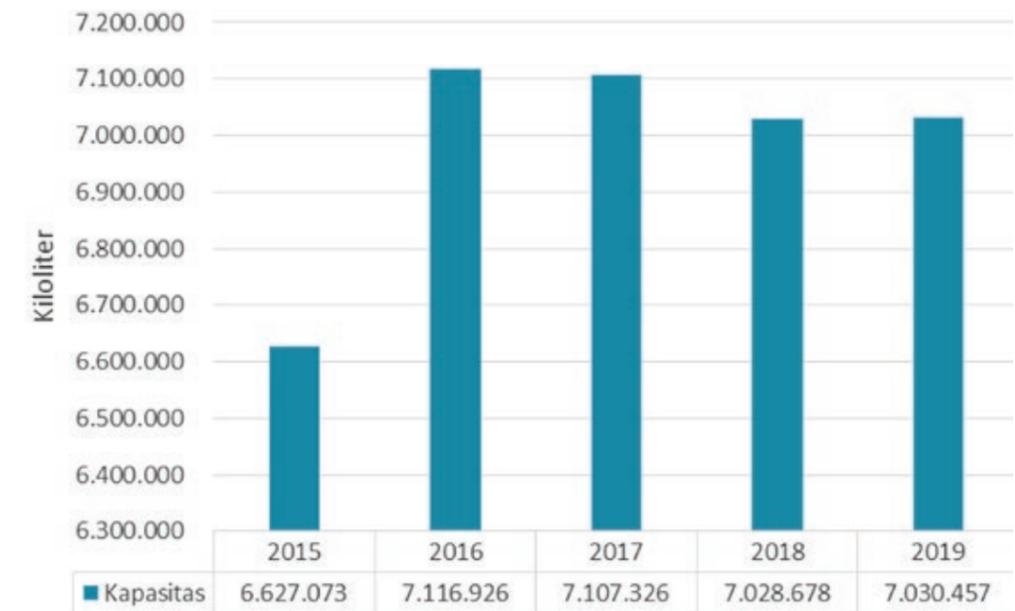
Dengan adanya fasilitas penyimpanan CNG tersebut yang digunakan sebagai *peaker* pada pembangkit

listrik, khususnya pada wilayah pelosok, maka dapat meningkatkan penggunaan gas bumi dalam negeri.

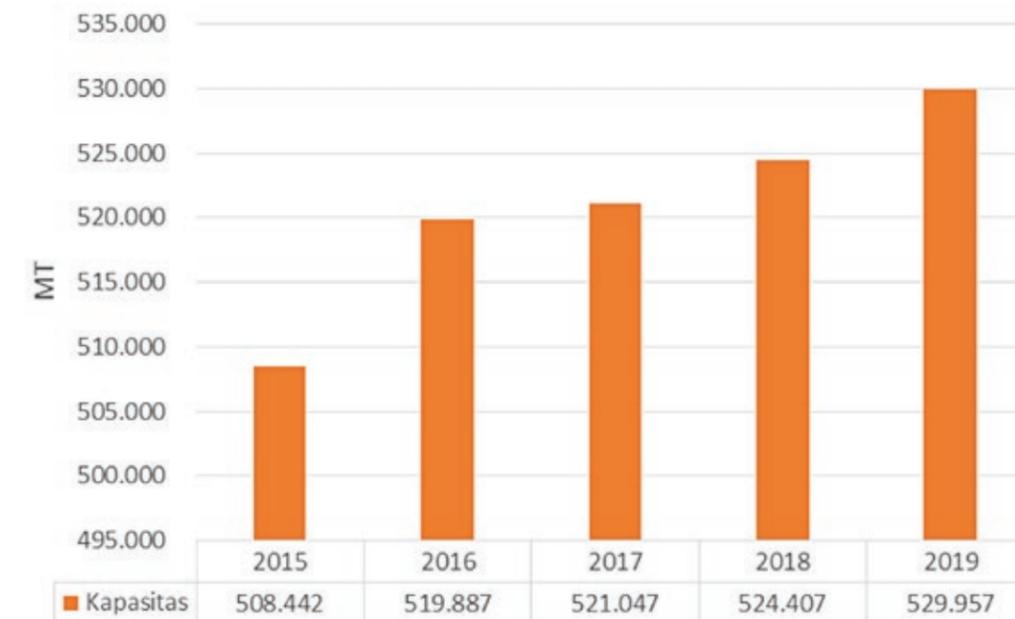
Sedangkan untuk penambahan kapasitas penyimpanan LNG pada tahun 2019 tidak dapat terealisasi karena

pada tahun 2019 tidak ada penerbitan Izin Usaha Penyimpanan LNG baru maupun penambahan fasilitas pada Badan Usaha eksisting.

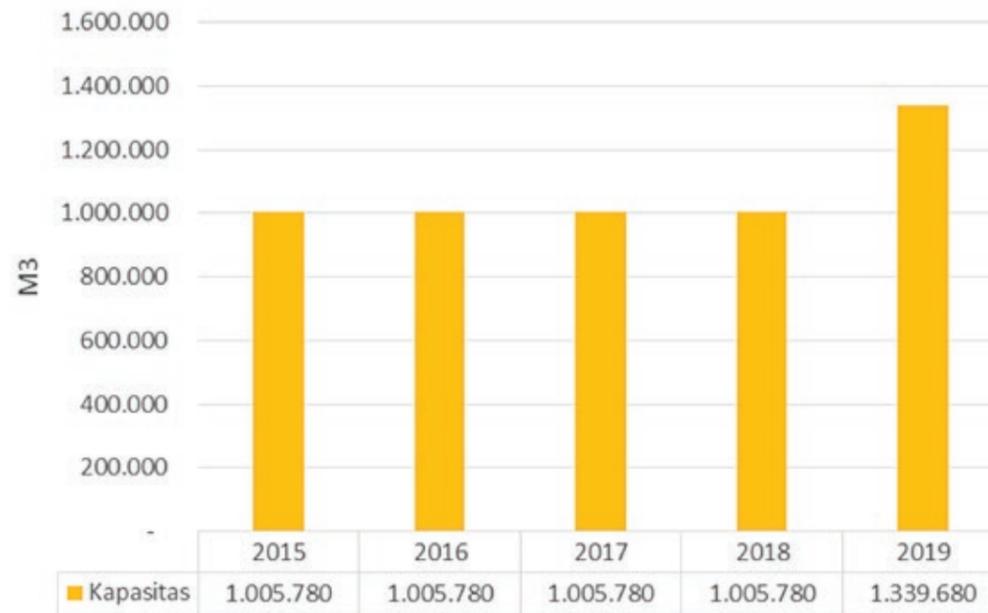
GRAFIK KAPASITAS PENYIMPANAN BBM 2015 – 2019



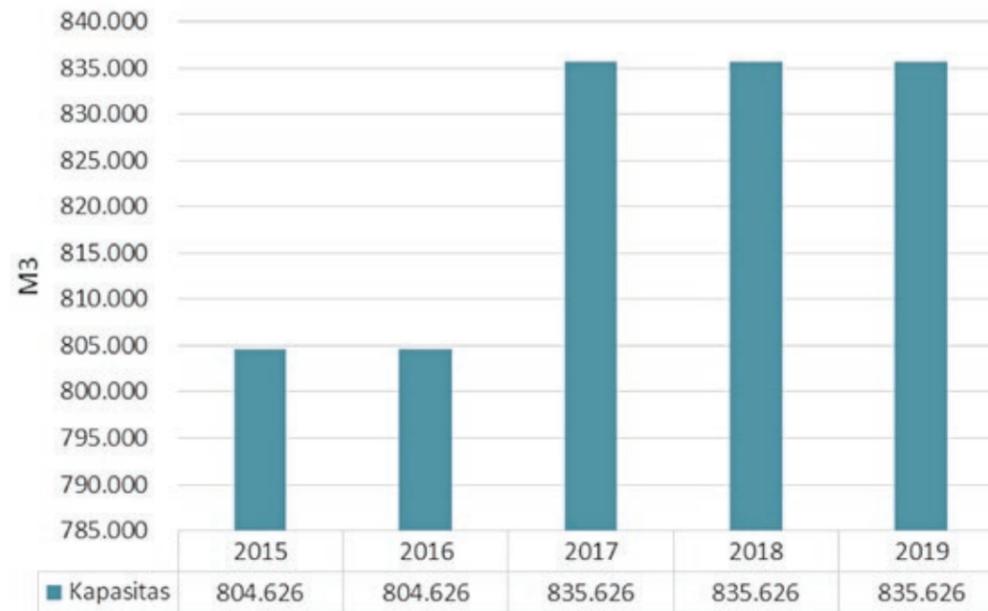
GRAFIK KAPASITAS PENYIMPANAN LPG 2014 – 2019



GRAFIK KAPASITAS PENYIMPANAN CNG 2015 – 2019



GRAFIK KAPASITAS PENYIMPANAN LNG 2015 – 2019



PENGANGKUTAN MIGAS

Kegiatan pengangkutan minyak dan gas bumi saat ini selain mempergunakan berbagai macam moda transportasi yang umum seperti truk tangki, kapal laut, gerbong kereta, pipa, juga telah mempergunakan pesawat terbang seperti yang dipergunakan untuk mengangkut BBM di daerah-daerah Indonesia Bagian Timur.

Kegiatan Usaha Pengangkutan Migas merupakan salah satu kegiatan yang sangat vital dalam pendistribusian minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya, dan tidak terlepas dari berbagai permasalahan-permasalahan seperti pencurian, kecelakaan ataupun penyalahgunaan Izin Usaha. Terkait hal tersebut maka dituntut peran serta dari pemerintah dan para *stakeholder*.

Peran Direktorat Jenderal Migas pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Migas antara lain:

1. **Evaluasi dalam Rangka Mendukung Penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas;**
Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan Izin Usaha Pengangkutan Migas agar lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan investasi di bidang hilir migas. Dengan adanya Peraturan MESDM No. 29/2017 tingkat layanan/SLA (*Service Level Agreement*) memiliki jangka waktu maksimal 10-15 hari kerja dengan persyaratan lengkap dan benar.
2. **Koordinasi dalam rangka Evaluasi Kebijakan Pemanfaatan Bersama Sarana Pengangkutan Gas**

Bumi Melalui Pipa (*Open Access*) dan Pipa untuk Kepentingan Sendiri;

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka mengumpulkan data dan informasi, dan untuk penyamaan persepsi tentang pemanfaatan bersama sarana dan fasilitas pipa tersebut di atas.

3. Pengawasan dan Evaluasi Pelaporan Badan Usaha Pengangkutan Migas

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 36/2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, Badan Usaha Pengangkutan Migas memiliki kewajiban pelaporan 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan tembusan kepada Badan Pengatur. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan pengangkutan migas dan untuk memudahkan Pemerintah dalam melakukan pemantauan pendistribusian migas.

4. Sosialisasi Pengangkutan Migas

Sepanjang tahun 2019 telah dilaksanakan total 7 (tujuh) kali asistensi terkait pelaporan pengangkutan kegiatan usaha di (tujuh) kota yaitu di Bandung, Cirebon, Surabaya, Bogor, Pondok Ranji (Tangerang), Serpong (Tangerang) dan Cilegon. Pada acara tersebut diberikan asistensi terhadap Badan Usaha baik Gas maupun BBM terkait pelaporan kegiatan usaha secara *online* di aplikasi perizinanmigas.esdm.go.id.



A. SARANA DAN FASILITAS PENGANGKUTAN MIGAS

1. Kapasitas Pengangkutan Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan

Kapasitas pengangkutan BBM dan Hasil Olahan berdasarkan Izin Usaha Pengangkutan Migas, pada

tahun 2019 adalah sebesar 19.878 Kiloliter. Realisasi penyediaan tambahan fasilitas pengangkutan Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan pada tahun 2019 yaitu:

TABEL PENERBITAN IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK BUMI, BBM, HASIL OLAHAN 2019

NO	BADAN USAHA	JENIS IZIN	JENIS KOMODITAS	LOKASI
1	PT Duta Mahakam Sejati	Izin Baru	BBM	Samarinda
2	PT Arvindo Tech Lestari	Izin Baru	BBM	Lampung
3	PT Bumi Lintas Tama	Izin Baru	BBM	Perairan Indonesia
4	PT Pelayaran Selat Karimun	Izin Baru	BBM	Perairan Indonesia
5	PT Lintas Banua Sanggam	Izin Baru	BBM	Berau
6	PT Rafi Jaya Petroleum	Izin Baru	BBM	Kalimantan Selatan
7	PT Surya Mitra Tirta Kencana	Izin Baru	BBM	Jawa Timur
8	PT Toga Bagi Karwita	Izin Baru	BBM	Jambi
9	PT Petrofindo Niaga Sukses	Izin Baru	BBM	Kalimantan Timur
10	PT Bahtera Nusantara Internasional	Izin Baru	Minyak Bumi, BBM	Perairan Indonesia
11	PT Dewi Mahkota Energi	Izin Baru	BBM	Jawa Timur
12	PT Warnaprima Kimiatama	Izin Baru	Hasil Olahan	Banten
13	PT Berkarya Mubin Nandini	Izin Baru	BBM	Kalimantan Timur
14	PT Ododos	Izin Baru	BBM	Papua
15	PT Sukses Abadi Petrokimia	Izin Baru	Hasil Olahan	DKI Jakarta
16	PT Syncrum Logistics	Izin Baru	BBM	DKI Jakarta
17	PT Wijaya Sakti Abadi	Izin Baru	BBM	DI Yogyakarta
18	PT Adin Cahaya Semesta	Izin Baru	BBM	Jawa Tengah
19	PT Bumi Teduh Bersinar	Izin Baru	BBM	Jawa Timur
20	PT Sarana Inti Sinergi	Izin Baru	BBM	Kalimantan Timur
21	PT Bintang Sembilan Papua	Izin Baru	BBM	Papua, Perairan Indonesia
22	PT Ficaje Migas	Izin Baru	BBM	Maluku
23	PT Bumi Anoa Energi	Izin Baru	BBM	Sulawesi Tenggara
24	PT Daya Energi Sentosa	Izin Baru	BBM	Tangerang
25	PT Rakha Panca Mandiri	Izin Baru	BBM	Bojonegoro
26	PT Armada Maritim Offshore	Izin Baru	Minyak Bumi, BBM	Perairan Indonesia
27	PT Kalbu Mandiri Niaga	Izin Baru	BBM	Sulawesi Tengah
28	PT Rajawali Barito	Izin Baru	BBM	Kalimantan Selatan

NO	BADAN USAHA	JENIS IZIN	JENIS KOMODITAS	LOKASI
29	PT Putra Utama Line	Izin Baru	Minyak Bumi, BBM	Perairan Indonesia
30	PT Selaras Pratama Utama	Izin Baru	Minyak Bumi, BBM	Perairan Indonesia
31	PT Bogor Agung Perkasa	Izin Baru	BBM	Jawa Barat
32	PT Krisfo Jaya Makmur	Izin Baru	BBM	Sulawesi Utara
33	PT Asyan Gotawa	Izin Baru	BBM	Perairan Indonesia
34	PT Bondang Berkat Mandiri	Izin Baru	BBM	Kalimantan Selatan
35	PT Sarana Bahagia	Izin Baru	BBM	Perairan Indonesia
36	PT Rimba Digoel Energi	Izin Baru	BBM	Papua
37	PT Lintas Armada Indonesia	Izin Baru	BBM	Perairan Indonesia
38	PT Putra Senayan Perkasa	Izin Baru	BBM	Kalimantan Timur
39	PT Chandra Cahaya Lestari	Izin Baru	BBM	Kepulauan Babel
40	PT Wahyu Putra Samudra	Izin Baru	BBM	Jawa Tengah
41	PT Quadra Samudra Perkasa	Izin Baru	BBM	Perairan Indonesia
41	PT Justin Bintang Samudera Mandiri	Izin Baru	BBM	Kalimantan Timur
42	PT Abdiandra Karya Sejahtera	Izin Baru	BBM, Hasil Olahan	Sulawesi Tenggara
43	PT Patra Darma Wijaya Bandung	Izin Baru	BBM	Jawa Barat
44	PT Rama Jaya Putra Khatulistiwa	Izin Baru	BBM	Kalimantan Barat
45	PT Asih Tunggal Jati	Izin Baru	BBM	Papua Barat
46	PT Pelayaran Rona Fortuna	Izin Baru	BBM	Kalimantan Timur, Perairan Indonesia
47	PT Sari Ulfa Mutia	Izin Baru	BBM	Maluku
48	PT Golden Bucket	Izin Baru	BBM	Papua
49	PT Putra Banten Sejahtera	Izin Baru	BBM	DKI Jakarta
50	PT Citra Nuansa Sinergi	Izin Baru	BBM	Banten
51	PT Harindo Putra Jaya	Izin Baru	Minyak Bumi, Hasil Olahan	DKI Jakarta
52	PT Citra Pelita Agung	Izin Baru	BBM	Sumatera Utara
53	PT Era Salvindo	Izin Baru	BBM	Perairan Indonesia
54	PT Lintas Maritim Indonesia	Izin Baru	BBM	Perairan Indonesia
55	PT Jiham Lestari	Izin Baru	BBM	Sulawesi Tenggara
56	PT Putra Limbah Khatulistiwa	Izin Baru	BBM	Kalimantan Barat
57	PT Hikam	Izin Baru	BBM	Perairan Indonesia
58	PT Indonesia Energi Oil	Izin Baru	BBM	Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara
59	PT Enam Sembilan Perkasa	Izin Baru	BBM	Sulawesi Tenggara
60	PT Papua Maju Mandiri	Izin Baru	BBM	Papua, Perairan Indonesia

NO	BADAN USAHA	JENIS IZIN	JENIS KOMODITAS	LOKASI
61	PT Arnov Energi	Izin Baru	BBM	Bengkulu
62	PT Ratu Muaro Tambesi	Izin Baru	BBM	Jambi
63	PT Willy Dwi Perkasa	Izin Baru	BBM	Sumatera Utara
64	PT Mammiri Line	Izin Baru	BBM	Perairan Indonesia
65	PT Empat Saudara Duta Maritim	Izin Baru	BBM	Perairan Indonesia
66	PT Sinar Surya Maju Sentosa	Izin Baru	BBM	Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali
67	PT Bintang Pulau Segara	Izin Baru	BBM	Kalimantan Selatan
68	PT Janoko	Izin Baru	BBM	Perairan Indonesia
69	PT Maros Indah Jaya	Izin Baru	BBM	Papua Barat, Perairan Indonesia
70	PT Andalas Borneo Indonesia	Izin Baru	BBM	Sumatera Barat
71	PT Danendra Samudra Niaga	Izin Baru	BBM	Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta
72	PT Tasa Pembangunan Nusantara	Izin Baru	BBM	Lampung, Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta
73	PT To Tus Tus Papua	Izin Baru	BBM	Papua
74	PT Wira Cipta Perkasa	Izin Baru	Minyak Bumi	Riau
75	PT Indomobil Prima Energi	Izin Baru	Minyak Bumi, BBM, Hasil Olahan	Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
76	PT Hokari Linex Pratama	Izin Baru	BBM	Banten
77	PT Indimatam Lines	Izin Baru	BBM	Perairan Indonesia
78	PT Ramzi Dika Putra	Izin Baru	BBM	Jambi
79	PT Anugerah Restu Bumi	Izin Baru	BBM	Sumatera Utara
80	PT Pelangi Bintang Energi	Izin Baru	BBM	Jawa Barat
81	PT Rama Putra Perkasa	Izin Baru	BBM	Kepulauan Riau
82	PT Kartika Luwuk Abadi	Izin Baru	BBM	Sulawesi Tengah
83	PT Aliran Maju Bersama Sultra	Izin Baru	BBM	Sulawesi Tenggara
84	PT Cahaya Putra Energi	Izin Baru	BBM	Jawa Barat
85	PT Petro Putra Rajawali	Izin Baru	BBM	Kalimantan Selatan
86	PT Jaladri Mas Mulya	Izin Baru	BBM	Riau
87	PT Taruli Transportasi Jaya Abadi	Izin Baru	Minyak Bumi, BBM, Hasil Olahan	Banten Jabar DKI Banten
88	PT Winirken Osborn Versuf	Izin Baru	BBM	Sulawesi Tenggara

NO	BADAN USAHA	JENIS IZIN	JENIS KOMODITAS	LOKASI
89	PT Sahassa Prima Niaga	Izin Baru	BBM	DKI Jakarta
90	PT Musdalifa Karya Mandiri	Izin Baru	BBM	Maluku Utara
91	PT Pelayaran Nasional Jaticatur Niagatrans	Izin Baru	BBM, Hasil Olahan	Perairan Indonesia
92	PT Pasar Pagi Sumber Rejeki	Izin Baru	BBM	Jawa Barat
93	PT Borneo Mitra Bersama Sejati	Izin Baru	BBM	Kalimantan Tengah
94	PT Tunes Jang Jayo	Izin Baru	BBM	Jawa Tengah
95	PT Argcio Jaya Abadi	Izin Baru	BBM	Riau
96	PT Yuza Bina Mandiri	Izin Baru	BBM	Sumatera Barat
97	PT Dharma Niaga Citra	Izin Baru	BBM	Jawa Tengah
98	PT Sura Raya Inti	Izin Baru	BBM	Jawa Timur
99	PT Bumi Bagun Damai	Izin Baru	BBM	Kalimantan Timur
100	PT Batang Hari Sembilan	Izin Baru	BBM	Jambi
101	PT Empat Lima Sejahtera	Izin Baru	BBM	Tangerang
102	PT Putra Sajjaan Mandiri	Izin Baru	BBM	Kalimantan Selatan
103	PT Surya Bahari Perkasa	Izin Baru	BBM	Tangerang
104	PT Adhi Bhakti Setya	Izin Baru	BBM	Cirebon
105	PT Aiko Tunggal Mandiri	Izin Baru	BBM	Makassar
106	PT Cakra Balakosa Nusantara	Izin Baru	BBM	Bali
107	PT Angkasa Tunggal Selaras Nugratama	Izin Baru	BBM	DKI Jakarta
108	PT Wisan Petro Energi	Izin Baru	BBM	Sulawesi Selatan
109	PT Patra Komoditi Solarindo	Izin Baru	BBM	Balikpapan
110	PT Darmawan Reski Mandiri	Izin Baru	BBM	Kendari
111	PT Rizki Artha Sejahtera	Izin Baru	BBM	Tegal
112	PT Jaya Energi Prima	Izin Baru	BBM	Jakarta
113	PT Mitra Maritim Mandiri	Izin Baru	BBM	Perairan Indonesia
114	PT Pelayaran Jeremy	Izin Baru	BBM	Perairan Indonesia
115	PT Kembar Jaya Rimo Makmur	Izin Baru	BBM	Kalimantan Selatan
116	PT Presol Indo Prima	Izin Baru	BBM	Palembang
117	PT Kurdi Gayu Energi	Izin Baru	BBM	Kalimantan Selatan
118	PT Kelana Niaga Energi	Izin Baru	BBM	Jatinangor
119	PT Sinyun Karya Anugrah	Izin Baru	BBM	Sorong
120	PT Cahaya Soppeng	Izin Baru	BBM	Perairan Indonesia
121	PT Banyu Langit Jaya Energi	Izin Baru	BBM	DI Yogyakarta
122	PT Dua Putri maginti	Izin Baru	BBM	Perairan Indoensia

2. Kapasitas dan Fasilitas Pengangkutan Minyak Bumi & BBM Melalui Pipa

Kapasitas Pengangkutan Minyak Bumi & BBM Melalui Pipa berdasarkan Izin Usaha Pengangkutan Migas pada tahun 2019 tidak terdapat kenaikan kapasitas dan fasilitas dikarenakan tidak ada penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas Bumi & BBM Melalui Pipa di tahun 2019.

3. Kapasitas dan Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Kapasitas pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa berdasarkan Izin Usaha Pengangkutan Migas pada tahun 2019 adalah sebesar 20 MMSCFD, yaitu fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa ruas Metering Station Wunut – Ngoro Industrial Park Provinsi Jawa Timur.

TABEL PENERBITAN IZIN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA 2019

NO	NAMA BADAN USAHA	JENIS IZIN	JENIS KOMODITAS	PANJANG	LOKASI/ RUAS	KAPASITAS MMSCFD
1	PT Dharma Pratama Sejati	Izin Baru	Gas Bumi	18 km	Metering Station Wunut – Ngoro Industrial Park Provinsi Jawa Timur	20
2	PT Pertamina Gas	Penyesuaian	Gas Bumi	67 km	Duri – Dumai	268

4. Kapasitas dan Fasilitas Pengangkutan LPG termasuk dengan Fasilitas Bottling Plant

Kapasitas Pengangkutan LPG termasuk dengan Fasilitas Bottling Plant berdasarkan Izin Usaha Pengangkutan Migas pada tahun 2019 adalah sebesar 3.683 MT, yang berasal dari penambahan fasilitas oleh badan usaha yang mengajukan izin usaha baru dan penambahan atas fasilitas yang sudah ada dari badan usaha yang telah memiliki Izin Usaha Pengangkutan Migas sebelumnya. Total

penambahan kapasitas Pengangkutan LPG dengan Fasilitas Bottling Plant baru pada tahun 2019 adalah 2.120 MT. Sejak tahun 2014 hingga 2019, kapasitas infrastruktur pengangkutan LPG dengan Fasilitas Bottling Plant terus meningkat. Hal ini dikarenakan kebutuhan LPG 3 kg untuk masyarakat terus meningkat dan banyaknya SPPBE yang sudah berdiri tapi belum memiliki izin usaha pengangkutan migas diwajibkan untuk segera mengurus izin agar memiliki Izin Usaha Pengangkutan Migas.

TABEL PENERBITAN IZIN USAHA PENGANGKUTAN LPG DENGAN FASILITAS BOTTLING PLANT 2019

NO	BADAN USAHA	JENIS IZIN	JENIS KOMODITAS	LOKASI
1	PT Permata Indah Dewata	Izin Baru	LPG	Nusa Tenggara Barat
2	PT Puspa Damayanti	Izin Baru	LPG	Jawa Barat
3	PT Sendang Mulyo	Izin Baru	LPG	Jawa Tengah
4	PT Prapen Artha Dewata	Izin Baru	LPG	Bali
5	PT Antares Jaya Sakti	Izin Baru	LPG	Jawa Timur
6	PT Energi Berkat Cemerlang	Izin Baru	LPG	Jawa Barat
7	PT Raja Gas	Izin Baru	LPG	Jawa Barat
8	PT Allasandra Guna Energi	Izin Baru	LPG	Jawa Barat
9	PT Dima Indraya	Izin Baru	LPG	Kepulauan Riau
10	PT Delta Gasindo Sejahtera	Izin Baru	LPG	Sulawesi Utara
11	PT Multi Indah Perdana	Izin Baru	LPG	Aceh

NO	BADAN USAHA	JENIS IZIN	JENIS KOMODITAS	LOKASI
12	PT Usaha Gas Mandiri	Izin Baru	LPG	Banten
13	PT Alfa Karya Sinergi	Izin Baru	LPG	Jawa Barat
14	PT Atena Bangun Mandiri	Izin Baru	LPG	Banten
15	PT Pesona Dwi Indah Lestari	Izin Baru	LPG	Kalimantan Tengah
16	PT Asgaraya Abadi Gas	Izin Baru	LPG	Jawa Barat
17	PT Sekawan Mitra Kalindo	Izin Baru	LPG	Banten
18	PT Dharma Cahaya Mulia	Izin Baru	LPG	Sumatera Barat
19	PT Manggala Puri Sakti	Izin Baru	LPG	Jawa Tengah
20	PT Nugraha Satya Sakti	Izin Baru	LPG	Jawa Tengah
21	PT Gasmino Utama	Izin Baru	LPG	Sulawesi Utara
22	PT Summitama Suryanusa	Izin Baru	LPG	Jawa Timur
23	PT Atira Multi Prima Sejati	Izin Baru	LPG	Kalimantan Tengah
24	PT Adi Sejahtera	Izin Baru	LPG	Lampung
25	PT Jobroindo Makmur	Izin Baru	LPG	Gorontalo
26	PT Arthajaya Gasindo	Izin Baru	LPG	Banten
27	PT Arthajaya Gas	Izin Baru	LPG	Banten
28	PT Dharma Tech Infomedia	Izin Baru	LPG	Jawa Timur
29	PT Zakaria Adi Karya	Izin Baru	LPG	Jawa Barat
30	PT Mega Hulu Energi	Izin Baru	LPG	Jawa Timur
31	PT Global Bitumen Utama	Izin Baru	LPG	Jawa Barat
32	PT Tenri Putri Samudra	Izin Baru	LPG	Perairan Indonesia
33	PT Samoedra Jaya Giri Nusa	Izin Baru	LPG	Perairan Indonesia

5. Kapasitas dan Fasilitas Pengangkutan CNG

Pada tahun 2019, hanya terdapat 1 penerbitan Izin Usaha Pengangkutan CNG. Dari penerbitan

izin tersebut, terdapat penambahan kapasitas pengangkutan CNG sebesar 5.920 m³.

TABEL PENERBITAN IZIN USAHA PENGANGKUTAN CNG 2019

NO	BADAN USAHA	JENIS IZIN	JENIS KOMODITAS	LOKASI
1	PT Wira Ragna Cipta	Izin Baru	CNG	Jawa Tengah, Jawa Timur

6. Kapasitas dan Fasilitas Pengangkutan LNG

Sementara itu, total penambahan kapasitas

pengangkutan LNG baru pada tahun 2019 adalah 18.565,11 m³, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL PENERBITAN IZIN USAHA PENGANGKUTAN LNG 2019

NO	BADAN USAHA	JENIS IZIN	JENIS KOMODITAS	LOKASI
1	PT Risco Solusi Indonesia	Izin Baru	LNG	Kalimantan Timur
2	PT Lintas Samudra Sejahtera	Izin Baru	LNG	Perairan Indonesia

HARGA BBM

A. HARGA JENIS BBM

Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian dan harga jual Eceran bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM yang telah diubah sebanyak enam kali terakhir melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2018, mengatur:

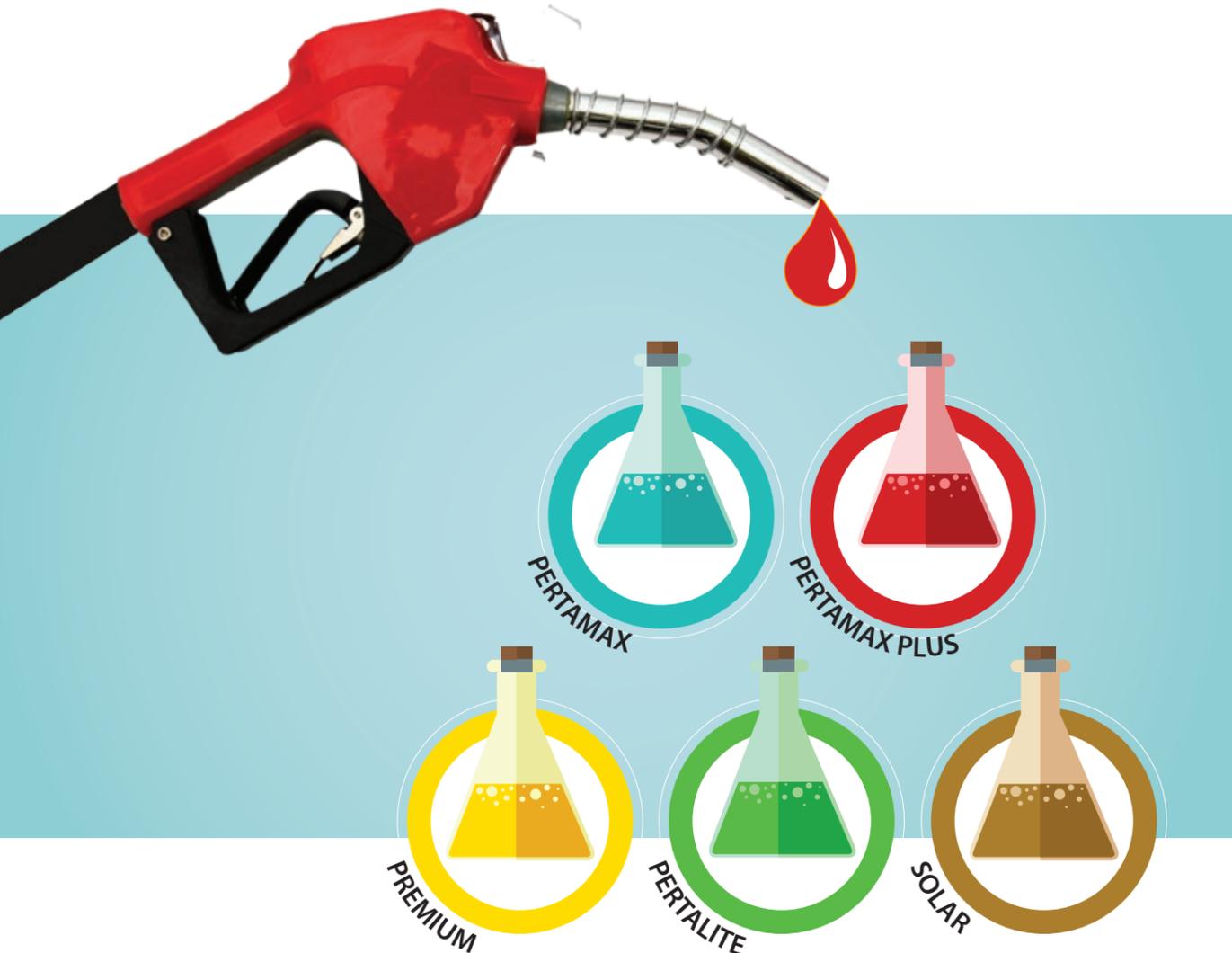
1. Jenis BBM:

- Jenis BBM Tertentu (JBT): Harga ditetapkan Pemerintah dan diberikan subsidi (Minyak Tanah dan Minyak Solar).

- BBM Khusus Penugasan (JBKP) : Harga ditetapkan Pemerintah, diberikan biaya tambahan pendistribusian 2% (Bensin Premium).
- BBM Umum: Harga diatur dengan marjin minimal 5% dan maksimum 10%.

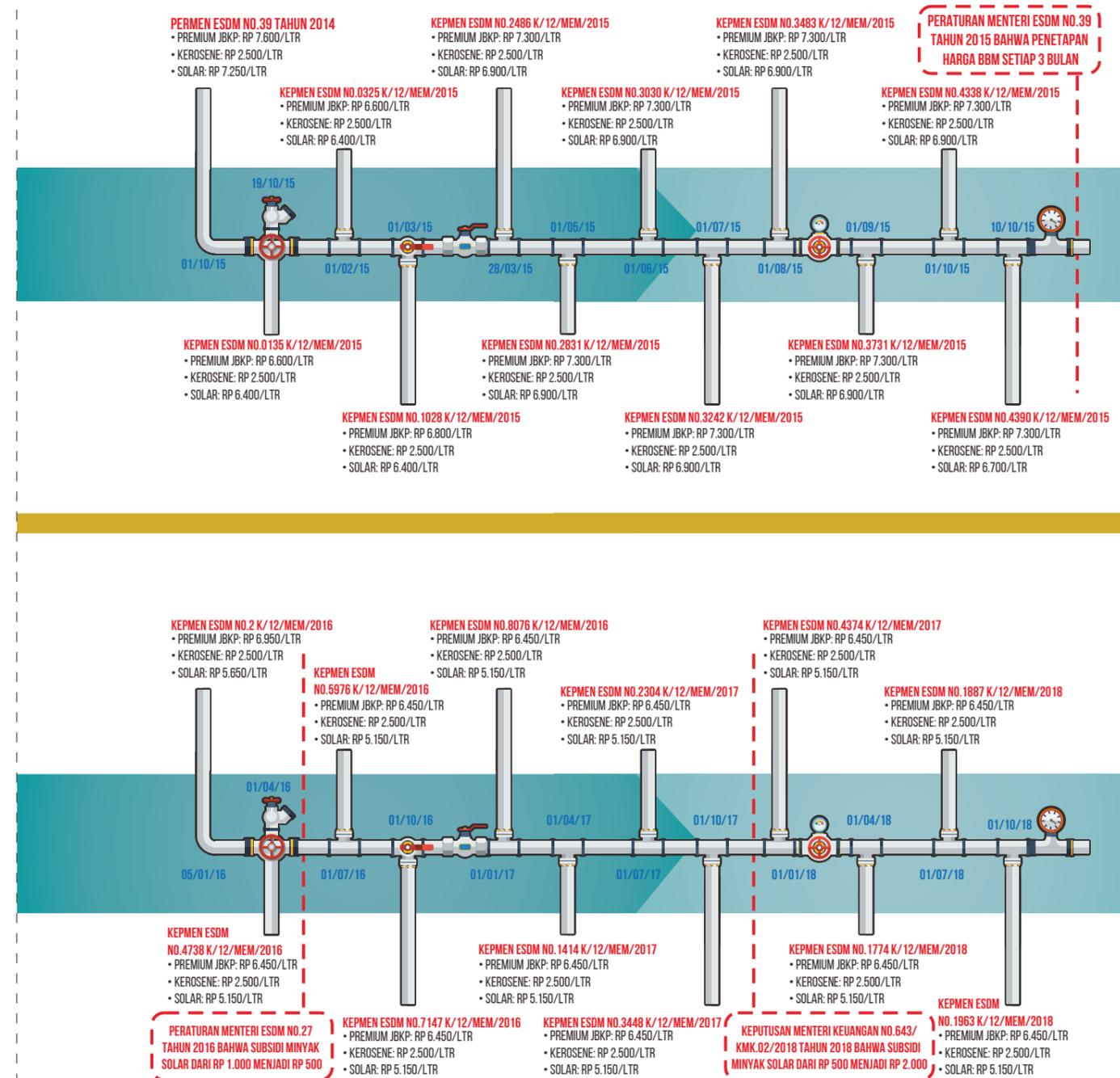
2. Waktu penetapan harga JBT dan JBKP dapat dilakukan setiap 3 bulan atau apabila dianggap perlu lebih dari satu kali, dengan memperhitungkan perkembangan harga minyak, kurs dan sektor riil.

Peran Direktorat Jenderal Migas dalam hal kebijakan harga BBM di antaranya adalah perumusan formulasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM), perhitungan harga BBM dan subsidi bahan bakar.



B. HARGA JENIS BBM TERTENTU

KRONOLOGIS KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BBM (Setelah Peraturan Presiden 191 Tahun 2014)

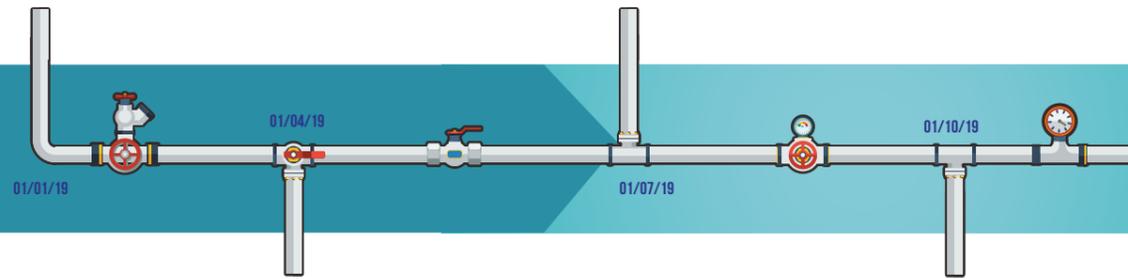


KEPMEN ESDM NO.2071 K/12/MEM/2018

- PREMIUM JBKP: RP 6.450/LTR
- KEROSENE: RP 2.500/LTR
- SOLAR: RP 5.650/LTR

KEPMEN ESDM NO.115 K/12/MEM/2019

- PREMIUM JBKP: RP 6.450/LTR
- KEROSENE: RP 2.500/LTR
- SOLAR: RP 5.150/LTR



KEPMEN ESDM NO.56 K/12/MEM/2019

- PREMIUM JBKP: RP 6.450/LTR
- KEROSENE: RP 2.500/LTR
- SOLAR: RP 5.150/LTR

KEPMEN ESDM NO.176 K/12/MEM/2019

- PREMIUM JBKP: RP 6.450/LTR
- KEROSENE: RP 2.500/LTR
- SOLAR: RP 5.150/LTR

Kebijakan harga BBM hingga tahun 2019 secara garis besar adalah sebagai berikut:

- Bensin RON 88 tidak termasuk Jenis BBM Tertentu. Sejak tahun 2015, Bensin RON 88 tidak lagi menjadi komoditas yang disubsidi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014, Bensin RON 88 ditetapkan sebagai Bahan Bakar Khusus Penugasan. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1851 K/15/MEM/2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali, menetapkan provinsi-provinsi tersebut sebagai

wilayah penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan.

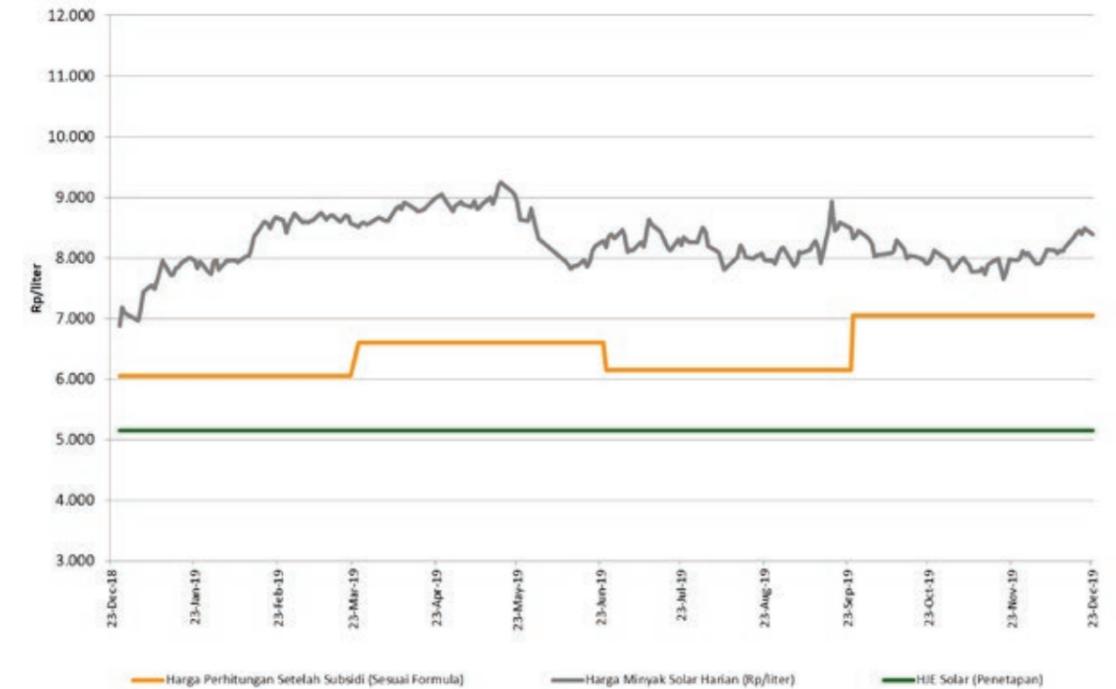
- Minyak Solar dengan subsidi tetap Rp 2.000/liter berlaku mulai 1 Januari 2018.
- Minyak Tanah masih disubsidi dengan harga jual tetap Rp 2.500/liter.
- Harga jual BBM ditetapkan dengan periode 3 bulanan atau dapat ditetapkan lebih dari 1 kali dalam masa 3 bulan (berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2015). Sejak 1 April 2016, harga jual BBM JBT Minyak Solar dan JBKP Premium tidak berubah.

Berikut perkembangan harga bensin RON 88 dan Minyak Solar selama tahun 2019.

GRAFIK PERKEMBANGAN HARGA JUAL ECERAN PREMIUM TAHUN 2019



GRAFIK PERKEMBANGAN HARGA JUAL ECERAN MINYAK SOLAR TAHUN 2019



Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Direktorat Jenderal Migas telah menetapkan Harga Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dengan formula sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 62 K/10/MEM/2019 tanggal 2 April 2019 perihal Formula Harga

Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018, yaitu:

- Minyak Solar (Gas Oil)
95%HIP Minyak Solar + Rp 802/liter
- Bensin (Gasoline) RON 88
96,46%HIP Bensin RON 88 + Rp 821/liter

Keterangan:
HIP = Harga Indeks Pasar

C. HARGA JENIS BBM UMUM

Untuk menjaga kestabilan harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Umum dan sesuai Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi bahwa Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah, maka Menteri ESDM menetapkan Formula Harga Dasar

Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum sebagai acuan Badan Usaha dalam menetapkan Harga Jual Eceran BBM Umum.

1. Formula Harga Jual Eceran BBM Jenis Umum Minyak Solar dan Minyak Bensin yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

(Bensin RON 89, RON 90, RON 92 & M Solar CN 48)

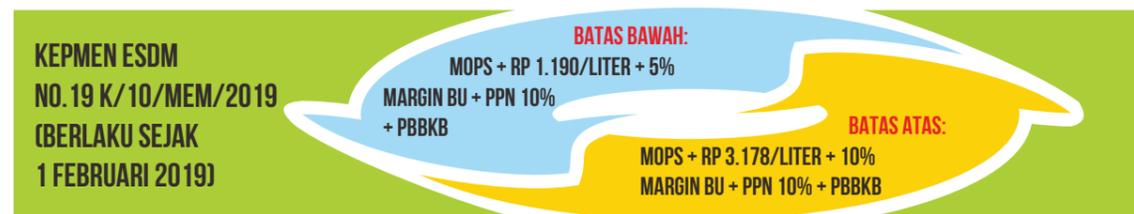


MOPS Mogas 92 yang disesuaikan dengan besaran RON-nya, rata-rata (tgl 25 M-2 – tgl 24 M-1);
MOPS Gasoil 0,25%S, rata-rata (tgl 25 M-2 – tgl 24 M-1)

2. Formula Harga Jual Eceran BBM Jenis Umum Minyak Solar dan Minyak Bensin yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar

Umum (SPBU) dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

(Bensin RON 95, RON 98 & M Solar CN 51)



MOPS Mogas RON 95 dan RON 97 (yang disesuaikan dengan besaran RON-nya), rata-rata (tgl 25 M-2 – tgl 24 M-1);
MOPS Gasoil 0,05%S, rata-rata (tgl 25 M-2 – tgl 24 M-1)

3. Formula Harga Jual Eceran BBM Umum Jenis Avtur yang disalurkan melalui Depo Pengisian Pesawat Udara



Direktorat Jenderal Migas secara berkala melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan Badan

Usaha tentang penetapan harga jual eceran BBM Umum tersebut.

D. KEBIJAKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SATU HARGA

Program BBM Satu Harga yang diinisiasi oleh Presiden RI Joko Widodo telah berjalan dengan baik sejak tahun 2017. Melalui penetapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan secara Nasional, dan SK Dirjen Migas Nomor 0062.K/10/DJM.O/2018 tentang Lokasi Tertentu untuk Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan

Jenis BBM Khusus Penugasan yang telah diubah melalui SK Dirjen Migas Nomor 0022.K/10/DJM.O/2019, telah disusun roadmap pendirian lembaga penyalur yang telah dilaksanakan selama periode 2017-2019.

Adapun realisasi Program BBM Satu Harga 2017-2019 adalah sebagai berikut:



PENDIRIAN LEMBAGA PENYALUR OLEH PT PERTAMINA (PERSERO) 2017–2019 SEBANYAK 160 TITIK

2017	2018	2019
Di wilayah dengan infrastruktur darat & laut cukup baik	Di wilayah dengan infrastruktur darat & laut terbatas	Di wilayah dengan infrastruktur darat & laut cukup sulit / belum ada
Target: 54 penyalur Beroperasi: 54 penyalur	Target: 67 penyalur Beroperasi: 67 penyalur	Target: 39 penyalur Beroperasi: 39 penyalur

PENDIRIAN LEMBAGA PENYALUR OLEH PT AKR CORPORINDO, TBK 2017–2019 SEBANYAK 10 TITIK

2017	2018	2019
Target: 3 penyalur Beroperasi: 3 penyalur	Target: 6 penyalur Beroperasi: 6 penyalur	Target: 1 penyalur Beroperasi: 1 penyalur
Total Target dan Realisasi 2017: 57 penyalur	Total Target dan Realisasi 2018: 73 penyalur	Total Target dan Realisasi 2019: 40 penyalur
Total Target dan Realisasi Akumulasi 2017: 57 penyalur	Total Target dan Realisasi Akumulasi 2017–2018= 130 penyalur	Total Target dan Realisasi Akumulasi 2017–2019= 170 penyalur



Peresmian Penyalur Pertamina Program BBM Satu Harga Tahun 2019

E. HARGA LPG TABUNG 3 KG

1. Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kg

Sesuai pasal 1 ayat (1) Permen ESDM No. 28 Tahun 2008 bahwa *Harga jual eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro pada titik serah Agen termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin Agen ditetapkan Rp 12.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).*

Sesuai diktum Kesatu Kepmen ESDM Nomor 7436 K/12/MEME/2016 bahwa *Harga jual eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil pada titik serah Penyalur termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin Agen ditetapkan Rp 12.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).*

Sejak tahun 2008, harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg tidak mengalami perubahan.

2. Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg.

Sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 61 K/12/MEM/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg yang berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2019.

Besaran harga patokan LPG Tabung 3 kg Tahun 2019 ditetapkan dengan formula sebagai berikut adalah:

103,85% HIP-LPG 3 KG + US\$ 50,11/MT + RP 1.879,-/KG

keterangan:

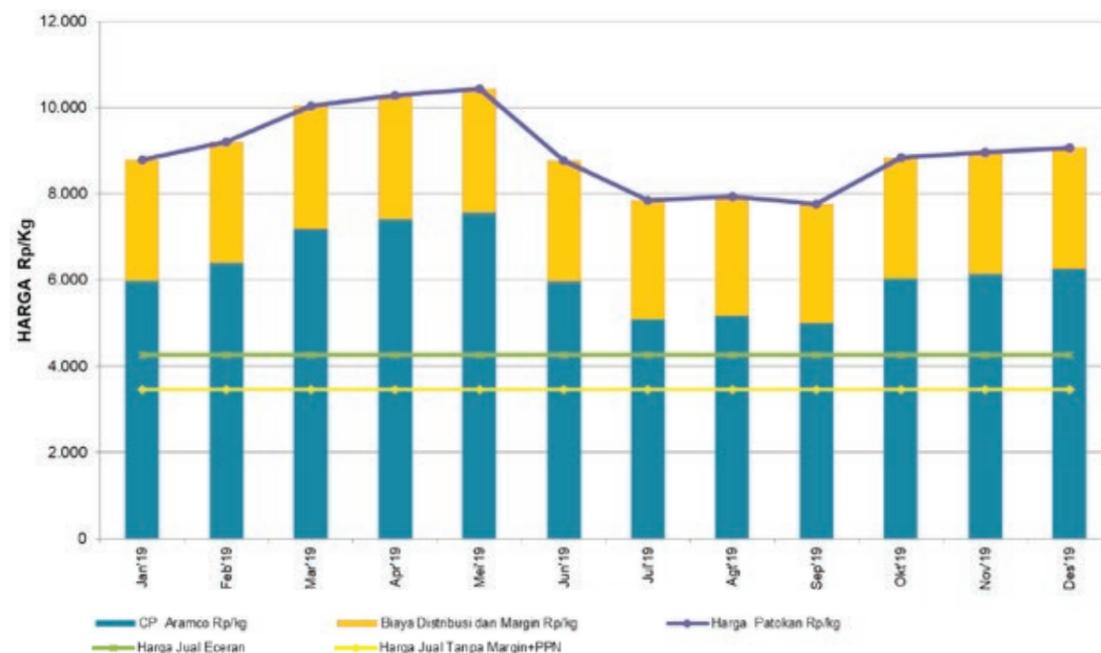
HIP-LPG 3 KG ADALAH HARGA INDEKS PASAR LPG TABUNG 3 KG

Harga patokan LPG 3 kg adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menghitung harga keekonomian terhadap LPG 3 kg. Selisih antara harga patokan dengan harga jual eceran LPG 3 kg tanpa margin agen dan PPN 10% merupakan besaran subsidi LPG 3 kg.

Seperti yang terdapat dalam kurva di bawah ini, jarak antara kurva ungu (harga patokan) dengan garis kuning (harga jual eceran tanpa margin agen + PPN 10%) merupakan subsidi LPG 3 kg.

Pada tahun 2019, subsidi yang dibayarkan berkisar antara Rp 4.306 – 6.984 per kilogram per bulan, dengan rata-rata subsidi sebesar Rp 5.536,85/kg. Sehingga total subsidi selama tahun 2019 mencapai Rp 42,46 Triliun (termasuk PPN, periode Januari s.d. 15 Desember 2019, *unaudited*).

GRAFIK HARGA PATOKAN LPG 3 KG



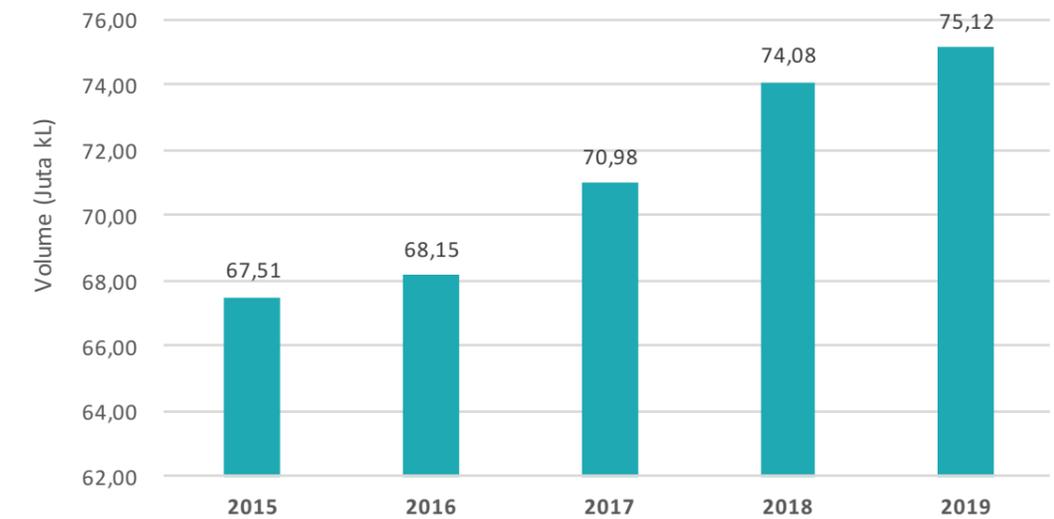
NIAGA MIGAS

A. NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK

Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia dipenuhi melalui produksi Kilang BBM dalam negeri dan impor BBM. Besarnya kebutuhan akan BBM selama 5 tahun terakhir tersaji pada grafik di bawah ini. Data

yang disajikan berdasarkan hasil perekapan pelaporan Badan Usaha tiap bulannya kepada Direktorat Jenderal Migas.

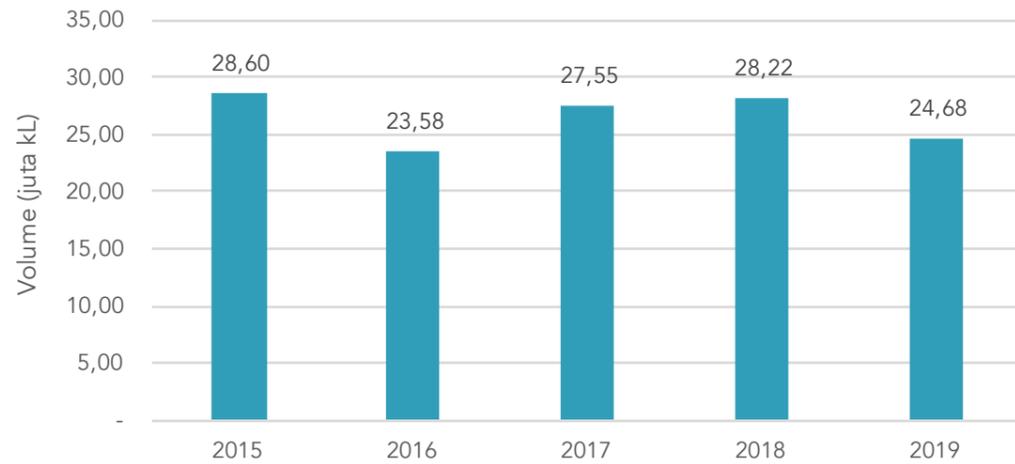
GRAFIK REALISASI PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI TAHUN 2015 – 2019



Dari grafik tersebut dapat terlihat bahwa realisasi penjualan BBM dalam negeri meningkat tiap tahunnya. Peningkatan terendah terjadi pada tahun 2016 yang disebabkan karena adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengakibatkan perlambatan pada sektor industri dan sektor tambang yang mendominasi kebutuhan BBM, terutama penggunaan jenis Minyak Solar dalam kegiatan usahanya. Hal ini juga disertai dengan turunnya realisasi impor Minyak Solar pada tahun 2016.

Kebutuhan akan BBM di Indonesia masih belum dapat dipenuhi oleh produksi kilang dalam negeri, sehingga diperlukan kegiatan impor BBM. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2019 Pasal 12 ayat 1, minyak dan gas bumi hanya dapat diimpor oleh Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir Migas dan Pengguna Langsung.

GRAFIK REALISASI IMPOR BAHAN BAKAR MINYAK TAHUN 2015 – 2019



Penurunan realisasi impor dari tahun 2015 ke 2016 dan dari tahun 2018 ke 2019 terjadi karena alasan yang berbeda. Pada tahun 2016, penurunan impor terjadi karena perlambatan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada tahun 2019, penurunan impor terjadi karena adanya perluasan implementasi pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis Biodiesel pada BBM jenis Minyak Solar.

Produk BBM yang mengalami penurunan impor secara signifikan adalah jenis Minyak Solar. Hal ini terjadi karena penerapan implementasi mandatori

pencampuran Bahan Bakar Nabati jenis Biodiesel ke dalam BBM jenis Minyak Solar. Kadar Biodiesel, atau sering disebut FAME (*Fatty Acid Methyl-Esther*), ditentukan sebesar 20%-volume sehingga hasil pencampurannya dengan Minyak Solar disebut sebagai B20. Implementasi ini diterapkan baik untuk sektor PSO maupun non-PSO. Perluasan pencampuran ini telah dimulai sejak bulan September 2018. Selain itu, pada tahun 2019, Pertamina juga telah menghentikan kegiatan impor Minyak Solar (selain Minyak Solar khusus untuk kebutuhan PT Freeport Indonesia) sejak bulan Maret.

TABEL IMPLEMENTASI MANDATORI PENCAMPURAN BBN KE DALAM BBM TAHUN 2019

Implementasi Mandatori hanya untuk Solar PSO	Implementasi Mandatori diperluas untuk Solar PSO dan Non PSO				
	JANUARI – AGUSTUS 2018		SEPTEMBER-DESEMBER 2018		JANUARI – DESEMBER 2019
Pemanfaatan FAME	1.830.767,86 KL	Pemanfaatan FAME	1.770.302 KL	Pemanfaatan FAME	6.183.498,09 KL
Penjualan Minyak Solar (B20+B0)	19.860.386,56 KL	Penjualan Minyak Solar B20	8.730.710 KL	Penjualan Minyak Solar B20/B30	29.407.098 KL
Potensial Saving ⁴	US\$ 952,79 juta	Penjualan Minyak Solar B0 (Relaksasi) ¹	1.149.985 KL	Penjualan Minyak Solar B0 (Relaksasi) ¹	1.046.128 KL
		Penjualan Minyak Solar B0 (Non Relaksasi) ²	684.902 KL	Penjualan Minyak Solar B0 (Non Relaksasi)	149.914 KL
		Prosentase Pencapaian ³	93,52 %	Prosentase Pencapaian ³	99,51 %
		Potensial Saving ⁴	US\$ 931 juta	Potensial Saving ⁴	US\$ 2,94 Milyar



Catatan:
 1. Data 2019
 2. Volume B0 relaksasi termasuk yang digunakan untuk kepentingan Alutsista TNI POLRI, pembangkit gas turbin PLN dan Highland Freeport
 3. Volume B0 Non Relaksasi Tahun 2018 adalah Volume B0 yang setelah diverifikasi dikenakan denda
 4. Persentase pencapaian didapatkan dari (Penjualan B20+ B0 Relaksasi)/Total Penjualan Solar x 100%
 5. Volume FAME dikalikan dengan rata-rata MOPS Minyak Solar bulanan Januari – Desember sebesar 75,49 US\$/Barrel
 6. Sejak 1 Desember 2019 dilakukan trial B30 di 8 TBBM

Implementasi Mandatori Pencampuran Biodiesel ke Minyak Solar selama tahun 2019 berlangsung dengan baik. Berdasarkan data surveyor, volume FAME yang dimanfaatkan dalam implementasi ini adalah sebesar 6,18 juta kL dengan persentase pencapaian pencampuran sebesar 99,51%. Persentase tersebut belum menyentuh angka 100% disebabkan oleh masih adanya beberapa sektor konsumen yang belum memungkinkan untuk menggunakan FAME di dalam bahan bakarnya. Contoh dari konsumen tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap. Di sisi lain, penggunaan FAME dalam pencampuran ke dalam Minyak Solar mampu memberikan *potential saving* terhadap devisa negara sebesar USD 2,94 Milyar.

B. NIAGA GAS BUMI DAN LPG

1. Niaga gas bumi melalui pipa, LNG, CNG, dan BBG

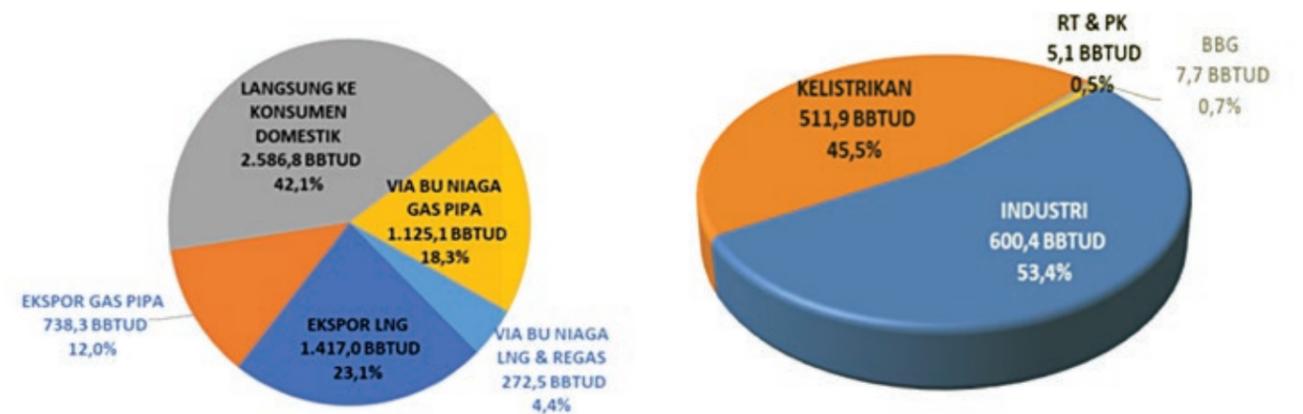
Berdasarkan laporan SKK Migas, pada tahun 2019 persentase penyaluran gas bumi ke domestik

dibandingkan ekspor mencapai 64,89% dari total realisasi penyaluran gas bumi pada kegiatan usaha hulu migas (baik dalam bentuk gas bumi melalui pipa maupun LNG) sebesar **6.139,7 BBTUD**. Penyaluran gas bumi kepada konsumen dapat dilakukan langsung oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (KKKS) ataupun melalui Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Migas sesuai alokasi yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Perbandingan jumlah gas bumi yang diekspor, dijual langsung oleh KKKS, dan disalurkan ke konsumen dalam negeri melalui Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Migas serta data penyaluran gas bumi melalui pipa oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Migas berdasarkan sektor pemanfaatannya disajikan pada gambar di bawah ini.

GRAFIK PENYALURAN GAS BUMI NASIONAL TAHUN 2019

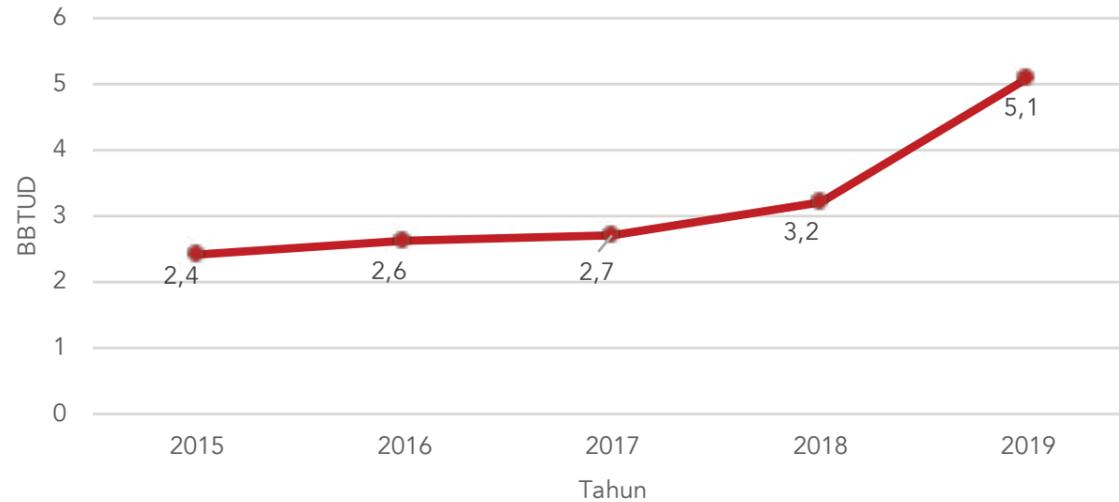
PENYALURAN GAS BUMI NASIONAL TAHUN 2019 PENYALURAN GAS PIPA BU NIAGA TAHUN 2019



Pada tahun 2019, total penyaluran gas bumi melalui pipa yang dikelola oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Migas adalah sebesar 1.125,1 BBTUD, yaitu 18,3% dari total pemanfaatan gas bumi nasional. Jumlah Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Migas untuk kegiatan niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 19 Badan Usaha yang terdiri atas anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Pertamina Gas, PT Pertagas Niaga, dan 16 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ataupun Badan Usaha swasta nasional.

Sebagian besar gas bumi yang diniagakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Migas di pasar domestik dimanfaatkan sebagai bahan baku ataupun bahan bakar untuk sektor industri (53,4%) dan kelistrikan (45,5%). Pemanfaatan gas bumi untuk sektor rumah tangga dan pelanggan kecil masih sangat rendah, yaitu sebesar 5,1 BBTUD (0,5%), tetapi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data penyaluran gas bumi untuk sektor rumah tangga dan pelanggan kecil tahun 2015-2019 disajikan pada gambar di bawah ini.

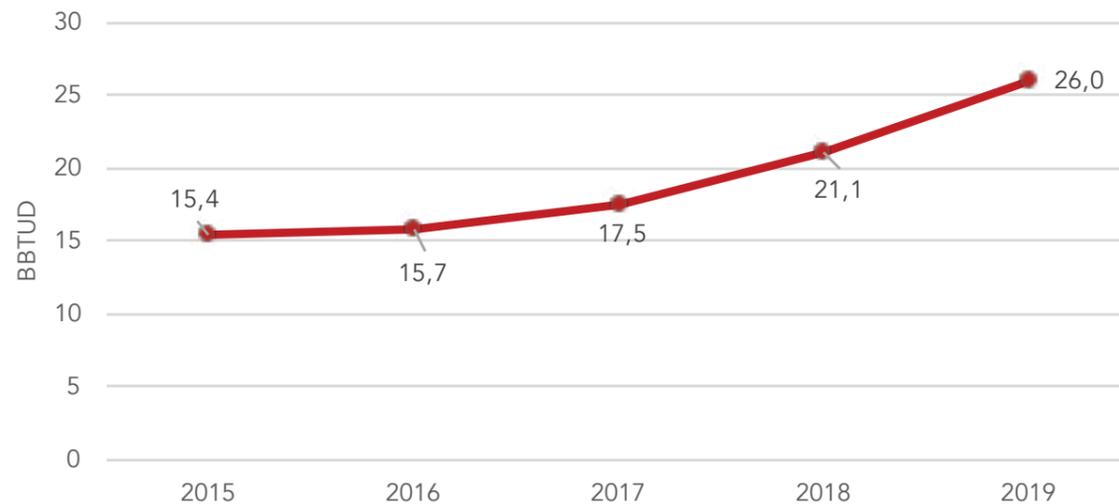
GRAFIK PENYALURAN GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL TAHUN 2015 - 2019



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa realisasi penyaluran gas bumi untuk sektor rumah tangga dan pelanggan kecil pada tahun 2019 mengalami peningkatan sekitar 63% dari tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh kerja sama semua pihak dalam menyukseskan terbangunnya jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, baik melalui skema pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Biaya Investasi PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Gas bumi juga dimanfaatkan dalam bentuk *Compressed Natural Gas* (CNG) sebagai Bahan Bakar Gas untuk sektor transportasi (BBG) dan sektor industri/kelistrikan. Umumnya, pemanfaatan gas bumi dalam bentuk CNG ditujukan bagi konsumen gas bumi yang berlokasi jauh dari jaringan pipa gas bumi atau sebagai *peaker* bagi pembangkit tenaga listrik. Total realisasi pemanfaatan gas bumi untuk BBG dan CNG industri pada tahun 2019 adalah sebesar 26 BBTUD. Data penyaluran BBG dan CNG nasional pada tahun 2015-2019 disajikan pada gambar di bawah ini.

GAMBAR . PENYALURAN GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL TAHUN 2015 - 2019



Selain dimanfaatkan dalam bentuk gas melalui jaringan pipa ataupun CNG, sebagian gas bumi di Indonesia diolah melalui fasilitas likuifaksi (pencairan) terlebih dahulu menjadi *Liquefied Natural Gas* (LNG) sebelum didistribusikan dalam bentuk kargo besar (baik ke konsumen luar negeri maupun dalam negeri) ataupun dikemas lagi melalui fasilitas *filling station* menjadi kargo kecil (*isotank*). Pemanfaatan gas bumi dalam bentuk LNG ditujukan untuk mentransportasikan gas bumi

dalam jumlah besar ke lokasi konsumen yang jauh dari lokasi sumur gas bumi menggunakan kapal LNG (LNGC) atau moda transportasi darat (*trucking*) dan selanjutnya diregasifikasi untuk dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Pada tahun 2019, jumlah penyaluran LNG yang dikelola oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Migas untuk konsumen dalam negeri sebesar 272,5 BBTUD. Sebaran lokasi fasilitas LNG di Indonesia saat ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

GAMBAR FASILITAS LIKUIFAKSI DAN REGASIFIKASI LNG INDONESIA



2. Niaga LPG

Data realisasi penjualan dan impor LPG tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

GRAFIK REALISASI PENJUALAN DAN IMPOR LPG TAHUN 2015 – 2019



Dari gambar di atas dapat terlihat bahwa konsumsi LPG nasional terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir sebesar 5,3%. Pertumbuhan konsumsi LPG dalam negeri tersebut disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan pelaksanaan program konversi minyak tanah ke LPG berupa pembagian paket perdana tabung LPG 3 kg di beberapa Kota/Kabupaten oleh Pemerintah sejak tahun 2007-2015 dan tahun 2018.

Realisasi penjualan LPG nasional yang dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero) dan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Migas pada tahun 2019 mencapai 7,77 juta MT di mana terdapat 466,5 MT yang diekspor ke Timor Leste dalam rangka menjaga hubungan bilateral Indonesia – Timor Leste dengan jaminan PT Pertamina (Persero) bahwa ekspor LPG

tidak akan mengganggu pemenuhan kebutuhan LPG dalam negeri dan LPG yang diekspor bukan merupakan LPG yang disubsidi. Konsumsi LPG dalam negeri didominasi oleh sektor rumah tangga dan sebagian besar merupakan LPG yang disubsidi (PSO).

Sebagian besar kebutuhan LPG dalam negeri tersebut dipenuhi dari pasokan impor. Persentase impor LPG terhadap total penjualan LPG pun cenderung terus mengalami peningkatan, yakni sebesar 67,2% pada tahun 2015, 75,9% pada tahun 2017 dan kembali turun menjadi 73,9% pada tahun 2019. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah terus berupaya melaksanakan program diversifikasi bahan bakar, di antaranya melalui pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dan rencana pemanfaatan Dimetil Eter sebagai bahan bakar pengganti LPG.



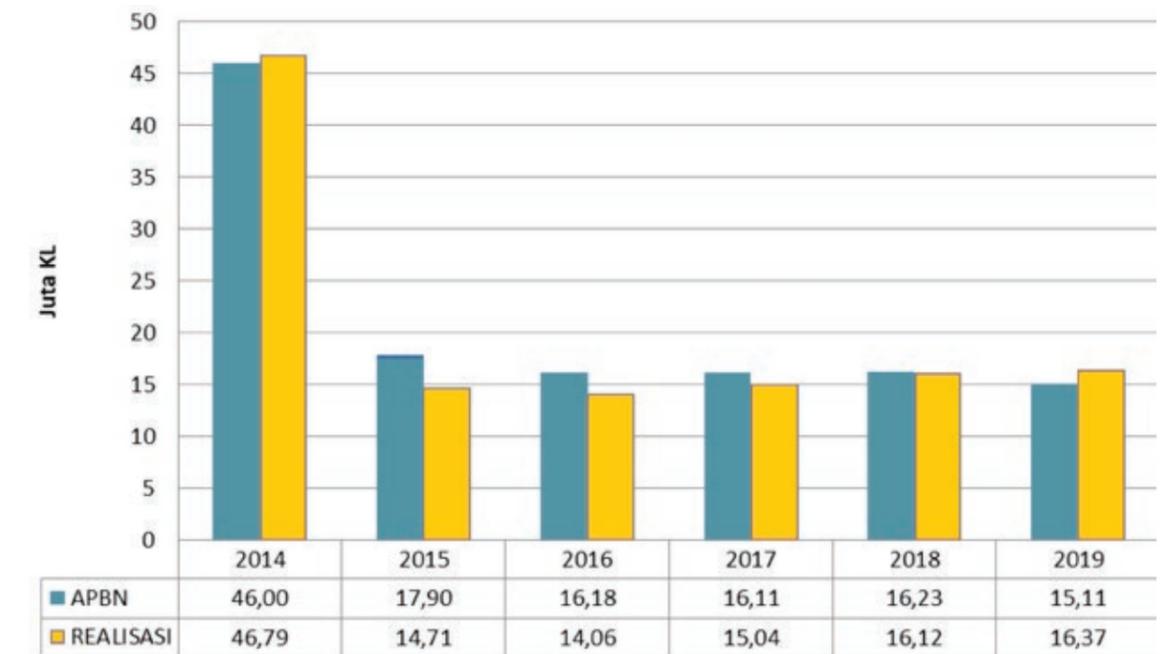
VOLUME BAHAN BAKAR BERSUBSIDI

A. VOLUME JENIS BBM TERTENTU

Kuota volume Jenis BBM Tertentu tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,12 juta kL (6,90%) dibandingkan Kuota volume Jenis BBM Tertentu

tahun 2018. Berikut grafik realisasi Jenis BBM Tertentu terhadap kuota dari tahun 2014-2019:

GRAFIK APBN VS REALISASI BBM TERTENTU



Keterangan: *): realisasi bulan Desember 2019 *unverified*

Kuota tahun 2015 sudah tidak termasuk volume Bensin (Gasoline RON 88), yang sudah tidak disubsidi lagi

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Berikut realisasi Jenis BBM Tertentu tahun 2019.

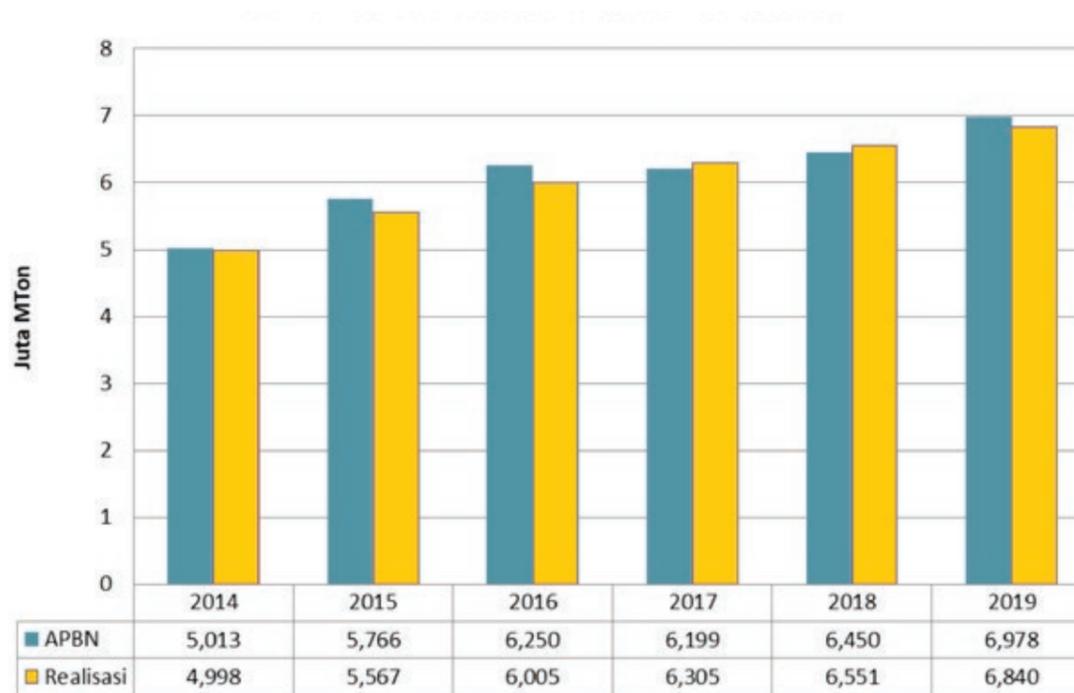
NO	JENIS BBM TERTENTU	KUOTA (JUTA KL)	REALISASI (JUTA KL)
1.	Minyak Tanah	0,61	0,52
2.	Minyak Solar (Gasoiil)	14,50	15,85
TOTAL		15,11	16,37

B. VOLUME LPG TABUNG 3 KG

Kuota Volume LPG Tabung 3 kg tahun 2019 adalah sebesar 6,98 juta MT, mengalami kenaikan 8,19% dibandingkan kuota volume LPG Tabung 3 Kg tahun

2018. Adapun realisasinya mencapai 98,02% dari kuota yang telah ditetapkan. Berikut grafik realisasi LPG Tabung 3 kg terhadap kuota dari tahun 2014-2019:

GRAFIK APBN VS REALISASI LPG TABUNG 3 KG



Untuk mengurangi konsumsi LPG Tabung 3 kg, PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 kg melakukan upaya-upaya pengendalian pemanfaatan LPG tabung 3 kg melalui:

- 1) Trade in LPG 3 kg ke 5,5 kg;
- 2) Memperbanyak supply dan penyebaran LPG 5,5 kg;

Di samping itu, upaya yang terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Migas dalam mengendalikan subsidi LPG Tabung 3 kg ini antara lain:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pendistribusian LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran;
- 2) Melakukan sosialisasi pengendalian LPG 3 kg ke Pemerintah Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah berupa surat himbauan Pemerintah Daerah terkait Penggunaan LPG 3 kg;
- 3) Bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam penindakan penyelewengan subsidi LPG 3 kg.

KESELAMATAN HILIR MIGAS

Kegiatan usaha hilir migas juga tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan kegagalan operasi. Untuk meminimalisir hal tersebut, Direktorat Jenderal Migas hadir dalam pembinaan dan pengawasan melalui bimbingan teknis, pemeriksaan keselamatan maupun audit sistem manajemen keselamatan migas.

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sepanjang 2019 antara lain:

1. Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas

Kegiatan pembinaan dan pengawasan lebih menitikberatkan kepada pengawasan secara langsung di lapangan yaitu dengan melaksanakan Audit SMKM ke 14 Perusahaan Hilir Migas. Hasil Audit SMKM tersebut didapati sebanyak 11 Perusahaan memperoleh nilai SMKM di atas 80, dengan rincian sebagai berikut:

NO	LOKASI	NILAI
1	Kalimantan Jawa Gas	96
2	Misi Mulia Petronusa	65
3	Transpotasi Gas Indonesia	91
4	Gasuma Federal Indonesia	68
5	Trans Pacific Petrochemical Indotama	93
6	Oiltanking Karimun	77
7	AKR Corporindo di Bitung	83
8	Pertamina MOR VI	81
9	Titis Sampurna	85
10	Surya Esa Perkasa	91
11	Pertamina MOR III	87
12	Pertamina RU IV Cilacap	94
13	Pertagas wilayah timur	88
14	Mitra Energi Gas Sumatera	81



2. Sosialisasi Pedoman Teknis Keselamatan Peralatan dan Instalasi serta Pengoperasian Instalasi SPBU
3. Penyusunan Pedoman Investigasi
Pada Tahun 2019, telah diterbitkan Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Selaku Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi No. 0107.K/18/DMT/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pedoman Investigasi Kecelakaan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Pedoman ini

- mencakup tata cara investigasi kecelakaan migas, analisis penyebab kecelakaan, peralatan investigasi dan pelaporan kecelakaan migas.
4. Bimbingan Teknis *Residual Life Assessment*
Pengetahuan terkait *Residual Life Assessment* diperlukan untuk menjawab kebutuhan akan pengawasan Instalasi yang telah melewati masa umur layan.

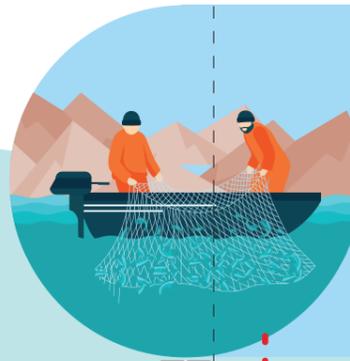


5. Evaluasi Hasil Investigasi Kecelakaan SPBU
Untuk menindaklanjuti hasil investigasi kecelakaan SPBU yang terjadi sepanjang 2019 dirancang program-program untuk meningkatkan keselamatan di kegiatan usaha hilir migas khususnya di SPBU.
6. Pencanaan Program *Road to Zero Accident*
Program "*Road to Zero Accident*" sebagai upaya untuk mencapai Nihil Kecelakaan khususnya di kegiatan usaha hilir migas, dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah pengecekan data

dan identifikasi resiko yang akan dilakukan pada bulan Desember 2019 hingga bulan Maret 2020. Tahap kedua adalah peluncuran dan pelaksanaan program perbaikan yang dimulai pada bulan Maret 2020 sampai dengan tahun 2022. Kegiatan ini meliputi seluruh Kegiatan Usaha Hilir Migas yaitu: Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga untuk 3 komoditi yaitu BBM, LPG dan Gas Pipa.



CAPAIAN INFRASTRUKTUR MIGAS



KONVERTER KIT NELAYAN

13.305 Paket
untuk Nelayan Kecil
di **38 Kab/Kota**
Total s.d. 2019
adalah **60.859 Paket**



JARINGAN GAS KOTA

74.496 Sambungan Rumah di **16 Kab/Kota**
Total s.d. 2019
adalah **400.269 Sambungan Rumah**



KONVERTER KIT PETANI

1.000 Paket
untuk Petani Kecil
di **4 Kab/Kota**
Total s.d. 2019
adalah **1.000 Paket**

FASILITASI PEMBANGUNAN SPBG

Peresmian SPBG Karawang
Total s.d. 2019 adalah
46 unit SPBG dan MRU



Pembangunan jaringan gas kota (jargas) merupakan salah satu wujud pemanfaatan dana APBN untuk kegiatan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.”

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Ignasius Jonan

INFRASTRUKTUR GAS BUMI

Pemerintah melalui Kementerian ESDM cq. Direktorat Jenderal Migas membuka kesempatan kepada investor untuk dapat membangun fasilitas gas bumi. Keberadaan sumber-sumber gas bumi yang tidak dekat dari pusat-pusat industri dan kelistrikan mendorong penyediaan fasilitas gas bumi berupa FSRU, Regasifikasi onshore atau LNG Terminal. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Migas melakukan fasilitasi kepada Badan Usaha yang berminat untuk berinvestasi pada fasilitas gas bumi tersebut.

Selama tahun 2019, terdapat 2 kegiatan fasilitasi pembangunan FSRU/Regasifikasi/Terminal LNG yaitu PT Nusantara Regas dan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera.

1. PT Berkah Kawasan Manyar akan membangun FSRU di perairan Gresik.
2. PT Nusantara Regas berencana untuk membangun FSRU di Kota Cilacap guna memenuhi kebutuhan gas bumi untuk Kilang Minyak Cilacap dan industri di wilayah Cilacap dan sekitarnya.



Located strategically in the mouth of Madura Straits, our attached port will be the deepest in East Java (-16 LWS). With 4 jetties and 6,200meter total berthing area, JIPE could cater large size bulk carriers until 100,000 DWT.

Logistics cost for incoming raw materials and distribution of finished goods will be minimized with utilization of JIPE's 3 modes of sea and land connectivity.

3 MODES TRANSPORTATION

1. Attached port will be the deepest in East Java (-16 LWS), currently natural draught -14LWS
2. 39 Km Toll Road Access connecting JIPE to East Java lines from KRIAN – LEGUNDI – BUNDER – MANYAR/JIPE (year 2020)
3. 10 Km Railway Access connecting JIPE to West Java, Rail Depo (year 2023)



RENCANA INDUK JARINGAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI GAS BUMI

Untuk mendukung tata kelola gas yang baik, Direktorat Jenderal Migas secara berkala menyiapkan dan terus memperbarui Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) yang terdiri atas Ruas Transmisi, Wilayah Jaringan Distribusi, serta fasilitas dan sarana infrastruktur yang diperlukan untuk pemanfaatan gas bumi. RIJTDGBN digunakan sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur gas bumi, keputusan investasi, dan pengembangan pasar gas bumi domestik. Penyiapan Rencana

Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) melibatkan beberapa instansi antara lain; Kementerian Perindustrian, SKK Migas, BPH Migas dan Badan Usaha Migas.

Rancangan Keputusan Menteri ESDM terkait Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) saat ini sedang dalam tahap finalisasi untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM.

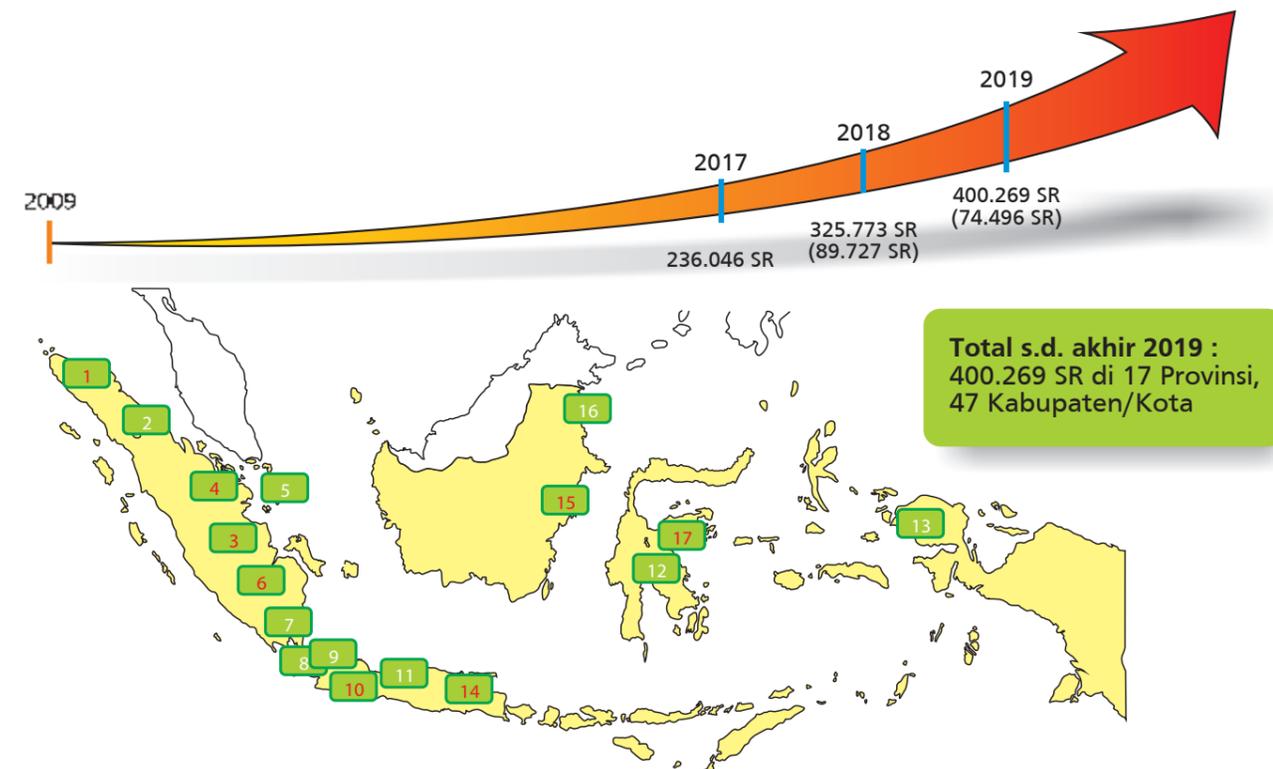


PEMBANGUNAN JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA

Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (Jargas) oleh Kementerian ESDM c.q. Direktorat Jenderal Migas telah dimulai sejak tahun 2009 dengan capaian total Sambungan Rumah (SR) hingga akhir 2019 sebanyak 400.269 SR. Jargas yang dibiayai APBN ini mulai masif dibangun pada tahun 2016 melalui penugasan kepada

BUMN Migas baik Pertamina maupun PGN dengan jumlah sambungan rumah sebanyak kurang lebih 75.000 SR per tahunnya. Hingga akhir tahun 2019, Jargas telah mengalir di 17 provinsi atau 47 kabupaten/kota di Indonesia. Perkembangan Jargas yang didanai oleh APBN dapat dilihat pada Gambar berikut.

GAMBAR PERKEMBANGAN DAN CAPAIAN JARGAS MELALUI PENDANAAN APBN

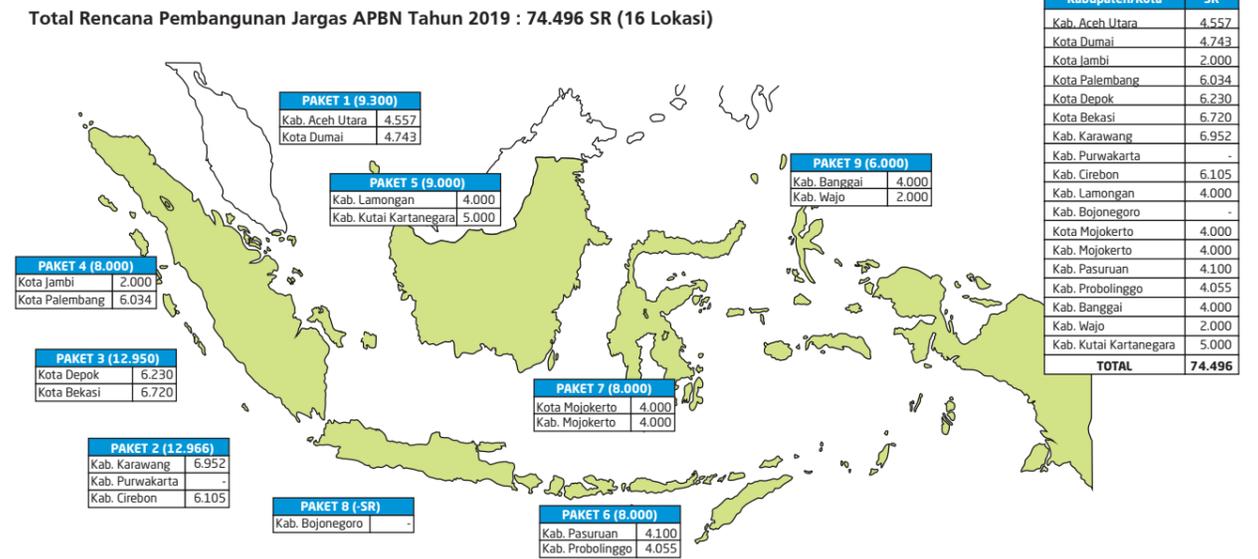


Berdasarkan hasil penyusunan dokumen *Front End Engineering Design (FEED) – Detail Engineering Design for Construction (DEDC)*, pada Tahun Anggaran 2019 Direktorat Jenderal Migas telah melaksanakan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 74.496 SR pada 16 lokasi dari target pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Migas sebanyak

78.216 SR pada 18 lokasi dibantu oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. sebagai Tim Pendukung pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian Jargas. Terdapat 2 lokasi yang tidak jadi dibangun pada tahun 2019 yaitu Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Purwakarta dikarenakan kendala teknis dan nonteknis.

Sebaran untuk lokasi dan jumlah sambungan rumah Jargas yang dibangun dapat dilihat pada gambar berikut.

GAMBAR PEMBANGUNAN JARGAS TA 2019



Adapun keuntungan menggunakan Jargas antara lain:

1. Harga lebih murah dibandingkan LPG;
2. Emisi jauh lebih bersih dibanding BBM dan kayu bakar;
3. Tersedia setiap saat (tidak perlu keluar rumah mencari LPG/minyak tanah/kayu bakar jika sewaktu-waktu kehabisan).

Dalam pelaksanaannya, Pembangunan Jargas tersebut masih menemui berbagai kendala antara lain:

a) Kendala Perizinan

Pusat :

Persinggungan dengan utilitas instansi lain.

1. Jalan Nasional (*crossing* dan sejajar) → Kementerian PUPR – BBPJN
2. Jalan Tol (*crossing* dan sejajar) → Kementerian PUPR – BPJT
3. Sungai (*crossing* dan sejajar) → Kementerian PUPR - BBWS
4. Jalur KAI (*crossing* dan sejajar) → Kementerian Perhubungan - Ditjen KA dan PT KAI
5. Hutan → Kementerian LHK

Daerah :

1. UKL/UPL → Dinas Lingkungan Prov./Kota/Kab.
2. Penggunaan Jalan Provinsi/Kab./Kota (*crossing* dan sejajar) → Dinas PU
3. Penggunaan Taman → PTSP Prov./Kota/Kab.
4. Penggunaan Fasilitas Umum & Sosial → Walikota/Bupati

b) Kendala Sosial

Gangguan dari Kelompok Masyarakat tertentu dan Pungutan Liar.

c) Kendala Teknis

1. Pada pengadaan dengan proses pelelangan umum, masih dimungkinkan terdapat resiko mendapatkan penyedia jasa yang kurang memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan.
2. Proses kalibrasi Gas Meter yang terhambat dikarenakan peralatan kalibrasi yang masih terbatas di Indonesia.
3. Kurang tersedianya tenaga kerja dengan kualifikasi tukang gali di lapangan.

Dalam rangka meningkatkan performa kegiatan Pembangunan Jargas baik dari sisi Perencanaan, Pengadaan maupun Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, Direktorat Jenderal Migas telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Sebelum penetapan lokasi Pembangunan Jargas, Direktorat Jenderal Migas berkoordinasi dengan Pemda setempat dan untuk kemudian dilakukan Penandatanganan Berita Acara Komitmen Kerjasama Pemda/Pemkot, Direktorat Jenderal Migas, PT Pertamina (Persero) Cq PT PGN untuk Rencana Pembangunan Jargas TA 2020;

- b) Penyusunan Risk Register Pembangunan Jargas untuk menganalisa dan mitigasi resiko pada saat pelaksanaan pembangunan Jargas;

c) Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan Pembangunan Jargas (Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan PT KAI, serta stakeholder terkait);

d) Sebelum dilaksanakan pembangunan Jargas, terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Pemda setempat dan kemudian dilakukan penandatanganan MoU sebagai bentuk dukungan penuh Pemda dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan Jargas.



• **REVIU DOKUMEN FRONT END ENGINEERING DESIGN – DETAIL ENGINEERING DESIGN FOR CONSTRUCTION (FEED-DEDC)**

Agar pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga berjalan sesuai dengan peraturan, memenuhi standar keselamatan dan hasilnya layak serta aman digunakan oleh masyarakat, sebelum dilaksanakannya pembangunan, perlu disusun suatu dokumen *Front End Engineering Design (FEED) – Detail Engineering for Construction (DEDC)*. Dokumen tersebut mencakup penghitungan secara komprehensif tentang kebutuhan material (panjang pipa, diameter pipa, jumlah valve, dan lain-lain.) yang dituangkan dalam *technical drawing* dan hal lain yang dibutuhkan dalam konstruksi jaringan gas, serta perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk menentukan biaya pembangunan.

Direktorat Jenderal Migas telah melakukan penyusunan FEED-DEDC di lokasi Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Banggai pada tahun 2018. Namun karena terbatasnya anggaran, tidak semua lokasi dapat dibangun pada tahun 2019 sehingga agar dapat dibangun pada tahun 2020, maka perlu dilakukan reviu FEED-DEDC kembali.

KONVERSI BBM KE BBG UNTUK KAPAL NELAYAN KECIL

Pada Tahun Anggaran 2019, Direktorat Jenderal Migas telah melaksanakan kegiatan konversi BBM ke BBG untuk nelayan sebanyak 13.305 paket yang terdistribusi di 38 Kabupaten/kota. Pada pelaksanaannya, kegiatan konversi BBM ke BBG untuk nelayan meliputi kegiatan

pendistribusian/pembagian, sosialisasi, verifikasi dan pengawasan paket perdana LPG untuk nelayan. Adapun wilayah pendistribusian paket konversi BBM ke BBG untuk nelayan secara rinci ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

GAMBAR LOKASI PENDISTRIBUSIAN PROGRAM KONVERSI BBM KE BBG UNTUK NELAYAN TA 2019



Program Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Kecil ini merupakan kelanjutan program Kementerian ESDM yang dimulai sejak tahun 2016. Hingga saat ini paket yang telah dibagikan adalah sebanyak 60.859 paket.

Isu utama yang menjadi kendala di lapangan selama pelaksanaan Konversi BBM ke BBG untuk Kapal Nelayan Kecil antara lain:

- Kendala Teknis**
 - Kondisi geografis di titik serah yang kurang mendukung, baik akses transportasi, tempat registrasi, dan akses pemasangan mesin.
 - Ketersediaan kelengkapan material barang yang tidak menentu, sehingga menyebabkan ketidakpastian akan jadwal distribusi.
 - Titik serah yang terlalu banyak, membuat kerja tidak efisien dalam waktu percepatan.
 - Jadwal kegiatan yang tidak menentu dan mendadak.

- Cuaca yang kurang mendukung, menunggu laut pasang untuk dapat dilakukan pemasangan *converter kit*.
- Calon penerima terkendala untuk dikumpulkan.
- Kendala Administrasi**
 - Adanya Calon Nelayan pengganti yang karena satu hal tidak dapat menerima bantuan.
 - Adanya perubahan Daftar Calon Penerima Paket Perdana (DCP3) yang kurang terkomunikasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kepada konsultan pengawas.
 - Kurang respons dan ketegasan pihak DKP dalam menghadapi dinamika yang terjadi di lapangan.
 - Banyaknya kebutuhan administrasi untuk nelayan yang diwakilkan.
- Kendala Sosial**
 - Adanya kecemburuan bagi nelayan yang tidak menerima bantuan.
 - Kondisi keamanan dan ketertiban saat distribusi.

KONVERSI BBM KE BBG UNTUK PETANI SASARAN

Program Konversi BBM ke BBG kini mulai menyentuh masyarakat petani. Berdasarkan pantauan di lapangan, dalam menjalankan kegiatan pertaniannya, didapati beberapa petani melakukan modifikasi sederhana terhadap pompa irigasi agar dapat menggunakan bahan bakar LPG 3 kg. Proses modifikasi tersebut tentunya tidak melalui uji kelayakan teknis yang benar sehingga menyalahi regulasi dan tidak memenuhi syarat dari segi keselamatan dan kehandalannya.

Untuk menjawab situasi tersebut, pemerintah berinisiatif untuk memulai kegiatan konversi BBM ke BBG yang dapat menyentuh masyarakat petani melalui pengadaan peralatan konversi di antaranya:

1. Pompa Air berupa pompa bermesin bahan bakar bensin dengan daya max. 6.5 HP.

2. Converter Kit dan Aksesori Pendukung.
3. Tabung LPG berkapasitas 3 kg (7.3 liter), bertekanan kerja hingga 0,7 MPa.
4. Bracket Conversion Kits.

Pada tahun 2019 ini, Direktorat Jenderal Migas telah melaksanakan kegiatan konversi BBM ke BBG untuk Petani sebanyak 1.000 paket yang terdistribusi di 4 kabupaten/kota. Pada pelaksanaannya, kegiatan konversi BBM ke BBG untuk Petani meliputi kegiatan pendistribusian/pembagian, sosialisasi, verifikasi dan pengawasan paket perdana LPG untuk petani.

Wilayah pendistribusian paket konversi BBM ke BBG untuk Petani dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL LOKASI PENDISTRIBUSIAN PAKET KONVERSI BBM KE BBG UNTUK PETANI TA 2019

NO	KAB	JUMLAH PAKET	JADWAL SOSIALISASI	JADWAL PENDISTRIBUSIAN	Keterangan
1	Malang	50	30 Oktober 2019	31 Okt s/d 1 November 2019	Sudah Selesai Pendistribusian
2	Sragen	350	12 November 2019	13 s/d 19 November 2019	
3	Klaten	350	12 November 2019	13 s/d 19 November 2019	
4	Bantul	250	5 November 2019	6 s/d 10 November 2019	
TOTAL PAKET		1000			

Program Konversi BBM ke BBG untuk Petani ini merupakan *Pilot Project* yang akan terus dilanjutkan secara berkelanjutan.

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROYEK PERCONTOHAN UNTUK PENYEBARAN KENDARAAN GAS ALAM TERKOMPRESI DAN INFRASTRUKTUR PENGISIAN BAHAN BAKAR TERMASUK DUKUNGAN TERHADAP PENGEMBANGAN LINGKUNGAN YANG BERKESINAMBUNGAN (PROYEK HIBAH NEDO)

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas melalui pembangunan sarana dan prasarana minyak dan gas bumi, Pemerintah terus berupaya melakukan penambahan infrastruktur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Upaya tersebut antara lain dengan kerja sama hibah dengan *The New Energy and Industrial Technology Development Organization Japan* (NEDO), dan pada tanggal 11 Desember 2017 telah ditandatangani *Memorandum of Understanding (MOU) tentang Demonstration Project for the Spread of Compressed Natural Gas Vehicles and Refueling Infrastructure Including Support of Development of Sustainable Environment*.

Melalui kerja sama hibah tersebut rencananya akan dibangun 3 (tiga) unit SPBG yang berlokasi di:

1. Jalan Abdul Muis, Jakarta;
2. Jalan Sudirman, Tangerang Banten; dan
3. KIIC Karawang, Jawa Barat.

Dalam rangka implementasi kegiatan tersebut, maka perlu dilakukan pemantauan, pengawasan, dan pendampingan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat terlaksana dengan baik serta sesuai dengan perencanaan. Hal ini juga mengingat implementasi kegiatan melibatkan instansi lain di luar Kementerian ESDM.

Pada tanggal 17 Desember 2019, telah dilaksanakan peresmian SPBG di KIIC Karawang, Jawa Barat yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM yang mewakili Menteri ESDM, sedangkan untuk 2 (dua) lokasi lainnya yaitu di Jalan Abdul Muis, Jakarta dan Jalan Sudirman, Tangerang, Banten, direncanakan akan selesai pembangunannya di tahun 2020.



Peresmian SPBG KIIC – Karawang

MONITORING KEGIATAN INFRASTRUKTUR

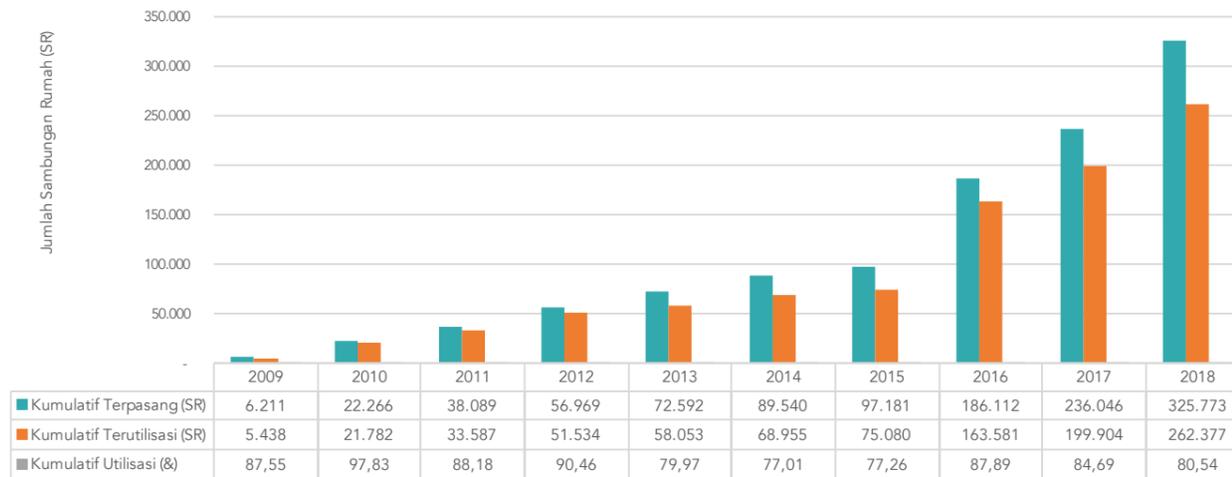
1. Monitoring Pengoperasian Jargas Terbangun

Di samping melakukan pengawasan terhadap pembangunan Jargas, Direktorat Jenderal Migas juga perlu memastikan Jargas yang terbangun dapat beroperasi dengan baik. Dalam rangka pelaksanaan pengoperasian Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga tersebut, melalui Keputusan Menteri ESDM No. 11 K/10/MEM/2019, Pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) dalam hal penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan distribusi untuk rumah tangga. Penugasan kepada PT Pertamina

(Persero) dilaksanakan melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk. selaku anak perusahaan (*sub holding* gas bumi).

Direktorat Jenderal Migas juga secara aktif terus melakukan *monitoring* terhadap pelaksanaan pengoperasian Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga. Adapun kemajuan perkembangan pengoperasian Jargas yang dibangun sejak tahun 2009 s.d 2018 dapat terlihat pada grafik di bawah ini.

Jargas TA 2009-2018



Kendala dalam pelaksanaan pengoperasi jaringan gas bumi untuk rumah tangga yaitu:

1. Perlu adanya perbaikan peralatan dan instalasi yang terpasang pada Jargas terbangun.
2. BUMN belum dapat mengalokasikan anggaran untuk pengoperasian dan pemeliharaan Jargas terbangun selama status Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) belum ditetapkan.

2. Monitoring Pembangunan dan Pengoperasian Tangki Penyimpanan BBM dan LPG

Dalam rangka meningkatkan cadangan BBM dan mendukung ketersediaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional serta mewujudkan ketahanan energi nasional, maka Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Migas melaksanakan pembangunan infrastruktur tangki penyimpanan BBM dan LPG melalui penugasan kepada PT Pertamina (Persero) menggunakan Anggaran Biaya Investasi PT Pertamina (Persero). Direktorat Jenderal Migas juga terus melakukan koordinasi dan

pengawasan atas pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian tangki penyimpanan BBM dan LPG tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM 4040K/10/MEM/2017 tanggal 23 November 2017 tentang perubahan Keputusan Menteri ESDM No. 2157K/10/MEM/2017, Pembangunan tangki penyimpanan BBM dilaksanakan di 14 lokasi pada tahun 2017-2018, dengan rincian lokasi sebagai berikut:

- Badas, Nusa Tenggara Barat
- Waingapu, Nusa Tenggara Timur
- Maumere, Nusa Tenggara Timur
- Pare-pare, Sulawesi Selatan
- Merauke, Papua
- Ternate, Maluku Utara
- Masohi, Maluku
- Bula, Maluku
- Dobo, Maluku
- Labuha, Maluku

- Saumlaki, Maluku
- Nabire, Papua
- Namlea, Papua
- Wayame, Maluku

Sementara itu, pembangunan tangki penyimpanan LPG dilaksanakan di 6 lokasi pada tahun 2017-2019, dengan rincian lokasi sebagai berikut:

- Jayapura, Papua
- Wayame, Maluku
- Tenau (Kupang), Nusa Tenggara Timur
- Bima, Nusa Tenggara Barat
- Kepulauan Nias, Sumatera Utara
- Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat

Isu utama yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan tangki penyimpanan BBM dan LPG antara lain:

- Lokasi pembangunan tangki penyimpanan BBM dan LPG yang cukup jauh, sehingga mempengaruhi lamanya waktu pengiriman material ke lokasi.
- Konstruksi tangki penyimpanan LPG belum dapat dilaksanakan karena masih dalam proses penyusunan dokumen perencanaan (FS dan FEED-DEC).
- Perlunya koordinasi efektif internal PT Pertamina (Persero) dalam percepatan penyelesaian pembangunan tangki penyimpanan BBM dan LPG.



DUKUNGAN KEGIATAN PENGELOLAAN MIGAS LAINNYA



DUKUNGAN KETEKNIKAN DAN KESELAMATAN LINGKUNGAN MIGAS

GAMBAR UPAYA MEWUJUDKAN KEGIATAN MIGAS AKRAB LINGKUNGAN



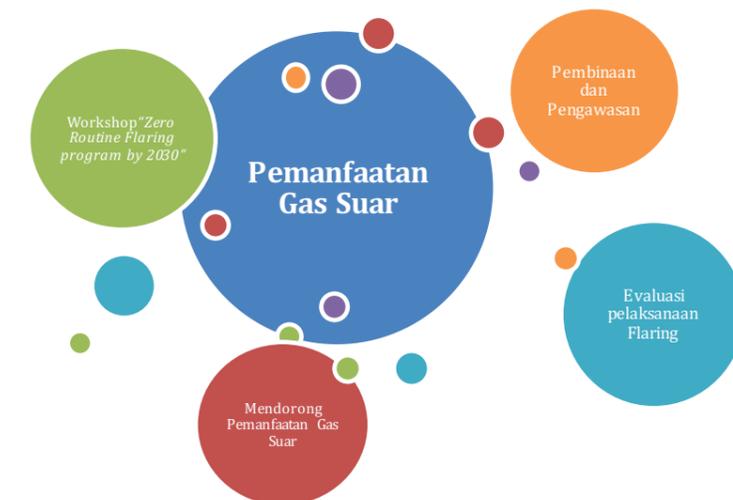
Pada tahun 2019 telah dilakukan beberapa kegiatan dalam rangka memastikan kegiatan usaha migas yang akrab lingkungan, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Gas Suar (Flare Gas)

Dalam rangka pengawasan kegiatan penurunan dan pemanfaatan gas suar di Badan Usaha/

Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT), Direktorat Jenderal Migas mendorong BU/BUT untuk membuat dan menyampaikan program pemanfaatan gas suar. Pada tahun 2019 terdapat 23 BU/BUT yang menyampaikan program dengan potensi penurunan gas suar mencapai 60 MMSCFD.

GAMBAR UPAYA MENINGKATKAN PEMANFAATAN GAS SUAR



Direktorat Jenderal Migas bekerja sama dengan World Bank dan Center of Excellence ITB juga telah melaksanakan workshop percepatan pemanfaatan gas suar pada kegiatan usaha migas. Kegiatan yang juga merupakan tindak lanjut dari dukungan Menteri ESDM

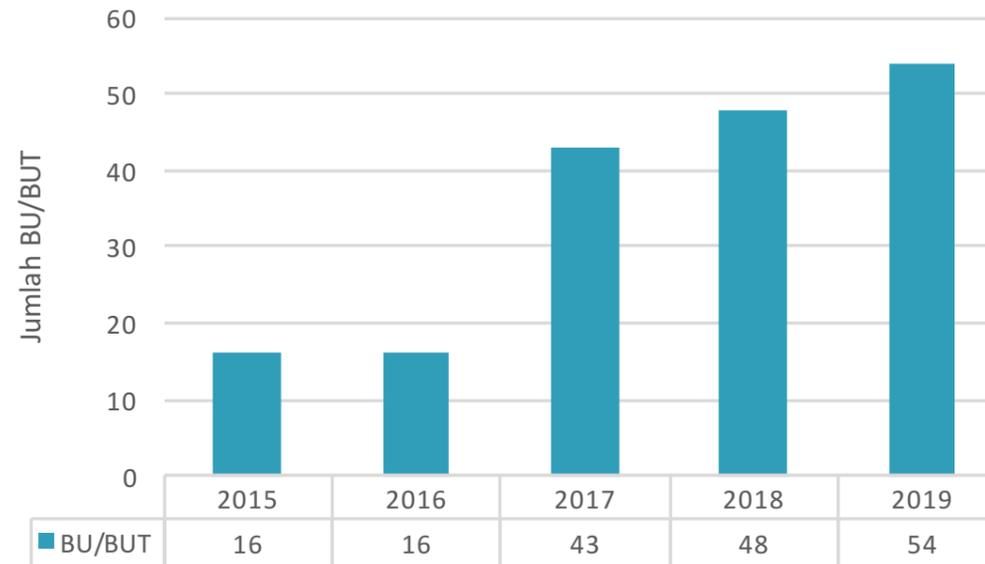
kepada World Bank dalam program "Zero Routine Flaring program by 2030" ini dilaksanakan sebagai sarana berbagi informasi, pengalaman serta mencari alternatif solusi untuk meningkatkan pemanfaatan gas suar.



Workshop Percepatan Pemanfaatan Gas Suar Menuju Zero Routine Flaring By 2030

Berdasarkan laporan pelaksanaan pembakaran gas suar tahun 2019 yang diterima dari 79 BU/BUT, sebanyak 54 BU/BUT yang terdiri dari 47 perusahaan hulu dan 7 perusahaan hilir telah melaksanakan pemanfaatan gas suar bakar. Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

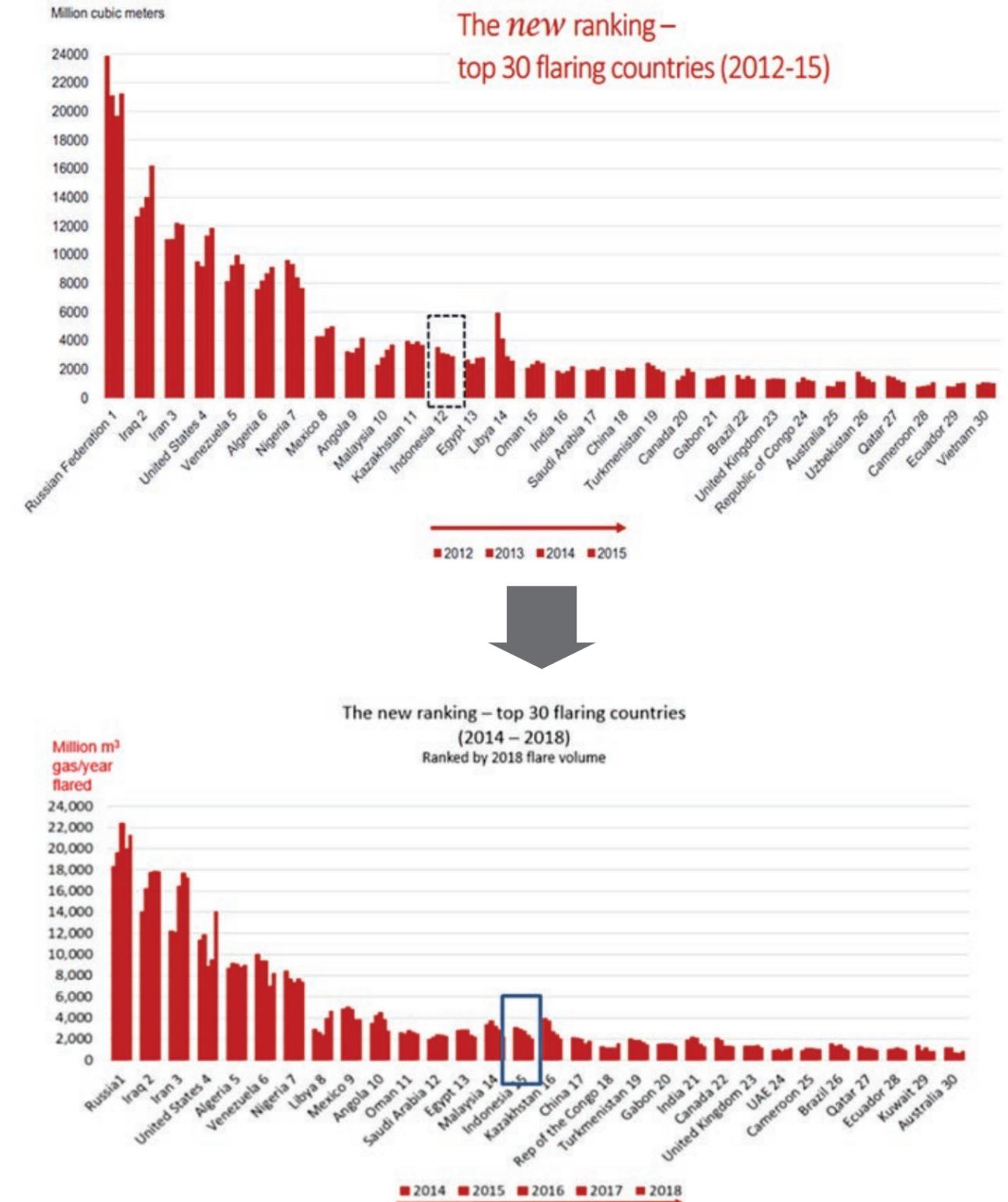
GRAFIK JUMLAH PERUSAHAAN YANG MEMANFAATKAN GAS SUAR



Selain itu, berdasarkan data World Bank, Indonesia menunjukkan keberhasilannya dalam melakukan upaya penurunan pembakaran gas suar. Peningkatan jumlah perusahaan yang melaksanakan pemanfaatan gas suar serta penurunan pembakaran gas suar ini

menunjukkan adanya peningkatan capaian Indonesia dalam meningkatkan efisiensi penggunaan energi serta kemajuan dalam upaya mencapai *Zero Routine Flaring* pada 2030.

GRAFIK PERINGKAT INDONESIA DALAM DAFTAR NEGARA DENGAN PEMBAKARAN GAS SUAR TERTINGGI
SUMBER: WORLD BANK



2. Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS)

CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi CO₂ ke atmosfer. Teknologi ini meliputi pemisahan dan penangkapan CO₂ dari sumber emisi gas buang (*capture*), pengangkutan CO₂ tertangkap ke tempat penyimpanan (*transportation*) dan penyimpanan ke tempat yang aman (*storage*). Sementara CCUS merupakan teknologi pemanfaatan CO₂, salah satunya dengan menginjeksikan CO₂ ke *reservoir* untuk meningkatkan perolehan minyak melalui kegiatan *CO₂-Enhanced Oil Recovery (CO₂-EOR)*. Teknologi CCUS melalui CO₂-EOR bisa menjadi alternatif solusi dalam memproduksi lapangan

migas yang memiliki kandungan CO₂ yang tinggi sehingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca.

Dalam rangka mendukung pengembangan kegiatan CCS/CCUS di Indonesia, pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Migas membentuk *National Center of Excellence (CoE) CCS/CCUS* yang menjadi wadah peningkatan kapasitas nasional terkait teknologi CCS/CCUS dan menugaskan ITB dan LEMIGAS sebagai pelaksana utama *National CoE CCS/CCUS*. Selama tahun 2019, Direktorat Jenderal Migas berkomitmen melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pemberian dukungan kepada CoE CCS/CCUS (ITB dan LEMIGAS) yang memiliki tugas untuk melakukan studi pengembangan proyek CCS/CCUS dan diharapkan dapat diimplementasikan di lapangan.

GAMBAR STUDI CCUS YANG TELAH/SEDANG BERLANGSUNG



3. Tanggap Darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak

Selama tahun 2019, telah terjadi tumpahan minyak dengan volume total sebesar 9.110,19 barel. Volume tersebut belum termasuk tumpahan minyak di Perairan Karawang yang masih dalam proses perhitungan tim

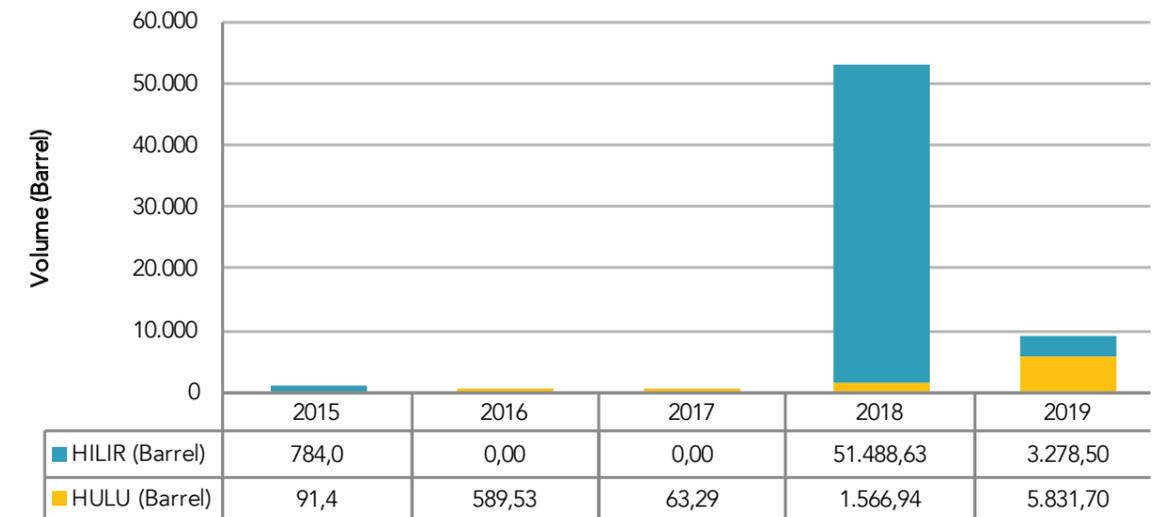
subsurface. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi tumpahan minyak dan sebanyak 3.180,35 barel telah berhasil dikumpulkan kembali (*recovery*).

TABEL DATA KEJADIAN TUMPAHAN MINYAK TAHUN 2019

2019	Tumpahan Minyak*	
	>15bbl	<15 bbl
Kejadian	16	192
Perusahaan	6	11
Volume Tumpahan	9.011,16 bbl	99,03 bbl
Volume Recovery	3.180,35 bbl	-

* Belum termasuk tumpahan minyak di Perairan Karawang

GRAFIK STATISTIK TUMPAHAN MINYAK TAHUN 2015 S.D. 2019

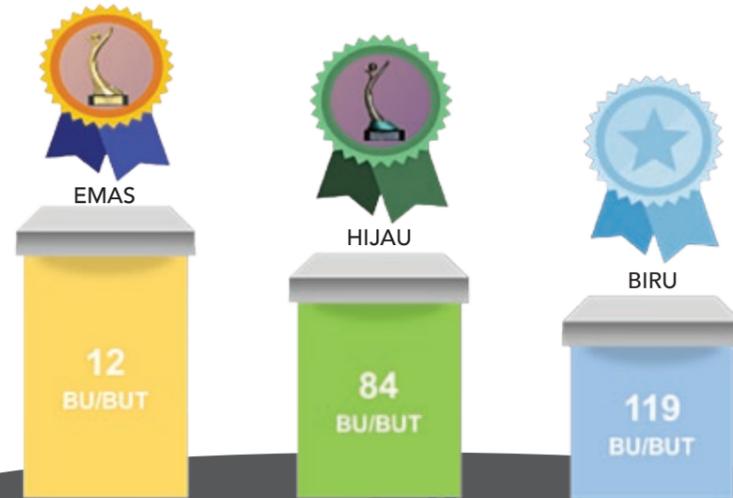


Dalam upaya meningkatkan kesiapan dalam mengantisipasi kejadian tumpahan minyak, sesuai Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 04/P/M/Pertamb/1973 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Perairan dalam Kegiatan Eksplorasi dan atau Eksploitasi Migas, pada tahun 2019 Direktorat Jenderal Migas telah melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan rencana tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak pada 20 wilayah operasi migas. Kegiatan evaluasi ini mencakup kesiapan rencana tanggap darurat, personel, peralatan dan bahan-bahan untuk penanggulangan tumpahan minyak.

4. Pembinaan dan Pengawasan Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan

Sebagai bagian dari upaya pengelolaan lingkungan, Direktorat Jenderal Migas juga mendukung partisipasi BU/BUT dalam mengikuti kegiatan PROPER yang diprakarsai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan usaha migas memiliki capaian yang sangat baik dalam pengelolaan lingkungan hidup tahun 2018-2019. Hal ini terlihat dari dominasi perusahaan migas yang memperoleh PROPER Emas mencapai 46% (12 dari 26 perusahaan dari berbagai industri) dan PROPER Hijau mencapai 48% (84 dari 174 perusahaan dari berbagai industri).

GAMBAR PREDIKAT PROPER 2018-2019



STANDARDISASI MIGAS

A. KEGIATAN PENYEDIAAN RANCANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (RSNI) PADA KEGIATAN USAHA MIGAS

Sampai dengan saat ini SNI yang ada di bidang migas berjumlah 164 SNI, masih relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah standar internasional seperti ISO, API, ASME, ASTM, AWS, NACE, British Standard, JIS, DNV dan ANSI. Untuk itu, Direktorat Jenderal terus mendorong perumusan RSNI guna menunjang keberlangsungan kegiatan operasi migas.

Kegiatan penyiapan RSNI dilaksanakan melalui rapat perumusan antara tim dari Direktorat Jenderal Migas dengan Komite Teknis 75-01 (Material, Peralatan, Instalasi dan Instrumentasi Migas), Komite Teknis 75-02 (Produk Migas), dan Badan Standardisasi Nasional (BSN). RSNI yang dikonsensuskan pada tahun 2019 antara lain:

- RSNI ISO 4437-5: 2019 — Sistem perpipaan plastik untuk penyaluran bahan bakar gas — Polietilena (PE) — Bagian 5: Kesesuaian penggunaan dalam sistem.

- Revisi SNI 13-3507-1994 Konstruksi sistem pipa PE untuk gas bumi.
- Revisi SNI 13-3502-1994 Sistem penyisipan pipa PE untuk gas bumi.

Tiga judul RSNI-3 (RSNI yang telah dikonsensuskan) tersebut selanjutnya akan dilakukan jajak pendapat oleh BSN selama 20 hari kerja melalui website BSN. Jika tidak terdapat masukan dari publik, maka RSNI akan ditetapkan menjadi SNI oleh BSN.

B. KEGIATAN PENYEDIAAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (RSKKNI) PADA KEGIATAN USAHA MIGAS

Hingga tahun 2019, SKKNI di bidang migas yang telah terbit adalah sebanyak 59 judul SKKNI. Rinciannya adalah sebagai berikut:

TABEL STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA YANG TELAH DITERBITKAN

SKKNI	SKKNI	SKKNI	SKKNI
<ul style="list-style-type: none"> •Bidang Pengeboran/Sub Bidang Pengeboran Darat •Bidang Laboratorium Pengujian Migas •Bidang Sistem Manajemen Lingkungan •Fluida Pengeboran, Kompleksi Dan Kerja Ulang Sumur •Bidang Pengendalian Mutu Bahan Bakar Minyak Penerbangan •Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Industri Migas •Bidang Produksi Subbidang Operasi Produksi •Bidang Penyelidikan Seismik Refleksi Dengan Menggunakan Sumber Getar Dinamit. •Bidang Operasi Boiler •Penanganan Bahaya Gas H₂s •Operasi Scaffolding •Bidang Produksi Subbidang Operasi Perawatan Sumur •Sub bidang Operasi SPBU •Perawatan Mekanik •Bidang Pressure Relieve Device •Bidang Pemrosesan Gas Bumi •Bidang Instrumentasi •Bidang Petugas Teknisi Operasi Crude Distilling Unit Pengolahan Minyak Bumi 	<ul style="list-style-type: none"> •Petugas Pengambil Contoh Bidang Minyak Dan Gas Bumi (PPC Bidang Migas) •Bidang Pemasaran Industri Migas Sub bidang Pengelolaan Sarana Pengisian •Penerimaan, Penimbunan Dan Penyaluran Minyak Dan Gas Bumi Pengukur Isi Tangki Minyak Bumi Dan Hasil Olahan •Bidang Inspektur Rig •Bidang Pengolahan Minyak Bumi, Petugas Operator Blending •Bidang Teknik Listrik Migas •Sub bidang Wellsite Geology •Sub Golongan Industri Logam Dasar Besi Dan Baja, Kelompok Usaha Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi, Area Kerja Pengelasan Bawah Air •Sub bidang Operasi Serah Terima Bahan Bakar Cair di Dermaga (Loading Master) Sub bidang Petugas Teknisi Operasi Vacuum •Sub Golongan Industri Bahan Bakar Hasil Pengilangan Minyak Bumi Termasuk Liquid Petroleum Gas (LPG), Kelompok Industri Pembuatan Minyak Pelumas •Inspeksi Bejana Tekan Migas 	<ul style="list-style-type: none"> •Inspeksi Tangki Timbun Migas •Inspeksi Bahan Peledak Migas •Inspeksi Pipa Penyalur Migas •Bidang Distribusi Gas Alam Dan Buatan Untuk Non Pipa •Inspeksi Kelistrikan •Inspeksi Platform •Inspeksi Casing, Tubing dan Accessories •Bidang Inspektur Rotating Equipment •Bidang Slickline •Bidang Wireline Logging •Bidang Pipe Fitter •Enjiner Instrumen Sistem Alat Ukur (Measurement System) •Jabatan Uji Tak Rusak (UTR) •Jabatan Risk Based Inspection (RBI) •Bidang Korosi Dan Pencegahannya •Jabatan Inspektur Instalasi •Operasi dan Pemeliharaan Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi Onshore •Uji Tak Rusak (UTR) Advance •Pipeline Integrity Management System 	<ul style="list-style-type: none"> •(PIMS); •Process Piping •Inspektur Oil County Tubular Goods (OCTG) pada Pipa Bor (Drill Pipe). •Inspeksi Konstruksi, Fabrikasi, Sipil Dan Struktur Sipil; •Inspeksi Line Pipe; •Asset Integrity Management System; •Pengelolaan Central Processing Plant Minyak dan Gas Bumi Hulu; •Reliability Centered Maintenance; •Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja Migas. •Well Testing; dan •Gas Safety Inspector.

** : Diterbitkan sampai dengan tahun 2019

Selain itu, sebagai bentuk keseriusan dalam penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang migas, Direktorat Jenderal Migas telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 tahun

2015 Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib dengan 35 SKKNI dengan bidang/judul sebagai berikut:

GAMBAR STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA WAJIB*



* : PERATURAN MENTERI ESDM/05/2015

Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKN) pada tahun 2019 yang dirumuskan adalah sebanyak 3 (tiga) RSKKN dan 1 (RKN) Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi dengan judul sebagai berikut:

- a. RSKKN Bidang Bidang Pengawas *Lifting* Migas;
- b. RSKKN Bidang Pendistribusian Non-BBM;
- c. RSKKN Bidang Awak Mobil Tangki BBM;
- d. RKN Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Industri Migas.

Selain perumusan RSN dan RSKKN, beberapa pencapaian lainnya di bidang Standardisasi antara lain:

1. Penetapan Spesifikasi *Medium Distillate Fuel* MDF (Keputusan Direktur Jenderal Migas 0179.K/DJM.S/2019).
2. Penetapan Spesifikasi MFO Rendah Sulfur (Keputusan Direktur Jenderal Migas 0295.K/10/DJM.S/2018) Regulasi IMO, kandungan sulfur 5.000 ppm.

3. Spesifikasi BBM Solar B30 (Keputusan Direktur Jenderal Migas 0234.K/DJM.S/2019).
4. Penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) sebanyak 2.050 Produk.
5. Penerbitan Kualifikasi Ahli Las sebanyak 7.895 kualifikasi.
6. Pengembangan NPT-DUP dan *Welder online* sehingga dapat memudahkan Badan Usaha dalam pengurusan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT).
7. Penyusunan Pedoman *Quality Assurance* (QA) dan regulasinya pada Kegiatan Hulu Migas. QA didasari oleh terbitnya Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dengan salah satu agendanya adalah optimalisasi penerimaan negara dengan kriteria keberhasilan penerapan QA dalam pengelolaan *National Data Repository* (NDR).

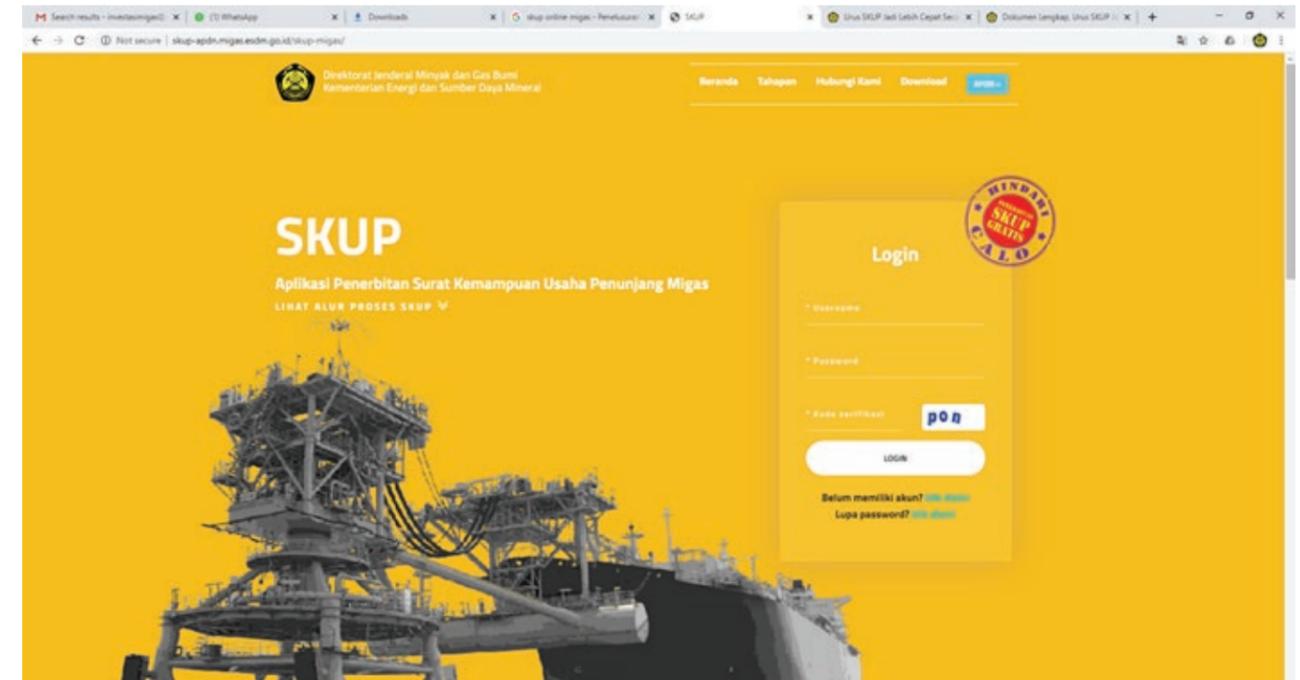
USAHA PENUNJANG MIGAS

A. PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PERMOHONAN SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) MIGAS BERBASIS WEB

Dalam rangka reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima, Direktorat Jenderal Migas pada tahun 2019 mengaplikasikan **Sistem Permohonan Surat**

Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas Berbasis Web yang merupakan suatu konsep inovasi alat bantu pemrosesan SKUP Migas serta sebagai alat monitoring pemrosesan SKUP Migas. Aplikasi SKUP Online ini juga terhubung langsung dengan aplikasi APDN Migas sehingga seluruh perusahaan yang sudah memiliki SKUP Migas akan otomatis terdaftar dalam APDN Migas.

GAMBAR WEBSITE SKUP ONLINE (SKUP-APDN.MIGAS.ESDM.GO.ID/SKUP-MIGAS)



Direktur Pembinaan Program Migas
pada Acara Sosialisasi SKUP Online

SKUP diterbitkan untuk memberikan apresiasi bagi badan usaha yang memiliki kemampuan nyata meliputi aspek legal, teknis, jaringan pemasaran dan purna jual. Sosialisasi aplikasi *SKUP Online* juga dilaksanakan secara rutin sebulan sekali kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ) selaku pengguna aplikasi *SKUP Online*. Sosialisasi *SKUP Online* ini merupakan salah satu sarana untuk menjembatani kesulitan-kesulitan yang dihadapi Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ) pada saat melakukan pemrosesan SKUP melalui aplikasi *SKUP Online*.

Direktorat Jenderal Migas juga menyediakan *Helpdesk* SKUP Migas untuk membantu para pengguna aplikasi SKUP *Online* apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau pun kesulitan dalam penggunaan aplikasi SKUP *Online*.



Helpdesk SKUP Migas

B. PENYUSUNAN BUKU APRESIASI PRODUKSI DALAM NEGERI (APDN) *ONLINE*

Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha

Sepanjang tahun 2019, jumlah pemrosesan SKUP melalui aplikasi SKUP *online* sebesar 935 perusahaan dengan jumlah SKUP migas yang terbit mencapai 537 perusahaan jasa penunjang migas. Daftar perusahaan yang telah memiliki SKUP migas dapat dilihat pada aplikasi APDN *online*.

Diharapkan dengan adanya aplikasi SKUP *online* akan memberikan kemudahan bagi para investor untuk menjalankan kegiatan investasi di sektor migas yang berujung pada peningkatan nilai investasi migas nasional. SKUP dan APDN *Online* dapat diakses melalui alamat skup-apdn.migas.esdm.go.id.

Penunjang Migas, Direktorat Jenderal Migas menyusun Buku Apresiasi Produksi Dalam Negeri (APDN) sebagai acuan dalam pengadaan barang/jasa dan pengendalian barang operasi pada kegiatan usaha migas. Buku APDN dapat diakses secara *online* melalui website skup-apdn.migas.esdm.go.id/apdn.

GAMBAR WEBSITE APDN (SKUP-APDN.MIGAS.ESDM.GO.ID/APDN)



C. PENETAPAN OBJEK VITAL NASIONAL

Objek Vital Nasional atau Obvitnas diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional. Pada sektor ESDM, Obvitnas diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 48 tahun 2018 tentang Objek Vital Nasional. Peran Direktorat Jenderal Migas dalam penetapan Objek Vital Nasional adalah dengan melakukan inventarisasi dan verifikasi Objek Vital Nasional Bidang Migas bersama dengan Sekretariat Jenderal terkait pemenuhan ciri-ciri dan kriteria Obvitnas untuk

selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM terkait Obvitnas.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri ESDM Nomor 77 tahun 2019, sampai dengan awal tahun 2019 terdapat 241 Objek Vital Nasional subsektor Migas yang terdiri dari 95 Obvitnas Hulu dan 202 Obvitnas Hilir. Setelah melalui hasil inventarisasi dan evaluasi lanjutan pada tahun 2019, Obvitnas subsektor Migas berubah menjadi 93 Obvitnas Hulu dan 201 Obvitnas Hilir.

TABEL DAFTAR OBVITNAS BIDANG MIGAS

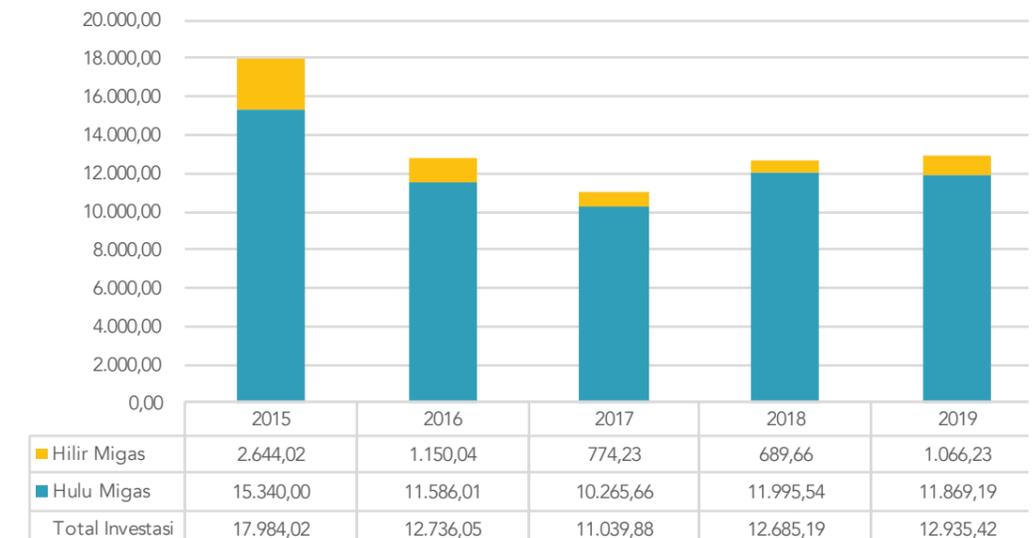
OBVITNAS MIGAS	JUMLAH WILAYAH/ FASILITAS	PENGELOLA	%
Hulu	93	62	127
Hilir	201	31	100

INVESTASI MIGAS

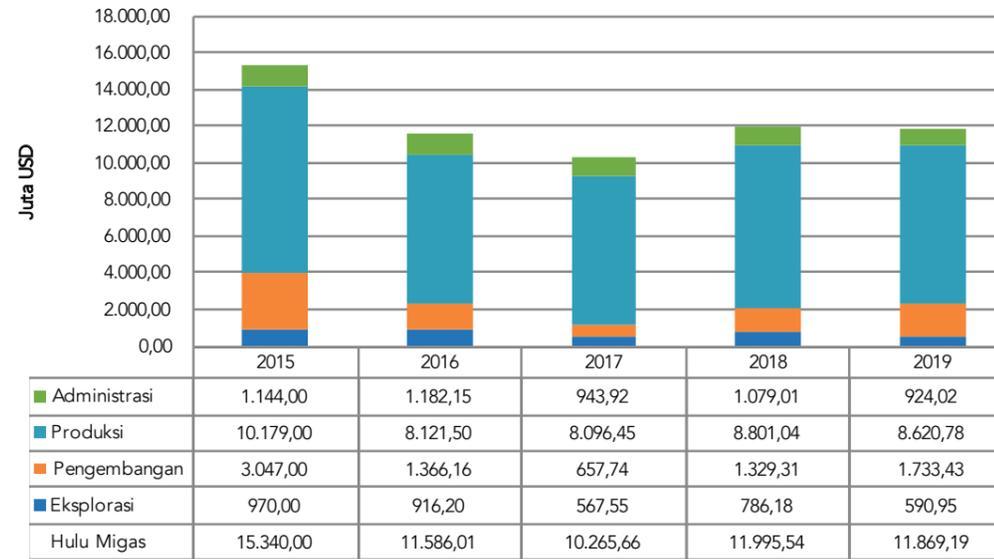
Realisasi investasi kegiatan usaha migas di tahun 2019 mencapai USD 12.935 juta yang berasal dari sektor hulu sebesar USD 11.869 juta yang didapat dari expenditure

KKKS Produksi dan KKKS Non-Produksi, dan USD 1.066 juta yang diperoleh dari sektor hilir.

GRAFIK REALISASI INVESTASI MIGAS



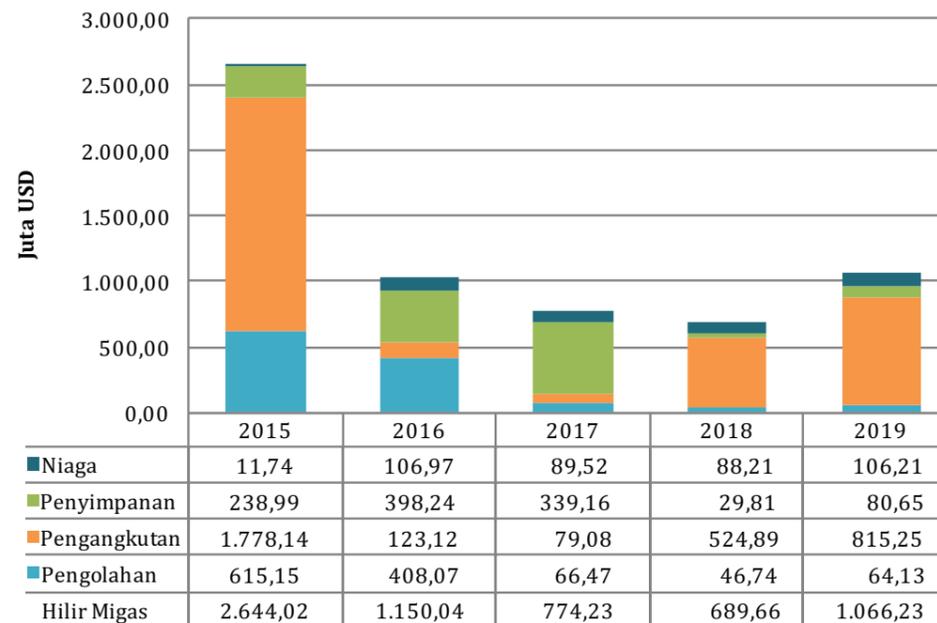
GRAFIK INVESTASI HULU MIGAS



Realisasi investasi hulu migas tahun 2019 mencapai 96% prognosanya (USD 12.427 juta). Investasi hulu belum mencapai target disebabkan beberapa faktor seperti tertundanya realisasi eksplorasi dan eksploitasi

lapangan, program eksplorasi dan pengembangan yang masih berjalan dan belum selesai 100%, serta harga minyak dunia.

GRAFIK INVESTASI HILIR MIGAS



Berbeda dengan hulu, realisasi investasi hilir migas tahun 2019 mencapai 107% prognosanya (USD 998 juta). Realisasi tersebut didominasi oleh kegiatan usaha

pengangkutan dengan nilai terbesar dari proyek Pipa Gas Gresik-Semarang sebesar USD 247 juta.

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DIREKTORAT JENDERAL MIGAS 2020 – 2024

Direktorat Jenderal Migas tengah menyusun Renstra 2020-2024 yang selaras dengan visi-misi presiden dan rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, dengan konsep ketahanan energi ke dalam rencana aksi dan strategi yang lebih konkret.

Secara garis besar, berikut merupakan hasil penilaian yang dilakukan untuk penyusunan sasaran program dan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Migas periode 2020-2024.

Sasaran Program (SP)	IKSP	IKSK-2	Satuan	
Tenjudnya ketahanan energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan	I	Indeks Ketersediaan Migas	1 Indeks Ketersediaan Hulu Migas	Indeks
			2 Indeks Ketersediaan BBM	Indeks
			3 Indeks Ketersediaan LPG	Indeks
			4 Indeks Ketersediaan LNG	Indeks
			5 Reserve to Production Ratio Minyak/Gas Bumi	Tahun
			6 Jumlah Cadangan BBM Operasional	hari
			7 Jumlah Cadangan LPG Operasional	hari
	II	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang ditetapkan	1 Deviasi Penetapan Harga Minyak mentah Indonesia (ICP)	%
			2 Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar)	%
			3 Deviasi Harga Jual LPG, Bensin dan Solar Penugasan	%
			4 Deviasi Harga Gas Bumi Hilir melalui Pipa	%
	III	Indeks Aksesibilitas Migas	1 Persentase Capaian Konversi BBM ke LPG	%
			2 Indeks Sambungan Rumah Tangga	Indeks
			3 Indeks Fasilitas Niaga Migas	Indeks
4 Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas			Indeks	
5 Indeks Fasilitas Pengolahan Migas			Indeks	
Meningkatnya Dukungan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Migas	IV	Tingkat Penerimaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kebijakan, program, dan produk migas	1 Tingkat Penerimaan Pelaku Usaha terhadap kebijakan dan program hulu migas	%
			2 Tingkat penerimaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kebijakan, program, dan produk hilir migas	%
			3 Tingkat Penerimaan Masyarakat terhadap program Pembangunan Infrastruktur Migas menggunakan APBN	%
Tenjudnya Tata Kelola Sumber Daya Migas yang Bersinergi	V	Indeks Pengelolaan Energi Migas	1 Indeks Pengelolaan Perencanaan Energi Migas	Indeks
			2 Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Migas	%
			3 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Migas	%
			4 Persentase Penggunaan Produk Dalam negeri (P3DN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas	%
Tenjudnya kegiatan operasi migas yang aman, andal, dan ramah lingkungan	VII	Indeks Keselamatan migas	1 Indeks Keselamatan migas	Indeks
Penguatan Kapasitas Organisasi Ditjen Migas	VIII	Indeks Pengendalian dan Pelayanan Internal	1 Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks
			2 Indeks Profesionalitas ASN	Indeks
			3 Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal	%
			4 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas	Nilai
			5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai

GAMBAR PRINSIP KEBIJAKAN MIGAS 2020 - 2024



Program pengelolaan migas telah diarahkan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk mencapai kemandirian energi, ketersediaan energi, berkelanjutan, efisien, akses yang adil dan merata, dan terjaganya keselamatan kerja dan fungsi lingkungan hidup. Hal ini didukung oleh fokus pembangunan nasional subsektor migas tahun 2020-2024 pada produksi gas bumi, pemanfaatan gas bumi untuk domestik, pembangunan kilang minyak RDMP/GRR, pembangunan Jargas, dan program konversi BBM ke BBG untuk petani dan nelayan.

Di samping itu, dengan karakteristik industri migas yang berbiaya tinggi dan mengandalkan teknologi yang canggih, Pemerintah perlu menggandeng sektor swasta untuk dapat berpartisipasi dalam mengembangkan bisnis migas di Indonesia. Berikut 5 arahan Presiden dalam pelaksanaan nawacita untuk dapat meningkatkan nilai investasi:

1. Pembangunan SDM:

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur:

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi:

Penyederhanaan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law.

4. Penyederhanaan Birokrasi:

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi:

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

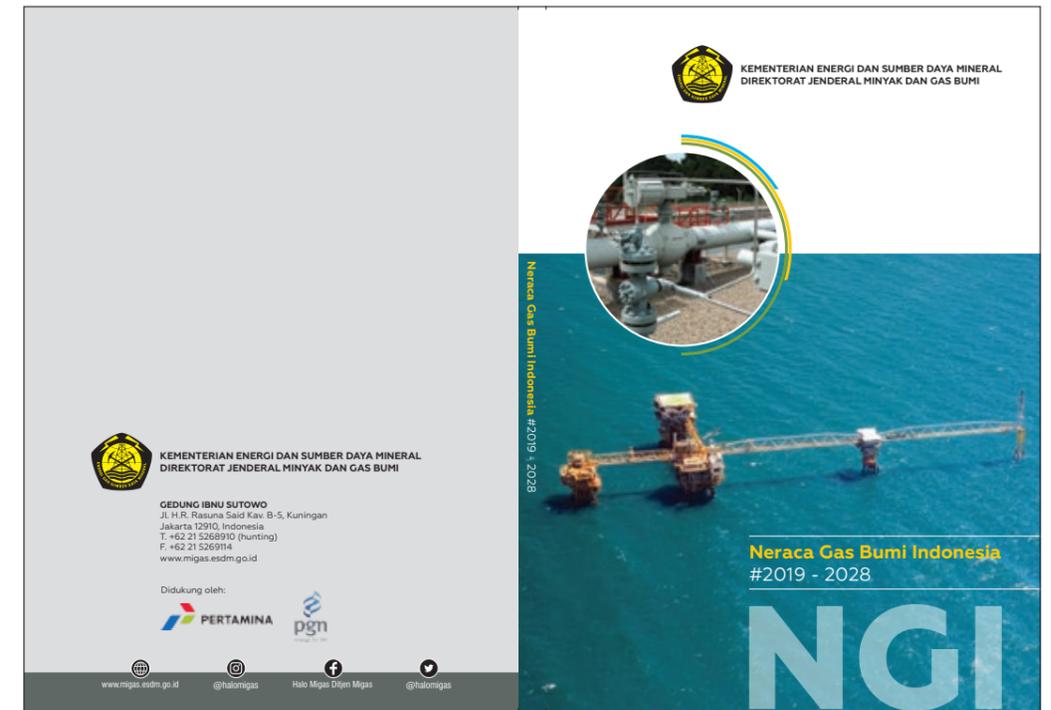
Perbaikan investasi harus dimulai dengan membangun kelembagaan pengelola migas yang kuat, visioner dan didukung oleh sistem informasi yang memadai. Hambatan investasi sebagian besar bersifat non-teknis seperti perizinan, regulasi yang kontraproduktif, tumpang tindih lahan, tata ruang dan masalah sosial. Selain itu birokratisasi yang bersifat over-regulated, instabilitas regulasi membuat industri migas kurang ramah investasi. Oleh sebab itu, Pemerintah cq. Direktorat Jenderal Migas telah melakukan pembenahan seperti pembukaan data migas hulu, perizinan online, memangkas birokrasi dan berpartisipasi aktif dalam memfasilitasi, koordinasi dan harmonisasi dengan instansi lain yang terkait.

NERACA GAS BUMI

Sebagai upaya untuk mencapai tata kelola gas yang baik, Direktorat Jenderal Migas secara berkala menyusun dan memperbarui Buku **Neraca Gas Bumi Indonesia** yang menjadi dokumen untuk perencanaan dan penetapan alokasi gas bumi, sekaligus menjadi pedoman dan acuan

bagi seluruh pemangku kepentingan industri gas bumi di Indonesia. Neraca Gas Bumi Indonesia merupakan gambaran pasokan dan kebutuhan gas bumi nasional jangka panjang yang mencakup berbagai skenario proyeksi yang mungkin akan terjadi di masa mendatang.

GAMBAR BUKU NERACA GAS BUMI INDONESIA TAHUN 2019 - 2028



PENGELOLAAN HUKUM MIGAS

Dalam menciptakan iklim investasi sektor migas yang lebih kondusif guna mewujudkan kedaulatan energi, Direktorat Jenderal Migas berupaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kemudahan dalam berusaha dengan melakukan beberapa hal antara lain:

- Menyampaikan 14 rancangan peraturan perundang-undangan dan 11 Keputusan Menteri guna menyikapi dinamika perkembangan sub sektor migas; dan
- Melakukan revisi terhadap 4 regulasi yang dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan subsektor migas di lapangan dengan tujuan penyederhanaan birokrasi, memberikan kepastian investasi dan meningkatkan minat para pemilik modal untuk berusaha di subsektor migas nasional.

Rancangan peraturan perundang-undangan subsektor migas yang termasuk dalam Program Legislasi Nasional tahun 2019 dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 137 K/06/MEM.2019 tentang Prolegnas Sektor ESDM Tahun 2019, serta telah direalisasikan, antara lain:

1. RUU tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. RPP tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
3. RPerpres tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;

4. RPerpres tentang Perubahan Atas Perpres 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil;
5. Rperpres tentang Perubahan atas Perpres 146 Tahun 2015 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri;
6. RPM tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi, dan Eksploitasi Migas; dan
7. RPM tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah.

Di samping itu, Direktorat Jenderal Migas juga telah menyelesaikan rancangan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan arahan Menteri ESDM maupun masukan unit-unit berdasarkan tingkat kebutuhan sebanyak 25 rancangan peraturan perundang-undangan. Adapun 25 rancangan peraturan perundang-undangan yang sebagian telah ditetapkan/ diterbitkan oleh Menteri ESDM antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran.
3. Rancangan Perpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 146 Tahun 2015 tentang Kilang Minyak Dalam Negeri.
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi.
5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya.
6. Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.
7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM

- Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
9. Rancangan Peraturan Menteri tentang Kegiatan Usaha Penunjang Migas (Revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2018).
10. Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyaluran BBM di Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
11. Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
12. Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi.
13. Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 053 Tahun 2006 tentang Wajib Daftar Pelumas yang Dipasarkan Dalam Negeri.
14. Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi pada Sumur Tua.
15. Keputusan Menteri ESDM Nomor 269 K/12/MEM/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 138 K/12/MEM/2019 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia.
16. Keputusan Menteri ESDM Nomor 268 K/12/MEM/2019 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.
17. Keputusan Menteri ESDM Nomor 244 K/12/MEM/2019 tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan November 2019.
18. Keputusan Menteri ESDM Nomor 156 K/12/MEM/2019 tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Agustus 2019.
19. Keputusan Menteri ESDM Nomor 116 K/12/MEM/2019 tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Juni 2019.
20. Keputusan Menteri ESDM Nomor 115 K/12/MEM/2019 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.
21. Keputusan Menteri ESDM Nomor 96 K/12/MEM/2019 tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Mei 2019.
22. Keputusan Menteri ESDM Nomor 91 K/12/DJE/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 350 K/12/DJE/2018 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Minyak.

23. Keputusan Menteri ESDM Nomor 138 K/12/MEM/2019 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia.
24. Keputusan Menteri ESDM Nomor 133 K/15/MEM/2019 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana LPG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran Tahun Anggaran 2019.
25. Keputusan Menteri ESDM Nomor 176 K/12/MEM/2019 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab (*good governance*), serta untuk memberikan pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat sesuai kebutuhan masyarakat, diperlukan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara baik melalui diseminasi kebijakan dan regulasi, meliputi:

- Pemberian pertimbangan hukum sebanyak 54 pertimbangan hukum;

- Pelayanan bantuan hukum/saksi ahli sebanyak 48 kali;
- Pelayanan informasi pengaduan masyarakat melalui *Contact Center ESDM* 136 sebanyak 1.983 layanan;
- Pelayanan informasi melalui PPID Online Kementerian ESDM sebanyak 23 layanan;
- Pelayanan informasi melalui SP4N LAPOR! sebanyak 11 layanan;
- Edukasi dan sosialisasi kebijakan sektor migas melalui forum *Migas Goes To Campus* di Universitas Jenderal Soedirman;
- Penyelenggaraan *Regulatory Perspective Meet-Up* sebanyak 3 kali, sebagai kegiatan sosialisasi dan diskusi terkait peraturan perundang-undangan di lingkungan internal Direktorat Jenderal Migas;
- Pelayanan menerima kunjungan DPRD dan Konsultasi Daerah sebanyak 2 kali;
- Keikutsertaan pameran dalam negeri sebanyak 4 kali;
- Pelayanan informasi melalui *content creative* sebanyak 10 tema/isu;
- Penerbitan buku Kompilasi Peraturan terkait Bagi Hasil *Gross Split*.

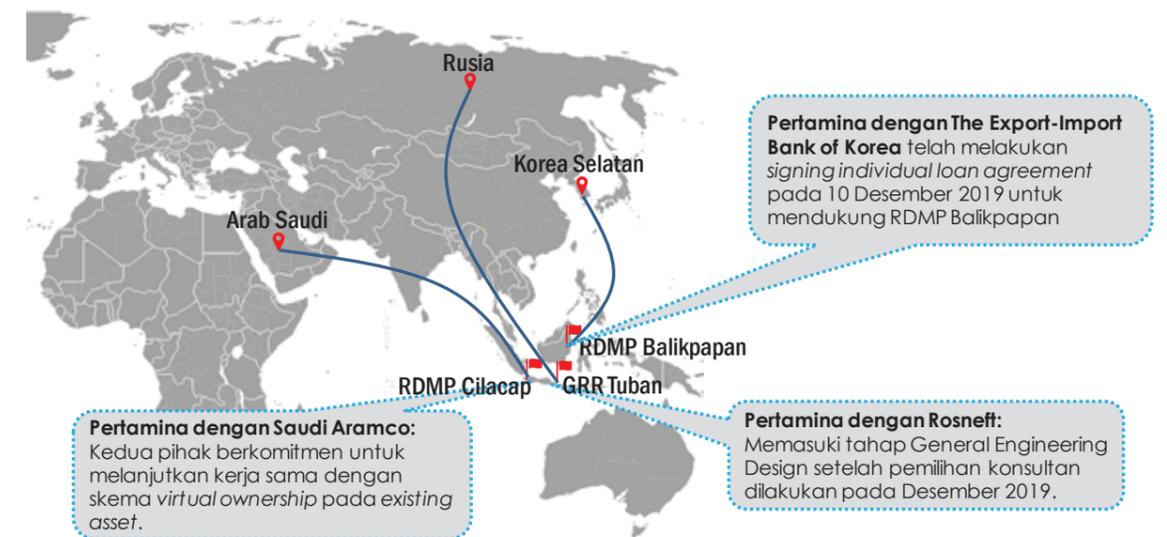
FASILITASI KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI

Sepanjang tahun 2019, Direktorat Jenderal Migas secara aktif turut terlibat dalam berbagai kegiatan kerja sama dalam bentuk pertemuan-pertemuan bilateral, multilateral, maupun regional. Sasaran yang ingin dicapai

melalui kegiatan tersebut adalah untuk mendukung ketahanan energi nasional dan juga mendorong pertumbuhan investasi di sektor minyak dan gas bumi.

A. FASILITASI KERJA SAMA PEMBANGUNAN KILANG NASIONAL

GAMBAR KERJA SAMA PROYEK PEMBANGUNAN KILANG NASIONAL



Kerja sama di subsektor migas antara Indonesia dengan Arab Saudi salah satunya dilaksanakan melalui kerja sama antara Pertamina dengan Saudi Aramco dalam Proyek Upgrading Refinery Unit IV Cilacap sebagai bagian Refinery Development Master Plan (RDMP). Perkiraan nilai investasi untuk proyek ini mencapai Rp 81,62 triliun.

Meskipun kerja sama Pertamina dan Saudi Aramco dalam proyek RDMP Kilang Cilacap telah diinisiasi sejak 25 November 2015 melalui penandatanganan Head of Agreement (HoA) dan penandatanganan Joint Venture pada 22 Desember 2016, akan tetapi hingga tahun 2019 kerja sama tersebut belum dapat terimplementasi. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek tersebut di antaranya adalah kesepakatan nilai aset yang ada saat ini dan penyediaan lahan. Kedua belah pihak terus berupaya agar kendala tersebut dapat teratasi.

Beberapa kendala juga dihadapi oleh Pertamina sendiri dalam pelaksanaan kerjasama tersebut. Beberapa di

antaranya adalah terkait pemberian insentif-insentif, peraturan perpajakan, penyediaan lahan, dan juga standar teknis. Untuk itu, Direktorat Jenderal Migas telah merevisi peraturan yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan proyek kilang yakni standar kandungan sulfur dalam produk solar pada tahun 2021, dan telah selesai direvisi pada bulan November 2019.

Adapun untuk proyek kerja sama dengan Rosneft dan The Export-Import Bank of Korea hingga saat ini masih berlangsung. Hingga akhir tahun 2019, kerja sama dalam proyek GRR Tuban telah memasuki tahap General Engineering Design setelah dilakukan pemilihan konsultan pada Desember 2019. Sementara dalam proyek RDMP Kilang Balikpapan, Pertamina dan The Export-Import Bank of Korea telah menandatangani Individual Loan Agreement pada 10 Desember 2019. Adapun perkiraan investasi untuk proyek kilang GRR Tuban adalah sebesar Rp 212 triliun, sementara untuk proyek kilang RDMP Balikpapan sebesar Rp 87,75 triliun.

B. FASILITASI KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN KUWAIT

Kerja sama dengan Kuwait telah dimulai sejak kunjungan Presiden RI KH Abdurrahman Wahid pada bulan November 1999 yang menjadi tonggak dalam hubungan Indonesia – Kuwait. Adapun pertemuan bilateral ke-1 Indonesia – Kuwait dilaksanakan di Singapura pada tanggal 15 Januari 2001.

Salah satu bentuk dukungan Direktorat Jenderal Migas dalam kerja sama tersebut saat ini adalah fasilitasi rencana pengembangan kerja sama Badak NGL di Kuwait. Koordinasi dengan Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM, Kementerian Luar Negeri, PT Pertamina, dan PT Badak NGL pun telah dilakukan beberapa kali untuk membahas potensi kerja sama yang dapat dilakukan dengan Kuwait. Saat ini PT Badak NGL tengah mengikuti pra-kualifikasi dokumen untuk proyek LNG di Al Zour Refinery Kuwait.

Dalam perkembangannya, kedua negara sepakat untuk memperluas area kerja sama pada MoU yakni dengan menambahkan lingkup Petrokimia di dalamnya. Adapun penandatanganan MoU on Cooperation in Field of Oil



Gambar MoU antara Indonesia - Kuwait dalam Kerja Sama Minyak, Gas Bumi, dan Petrokimia

and Gas and Petroleum dilakukan pada saat pelaksanaan *The First Meeting of the Joint Ministerial Committee*, tanggal 2 September 2019, di Kuwait. Sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia yang menandatangani adalah Retno L. P. Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, sementara perwakilan penandatanganan dari pihak Pemerintah Kuwait adalah Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, *Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs*.

Di samping itu, kedua belah pihak juga menyepakati pembentukan Komite Teknis yang akan menangani

penyusunan program terperinci dan tersinkronisasi untuk mengimplementasikan MoU yang telah ditandatangani tersebut.

Untuk merealisasikan cakupan kerja sama kedua negara pasca-penandatanganan MoU, ke depannya perlu dilakukan komunikasi dengan pihak Pemerintah Kuwait yang melibatkan perwakilan kedutaan besar masing-masing negara. Mengingat bidang industri petrokimia berada di luar pembinaan Direktorat Jenderal Migas, pelaksanaan kerja sama juga perlu melibatkan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

C. PARTISIPASI DALAM FORUM DAN PERTEMUAN KERJA SAMA

Direktorat Jenderal Migas juga secara aktif terlibat dalam beberapa pertemuan kerja sama yang diselenggarakan sepanjang tahun 2019. Partisipasi tersebut dilakukan

baik sebagai narasumber maupun sebagai anggota delegasi yakni dalam berbagai kegiatan berikut ini.

NO.	KEGIATAN	HASIL
1.	The 37th JCCP International Symposium Tokyo, Jepang, 22-25 Januari 2019.	Dalam kesempatan tersebut Direktur Pembinaan Program Migas hadir sebagai salah satu pembicara kunci yang memaparkan mengenai <i>PSC Gross Split for Attracting Upstream Oil and Gas Investors</i> .
2.	Indonesia-US-Japan: LNG Workshop Jakarta, Indonesia, 5 Maret 2019.	Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama antara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Acara dilaksanakan untuk mendiskusikan rencana pengembangan LNG Indonesia dan bagaimana perusahaan Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia bisa berkontribusi baik melalui pembiayaan maupun teknologi.
3.	The 5th APEC Oil and Gas Security Network Forum, dan The 2nd APEC Expert Group on Clean Fossil Energy Oil and Gas Meeting Sendai, Jepang, 10-12 April 2019	Delegasi dari Direktorat Pembinaan Program Migas dalam kesempatan tersebut menyampaikan paparan mengenai <i>Oil Stockpiling in Indonesia</i> dengan ditunjukkan bahwa tingkat permintaan kebutuhan dalam negeri pada tahun 2050 akan mencapai 4,6 juta bopd hanya untuk sektor transportasi. Pada hari kedua, Delegasi juga memaparkan mengenai <i>"Gas for Sustainable Energy Future"</i> yang menunjukkan pentingnya pengembangan LNG bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan tingkat konsumsi dalam negeri mengalami peningkatan menjadi 59,9% pada tahun 2018 dari total seluruh konsumsi LNG.
4.	2019 Partnership Forum – Oil and Gas Downstream Indonesia Seoul, Korea Selatan, 2-3 Juli 2019.	Perwakilan Direktorat Pembinaan Program Migas hadir sebagai delegasi. Kegiatan dilaksanakan untuk mempertemukan vendor Indonesia dan Korea dalam pembangunan Kilang RDMP Balikpapan. PT Pertamina (Persero) dan Korea Eximbank menandatangani <i>Framework Agreement</i> .

NO.	KEGIATAN	HASIL
5.	The 6th Indonesia – China Energy Forum Beijing, RRT, 8-9 Juli 2019,	Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi turut hadir sebagai salah satu anggota delegasi. Dalam pertemuan tersebut, beberapa diskusi yang dilakukan menyangkut peluang kerja sama antara Indonesia dengan RRT. Di antaranya adalah dalam pengembangan industri pipa gas dalam negeri dengan grup China National Petroleum Corporation (CNPC), dan pengembangan LNG Trading untuk penyediaan kebutuhan LNG di Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
6.	Delegasi Rapat Kerja Menteri ESDM Republik Indonesia dengan Menteri Energi dan Industri Persatuan Emirat Arab dan Pertemuan Business Gathering Indonesia - Uni Emirat Jakarta, Indonesia, 4-5 Juli 2019	Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi turut dalam rangkaian kegiatan ini sebagai salah seorang Delegasi Indonesia. Terkait potensi kerja sama subsektor minyak dan gas bumi, salah satu yang didorong untuk dilakukan adalah dalam pengembangan bisnis SPBU Adnoc di Indonesia dan juga dalam proyek-proyek kilang nasional.
7.	The 8th ASEAN+3 Oil Market and Natural Gas Forum and Business Dialogue Jakarta, Indonesia, 22 Juli 2019	Kegiatan dibuka oleh Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi dan dihadiri oleh perwakilan negara-negara ASEAN, Jepang, Korea Selatan, dan RRT. Pertemuan ini mendorong agar tercipta dialog B-to-B antar-BUMN Migas di negara-negara ASEAN untuk mewujudkan kerja sama yang lebih konkret pada masa depan.
8.	Pertemuan Direktorat Jenderal Migas dengan Perwakilan Departemen Energi Filipina Jakarta, Indonesia, 9 Agustus 2019	Delegasi Indonesia dalam pertemuan ini dipimpin oleh Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Adapun Delegasi Filipina dipimpin oleh Donato D. Marcos, <i>Undersecretary Department of Energy Philippine</i> . Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai kondisi dan kebijakan pengelolaan industri minyak dan gas bumi di Indonesia. Di samping itu, Filipina juga ingin mengetahui standar keteknisan migas yang berlaku di Indonesia. Salah satu potensi kerja sama yang dapat dikembangkan berikutnya adalah dalam pemanfaatan LNG di Filipina.
9.	Asia EDGE Natural Gas Regulation and Infrastructure Workshop oleh USAID dan NARUC Jakarta, Indonesia, 7 Oktober 2019	Kepala Subdirektorat Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi menyampaikan sambutan mengenai regulasi gas bumi di Indonesia, skema PSC <i>Gross Split</i> , infrastruktur gas Indonesia, dan juga beberapa peluang investasi gas bumi di Indonesia.
10.	The 10th Indonesia – Japan Energy Forum Bali, Indonesia, 10 Oktober 2019	Dalam pertemuan tersebut Inpex menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proyek Masela. Indonesia dan Jepang juga membuka potensi kerja sama dalam pemanfaatan jalur kereta api untuk pengangkutan LNG (<i>LNG on Rail</i>), <i>small scale LNG</i> , dan <i>LNG marine transportation</i> .

PELAKSANAAN PENGHARGAAN KESELAMATAN MIGAS

Direktorat Jenderal Migas setiap tahunnya secara rutin memberikan penghargaan Keselamatan Migas. Penghargaan Keselamatan Migas sendiri adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Migas pada Kementerian ESDM untuk memberikan apresiasi kepada semua BU/BUT baik di kegiatan operasi hulu atau hilir yang tidak terjadi kehilangan jam kerja aman dalam periode tertentu dan penghargaan terhadap Pembinaan Keselamatan Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Penghargaan Keselamatan Migas atau yang biasa disebut "PATRA NIRBHAYA KARYA" diberikan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan jenis usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Kelas penghargaan "Patra Nirbhaya Karya" dengan kriteria jam kerja aman terdiri atas Pratama, Madya, dan Utama. BU/BUT yang mendapat Penghargaan dalam kategori Patra Nirbhaya Karya Utama berhak mendapatkan Penghargaan lanjutan, yaitu Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha

I, Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha II, Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha III dan seterusnya, dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah mencapai jam kerja sebesar kelipatan dari jam kerja Patra Nirbhaya Karya Utama.

Pada Tahun 2019, Direktorat Jenderal Migas juga memberikan penghargaan manajemen Keselamatan Migas "PATRA KARYA" yaitu penghargaan tertinggi dari Keselamatan Migas yang diberikan kepada KKKS dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Hilir terkait Manajemen Keselamatan Migas.

Pemberian penghargaan kepada penerima Penghargaan Keselamatan Migas dilaksanakan pada 26 November 2019 di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan kepada 69 penerima penghargaan Patra Nirbhaya Karya Pratama, Madya, dan Utama, dan 9 perusahaan penerima penghargaan Patra Karya Raksa.



DUKUNGAN KEGIATAN LAINNYA

PENGELOLAAN KEUANGAN

Realisasi Pendapatan Direktorat Jenderal Migas pada Tahun Anggaran (TA) 2019 terdiri dari berbagai macam sektor, antara lain:

AKUN	KETERANGAN	PENDAPATAN NEGARA
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	12.000.100
425133	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	313.150.000
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	66.000.000
425169	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	4.566.817.983.801
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.226.827.853
425839	Pendapatan Denda Lainnya	1.692.156.837
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	133.051.646
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	2.373.913.551
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	57.973.766.249
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	2.926.000
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	4.810.7950
TOTAL		4.630.616.586.832

Hingga saat ini Direktorat Jenderal Migas masih menggunakan aplikasi CMS BRI dalam proses pencatatan penerimaan PNBP Migas yang bersumber dari *Bid Document*, *Signature Bonus* dan *Firm Commitment*. Hal

tersebut dilakukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi Bendahara Penerimaan Migas dalam melakukan penyetorkan dan pengawasan setoran yang masuk dan keluar dalam satu periode.



Selanjutnya, pengelolaan penerimaan negara dicatatkan pada suatu sistem aplikasi perbendaharaan yaitu SIMPONI yang merupakan sistem informasi PNBP online yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.



Sementara itu, realisasi Belanja Direktorat Jenderal Migas pada TA 2019 adalah sebesar Rp 1.090.869.367.641,- atau sebesar 96,89% dari pagu yang dianggarkan.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019 tersaji pada Tabel di bawah ini.

TABEL RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TA 2019

URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	% REAL THD ANGG
Belanja Pegawai	79.730.578.000	78.299.279.313	98,38
Belanja Barang	301.354.065.000	290.021.623.558	96,36
Belanja Modal	744.809.835.000	723.655.397.194	97,16
TOTAL BELANJA KOTOR	1.125.894.478.000	1.091.976.300.065	
Pengembalian Belanja		(1.106.932.424)	
BELANJA NETTO		1,090,869,367,641	96,89

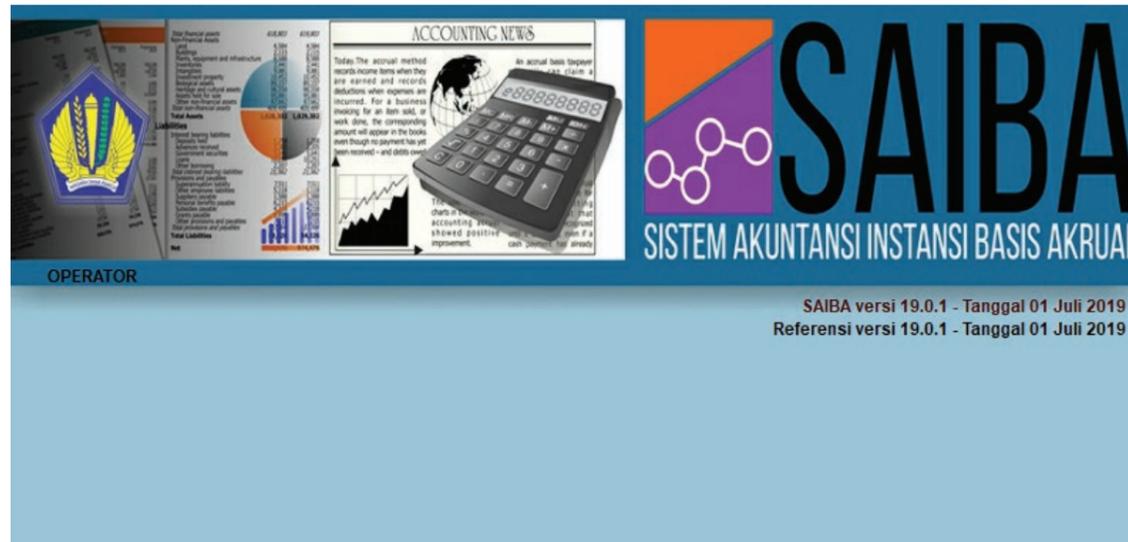
Dalam rangka pengadministrasian BMN, pencatatan BMN dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), yang merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SIMAK-BMN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan pelaporan manajerial.

Jumlah Aset BMN Migas tercatat sebesar Rp.2.907.963.085.393,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.312.831.949.891,-, Aset Tetap sebesar Rp.2.566.631.864.677,- dan Aset Lainnya sebesar Rp.28.499.270.825,-.



Sementara itu, pelaksanaan pengelolaan akuntansi dan laporan keuangan dilakukan melalui Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dalam pencatatan transaksi keuangan Direktorat Jenderal Migas, rekonsiliasi data SIMAK-BMN dengan UAKPB, rekonsiliasi data dengan KPPN dan Biro Keuangan Kementerian ESDM, serta menyusun

laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya pengelolaan dilakukan melalui aplikasi SAIBA sebagai aplikasi standar yang digunakan oleh Satker seluruh Kementerian/Lembaga yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.



Direktorat Jenderal Migas saat ini tengah melaksanakan penerapan, penilaian, dan reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Pelaporan Keuangan disusun dengan pengendalian intern yang memadai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019.

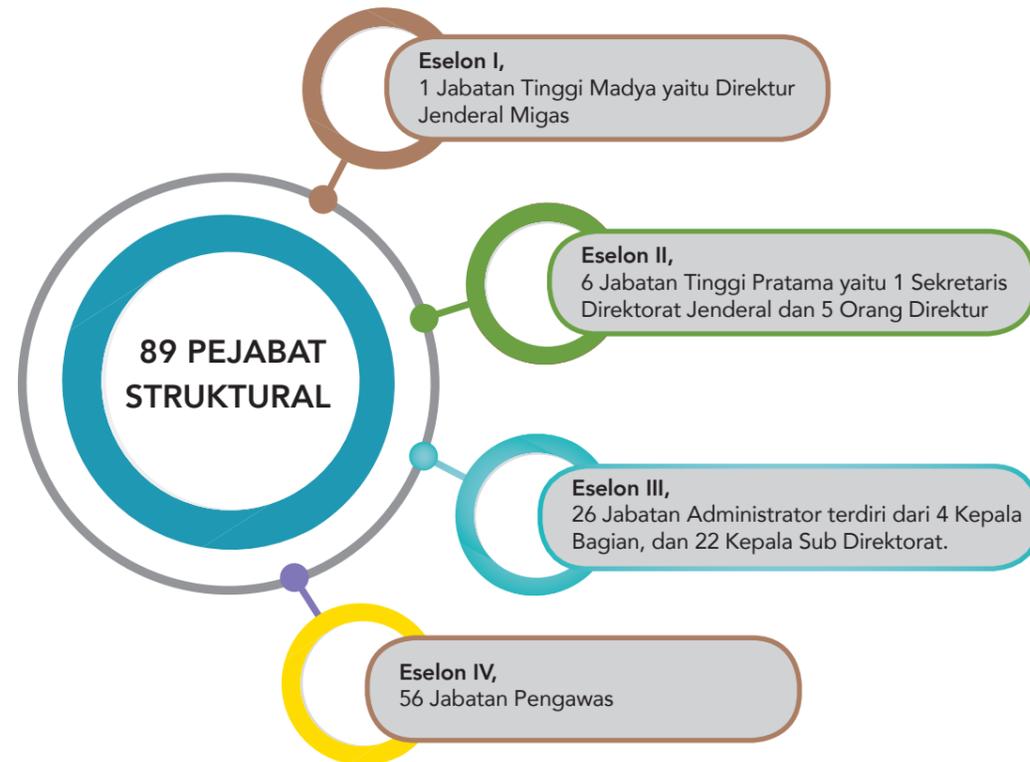
Direktorat Jenderal Migas juga telah mengembangkan SKDJM (Sistem Keuangan Direktorat Jenderal Migas) yang bertujuan untuk menyajikan informasi secara cepat dan akurat atas pengelolaan keuangan. Jenis informasi yang dihasilkan antara lain:

1. Laporan Monitoring SPP;
2. Laporan Monitoring SPM;
3. Laporan Monitoring SP2D; dan
4. Laporan Monitoring Realisasi Anggaran.



PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

JABATAN ESELON DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI



Guna peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), Direktorat Jenderal Migas mengikutsertakan ASN ke dalam tugas belajar dan melalui pendidikan dan pelatihan sebagai berikut.

JUMLAH PESERTA TUGAS BELAJAR:	JUMLAH PESERTA DIKLAT:
S3 = 2	Diklat Struktural = 5
S2 = 6	Diklat Fungsional = 6
	Diklat Teknis = 50

Di samping itu, guna meningkatkan kinerja ASN, maka Pemerintah perlu menerapkan sistem *reward & punishment* kepada ASN. Salah satu bentuk reward yang diberikan negara kepada ASN yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta

penuh dengan pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin, sehingga dapat dijadikan teladan, yaitu penghargaan Satya Lancana Karya Satya (SLKS). Pada Tahun 2019, terdapat 36 ASN Direktorat Jenderal Migas yang memperoleh SLKS dengan rincian sebagai berikut:

TANDA KEHORMATAN	JUMLAH PEGAWAI
Satya Lancana Karya Satya X	29 orang
Satya Lancana Karya Satya XX	2 orang
Satya Lancana Karya Satya XXX	5 orang



Kemudian, dalam rangka memberikan apresiasi terhadap keberhasilan pemikiran, kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan pembangunan serta penemuan baru di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, yang memberikan dampak kemajuan yang sangat berarti dalam pembangunan nasional khususnya di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, 5 orang pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Migas memperoleh penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral. Kelima orang tersebut adalah:

1. Agung Kuswandono, ST., MKKK atas keberhasilan pengawasan pembangunan Jargas dan program konversi Konkrit Nelayan dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur;
2. Sugiarto, ST, MT atas ketepatan waktu, jumlah dan kualitas dalam penyelesaian tugas sebagai P2K Jargas TA 2018 di Balikpapan, Bontang dan Penajam Paser Utara;
3. Irine Yulianingsih, ST, M.Si atas ketepatan waktu, jumlah dan kualitas dalam penyelesaian tugas sebagai P2K Konkrit Nelayan wilayah 2;
4. Agustiawan Mendrofa atas keberhasilan pelaksanaan pengelolaan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta integrasi data dan aplikasi melalui aplikasi perizinan satu pintu pada laman <https://perizinan.esdm.go.id>;
5. DwiAryani atas keberhasilan pelaksanaan pengelolaan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta integrasi data dan aplikasi melalui aplikasi perizinan satu pintu pada laman <https://perizinan.esdm.go.id>.

• INDEKS PROFESIONALITAS ASN (IP ASN)

Pencapaian Nilai Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) pada tahun 2019 mencapai **30,28** (bobot nilai maksimal 40) pada penilaian Dimensi Kompetensi. Pada Dimensi Kinerja yang digunakan untuk mengukur penilaian kinerja ASN, Direktorat Jenderal Migas memperoleh Nilai **27,36** (bobot nilai maksimal 30). Sementara itu, Dimensi Kualifikasi yang digunakan untuk mengukur kualifikasi pendidikan formal ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Migas dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, pencapaian Nilai Indeks-nya adalah **15,21** (bobot nilai maksimal 25). Dimensi Disiplin

yang digunakan untuk mengukur hukuman yang pernah diterima ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Migas mencapai nilai **4,98** (bobot nilai maksimal 5). Sehingga total Nilai Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Migas pada tahun 2019 adalah **77,83**. Berdasarkan hasil tersebut, selanjutnya akan dilakukan upaya penguatan atas pendidikan dan pelatihan ASN Migas dengan berorientasi pada pelayanan masyarakat, peningkatan kualitas kerja dan tata kelola pemerintahan, serta menjaga akuntabilitas.

• MANAJEMEN PERUBAHAN

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kapasitas adaptasi Direktorat Jenderal Migas terhadap tantangan pembangunan dan perubahan global, Agen Perubahan Direktorat Jenderal Migas sebagai penggerak perubahan dan *role of model*, diberdayakan untuk melakukan perubahan-perubahan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi dan wawasan pegawai serta kebahagiaan pegawai sebagai wujud penanaman Nilai-nilai Kementerian ESDM yang Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif, dan Berarti. Adapun bentuk-bentuk

kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pembuatan brosur Nilai-nilai Kementerian ESDM untuk dibagikan kepada Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
2. Kegiatan *sharing session* dengan narasumber sesuai pengalaman dan ahli dalam bidangnya masing-masing.
 - a. *Workshop* Manajemen Perubahan yang bekerja sama dengan Komunitas HRD di bidang Migas pada tanggal 7 Agustus 2019 bertempat di Gedung Ibnu Sutowo.



Dokumentasi Pelaksanaan Workshop Manajemen Perubahan Ditjen Migas

- b. Migas Berbagi Inspirasi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2019;



Narasumber: Mimin Marnasari yang merupakan Survivor Kanker



Narasumber: Ma'ruf Afandi yang merupakan ahli kegeologian

- c. *Tectonic & Petroleum Geology of The Western*; yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2019.

- d. *Process Safety in Drilling Operation: The Impotance of Maintaining Double Barrier*, tanggal 18 September 2019.



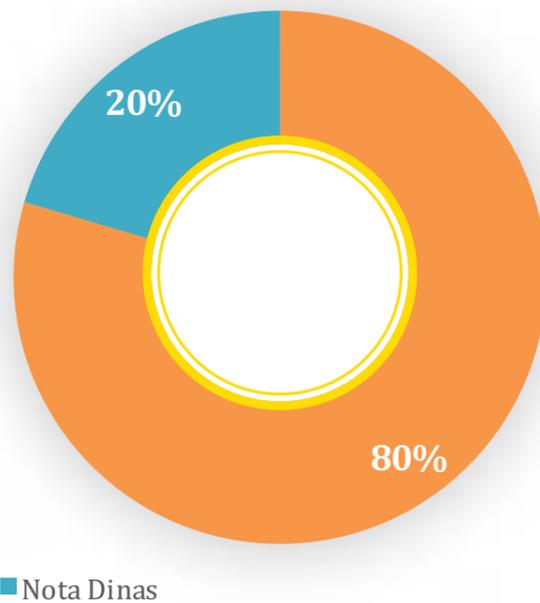
PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN

Direktorat Jenderal Migas sebagai unit yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi tentunya akan menghasilkan begitu banyak rekaman kegiatan tertulis berupa surat dinas, surat izin, surat penugasan,

dll. yang didistribusikan baik ke internal instansi maupun eksternal instansi.

Pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah menerima dan mendistribusikan surat dan nota dinas, sebagaimana diagram di bawah:

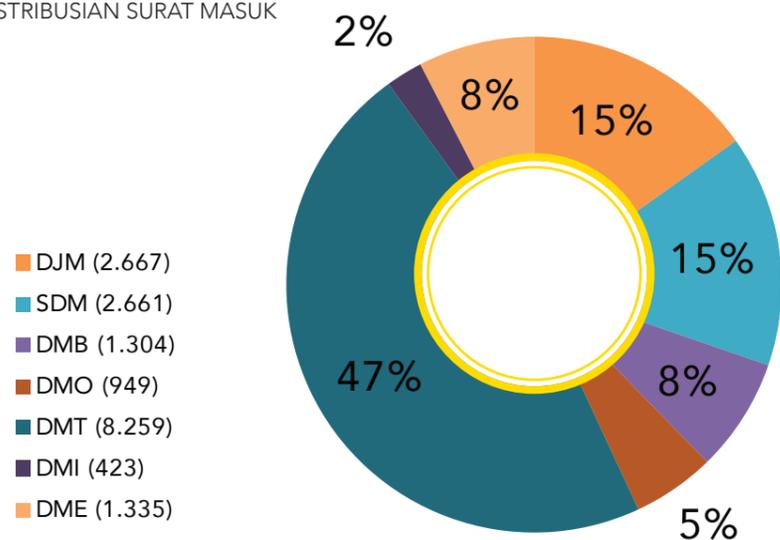
GRAFIK PENERIMAAN SURAT MASUK



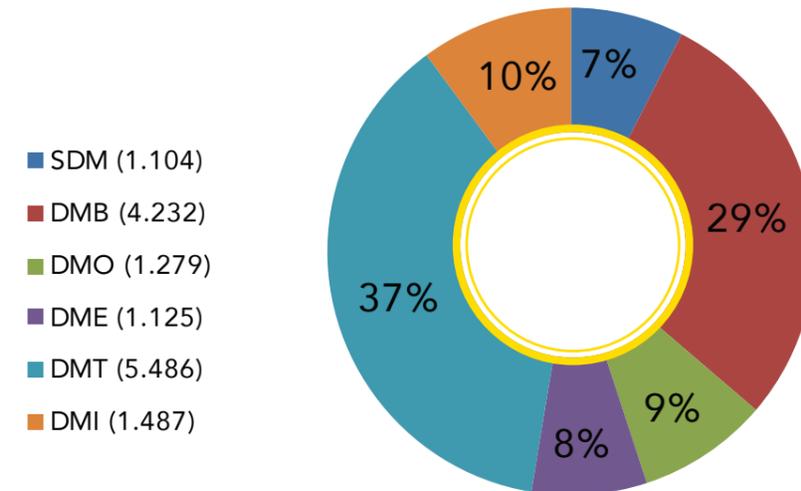
Total keseluruhan surat masuk sebanyak 24.430 surat, terdiri dari 4.994 surat dari internal instansi (nota dinas)

dan 19.436 surat dari eksternal instansi (17.598 surat dinas dan 1.838 surat tembusan).

GRAFIK PENDISTRIBUSIAN SURAT MASUK



GRAFIK PENDISTRIBUSIAN SURAT KELUAR



Selain kegiatan surat menyurat, terdapat pula kegiatan kearsipan yang berfokus kepada penataan arsip sesuai prinsip dan ketentuan perundangan urusan kearsipan. Kebutuhan arsip untuk pemeriksaan auditor baik internal dan eksternal pun menjadi sasaran tujuan yang lebih luas dalam menambah layanan kebutuhan arsip untuk pihak penegak hukum. Total jumlah arsip yang dikelola ruang arsip Direktorat Jenderal Migas mendekati jumlah 10.000 boks atau setara dengan 2.000 meter linear. Rincian jumlah boks yang sudah ada sebagai gambaran pertambahan arsip dari unit kerja di lingkungan

Direktorat Jenderal Migas adalah sebagai berikut:

1. Sejumlah 5.200 boks bersifat arsip inaktif disimpan di ruang sewa ANRI (kerjasama sistem bayar sewa dengan satuan boks pernah bulan).
2. Lebih dari 2.000 boks telah dipindahkan ke gedung pusat arsip Kementerian ESDM Pondok Ranji). Pada tahun 2019 telah dipindahkan sebanyak 245 boks menggunakan konsultan pihak ketiga.
3. Kurang lebih 3.000 boks arsip tersimpan di ruang Arsip Direktorat Jenderal Migas Lantai 4.

PENGELOLAAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA

• PENGGANTIAN NAMA GEDUNG

Sejak dikeluarkannya Berita Acara Pengalihan Status Penggunaan BMN Nomor 001.BA/92/SJU/2015 tanggal 15 Januari 2015 dari Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Cq Biro Umum kepada Direktorat Jenderal Migas, pengelolaan gedung menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Direktorat Jenderal Migas.

Nama gedung ini saat diserahkan bernama Gedung Plaza Centris yang kemudian diubah menjadi Gedung Migas. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 46.K/93/MEM/2019 tanggal 4 Maret

2019 tentang Penetapan Nama Gedung Kantor di Lingkungan Kementerian ESDM, Gedung Migas kini telah berganti nama menjadi Gedung Ibnu Sutowo.

Pemberian nama-nama gedung di lingkungan Kementerian ESDM merupakan bentuk upaya penataan dan penertiban nama gedung kantor serta pemberian identitas gedung kantor di lingkungan Kementerian ESDM, serta sebagai wujud penghargaan dan penghormatan kepada tokoh-tokoh bangsa di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.



• POLIKLINIK DIREKTORAT JENDERAL MIGAS

Kegiatan layanan poliklinik Direktorat Jenderal Migas semula memiliki izin klinik dengan statusnya "Klinik Pratama". Sejak 21 Mei 2019, Poliklinik Direktorat Jenderal Migas telah berubah statusnya menjadi "Klinik Utama" sesuai Surat Keputusan dari Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Kecamatan Setia Budi, dengan Izin Operasional Nomor 1/B.6/31.74.02/3/-1.779.3/e/2019. Hal ini disebabkan oleh keberadaan dokter spesialis pada Poliklinik Direktorat Jenderal Migas.

Adapun komposisi petugas Pelayanan Poliklinik Direktorat Jenderal Migas terdiri dari:

- a. Dokter Gigi 2 (dua) orang;
- b. Dokter Umum 2 (dua) orang;
- c. Perawat Gigi 2 (dua) orang;
- d. Perawat Umum 1 (satu) orang;
- e. Apoteker/Tenaga Farmasi 1 (satu) orang;
- f. Administrasi 1 (satu) orang.



• PEMASANGAN PLTS ROOFTOP PADA GEDUNG IBNU SUTOWO DAN RUMAH DINAS ESELON I DAN II

Menindaklanjuti Instruksi Menteri ESDM Nomor 02 I/20/MEM.1/2019 tentang Pemasangan Instalasi Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap pada seluruh Gedung, Bangunan Kantor, Rumah Dinas Pejabat Eselon I dan II dan Pos pengamat Gunung Api di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang berada di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, maka pada Tahun 2019, Direktorat Jenderal Migas bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (alokasi anggaran dari Direktorat Jenderal EBTKE), telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan 80 modul panel berkapasitas 26 KWp (dua puluh enam kilowatt-peak) pada atap Gedung Ibnu Sutowo dengan sistem *on grid* (langsung

tersambung dengan daya PLN). Pembangunan tersebut diharapkan dapat mendukung program Hemat Energi dan Air di Direktorat Jenderal Migas sehingga dapat mengurangi beban biaya pemakaian listrik pada Gedung Ibnu Sutowo.

Selain pada Gedung Ibnu Sutowo, Pembangunan PLTS juga dilakukan pada Rumah Dinas Jabatan Eselon I dengan kapasitas 7 KWp (tujuh kilowatt-peak) yang beralamat di Jln. Wolter Monginsidi No.8, Jakarta Selatan dan Rumah Dinas Eselon II dengan kapasitas 3 KWp (tiga kilowatt-peak) yang beralamat di Jln. Komplek Migas 20, Jakarta Barat.



PENGELOLAAN INFORMASI DAN AKUNTABILITAS

• PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pada tahun 2019, pengelolaan data subsektor migas telah dilaksanakan melalui koordinasi bersama unit-unit internal Direktorat Jenderal Migas, SKK Migas, BPH Migas, Pertamina dan PGN, dan dikoordinasikan Satu Pintu melalui Pusdatin ESDM untuk memenuhi kebutuhan Rekonsiliasi data Neraca Perdagangan dan Pembayaran Indonesia (NPI), Bauran Energi serta Buku Saku Menteri ESDM.

Rekonsiliasi NPI dilakukan setiap bulan sebanyak 3 kali yaitu setiap tanggal 8, 15, dan 30. Mekanisme ini dilakukan untuk mengetahui secara aktual dan akurat data, serta ruang untuk pembaruan data realisasi ekspor maupun impor minyak dan gas bumi yang izin maupun rekomendasinya dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Migas sesuai HS Code Komoditas. Adapun penerima manfaat dari hasil rekonsiliasi NPI yaitu Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik dan Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Pengelolaan data Bauran Energi dilaksanakan untuk memperoleh angka Bauran Energi pada Semester I 2019 dan Final tahun 2019 yang dikoordinasikan oleh Pusdatin ESDM bersama dengan Dewan Energi Nasional. Sedangkan pada penghujung tahun 2019, sesuai dengan arahan Menteri ESDM Arifin Tasrif, pengelolaan data subsektor migas berkontribusi juga dalam mendukung data-data yang dibutuhkan pada Buku Saku Menteri ESDM yang berisi konten Summary Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Migas, Progress Kinerja Subsektor Migas serta detail dari tren data capaian IKU Direktorat Jenderal Migas. Adapun periode pemutakhiran data berlangsung setiap bulan tanggal 11 melalui rekonsiliasi data Buku Saku di internal Direktorat Jenderal Migas dan setiap tanggal 12 dengan Pusdatin ESDM. Setiap tanggal 15, Buku Saku tersebut dicetak untuk keperluan Menteri ESDM dalam memantau kemajuan dan perkembangan kegiatan perusahaan subsektor migas sebagai bahan informasi pendukung pada saat mengikuti Sidang Kabinet, Rapat Kerja maupun kunjungan kerja.

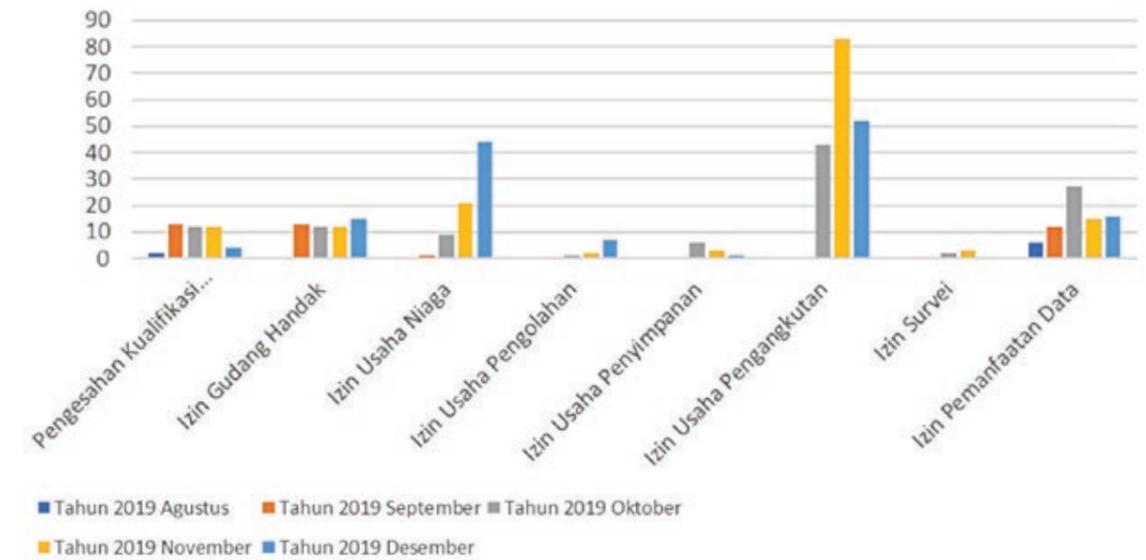
Di sisi lain, transformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Direktorat Jenderal Migas dilakukan dengan mengadopsi Teknologi Informasi (TI). Seiring dengan komitmen pimpinan dalam memperkuat bidang TI Kementerian, dilakukan penyeragaman dan integrasi sistem secara masif. Sepuluh dari delapan

belas (18) layanan perizinan dan non-perizinan Direktorat Jenderal Migas, diintegrasikan dalam sistem daring (*online*) perizinan terpadu Kementerian ESDM. Layanan tersebut meliputi, perizinan Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas yang terdiri dari Izin Survei Umum Migas dan Izin Pemanfaatan Data Migas; perizinan dan non-perizinan Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas yang terdiri dari Izin Usaha Pengolahan, Rekomendasi Ekspor Impor Pengolahan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Niaga, dan Rekomendasi Ekspor Impor Niaga Migas; Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas antara lain Izin Gudang Bahan Peledak dan Pengesahan Kualifikasi Ahli Las.

Sistem daring ini tidak hanya mengubah sistem pemberkasan yang tadinya berupa dokumen cetak menjadi berkas digital tetapi juga dilakukannya *business process reengineering* (BPR) terhadap layanan tersebut. Dampak positifnya adalah efisiensi alur pemrosesan, simplifikasi dokumen persyaratan perizinan/non perizinan dan transparansi proses perizinan.

Pengajuan permohonan Badan Usaha (BU) via aplikasi meliputi pendaftaran akun secara mandiri, pemverifikasian data akun profil perusahaan dan pengajuan izin. Apabila dokumen yang disampaikan BU sudah lengkap dan benar, maka argo pemrosesan mulai berjalan. Komitmen efisiensi alur kerja diwujudkan dengan perbaikan *service level agreement* (SLA). SLA perizinan di Direktorat Jenderal Migas sendiri berkisar delapan hingga lima belas hari kerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Terkait hal ini, pengesahan akan memerlukan waktu sekitar dua hingga lima hari sesuai dengan ketentuan pelayanan di BKPM. Sebagai contoh perizinan hilir Migas, mekanisme pemrosesan internal secara manual yang sebelumnya membutuhkan jangka waktu 20 hari kerja kini dipangkas hanya maksimal 13 hari kerja (apabila diperlukan kunjungan lapangan/presentasi tambahan). Untuk konsep izin usaha yang telah disetujui, akan dikirimkan ke BKPM melalui sistem untuk ditandatangan. Badan Usaha dapat menelusuri perkembangan permohonannya dengan memasukkan kode tracking dalam menu Monitoring Berkas.

GRAFIK PENGAJUAN IZIN/NON-IZIN PADA APLIKASI BARU MIGAS 2019



Keefektifan aplikasi perizinan dapat terlihat dari jumlah pengajuan izin sejak diluncurkan bulan Agustus 2019 yang sudah mencapai 1.464 permohonan dengan rincian 449 diterima dan 1.015 permohonan ditolak. Jumlah permohonan yang masuk di bulan Agustus sebanyak 10 pengajuan dan di bulan September terdapat 53 pengajuan izin. Kemudian terjadi peningkatan permohonan yang signifikan dengan rerata pengajuan di bulan Oktober hingga Desember 2019 mencapai 467 permohonan. Dari keseluruhan pengajuan, tiga teratas pemohon izin terbanyak adalah Izin Usaha Pengangkutan sebanyak 178 pengajuan, Izin Pemanfaatan Data 76 pengajuan dan Izin Usaha Niaga sebanyak 75 pengajuan.

Untuk lebih obyektif menilai sistem ini, dilakukan survei Kepuasan Layanan Publik 2019. Survei berlangsung selama satu bulan yaitu September hingga Oktober 2019. Hasil survei menginformasikan bahwa sebagian besar badan usaha menyatakan puas terhadap transformasi digital perizinan. Selain itu, responden juga memberikan saran peningkatan kualitas sistem sebagai evaluasi kinerja terhadap sistem saat ini.

• AKUNTABILITAS KINERJA

Direktorat Jenderal Migas setiap tahunnya menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai panduan dalam menjalankan kegiatan keorganisasian. RKT 2019 disusun



dengan semangat untuk mengimplementasikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 yang merupakan penjabaran tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RKP 2019 bertemakan "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas" yang berfokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa

indikator prioritas nasional di subsektor Migas di antaranya, fasilitasi pembangunan kilang GRR dan RDMP, Penawaran Wilayah Kerja Migas konvensional dan Nonkonvensional, program konversi BBM ke BBG, dan pembangunan jaringan gas kota. Guna menjaga pencapaian target tersebut, maka pada penyusunan RKT 2019 dilakukan peningkatan mutu perencanaan baik dari sisi kegiatan maupun anggaran, dengan menyajikan indikator kinerja kegiatan dan jumlah anggaran yang mendukungnya.

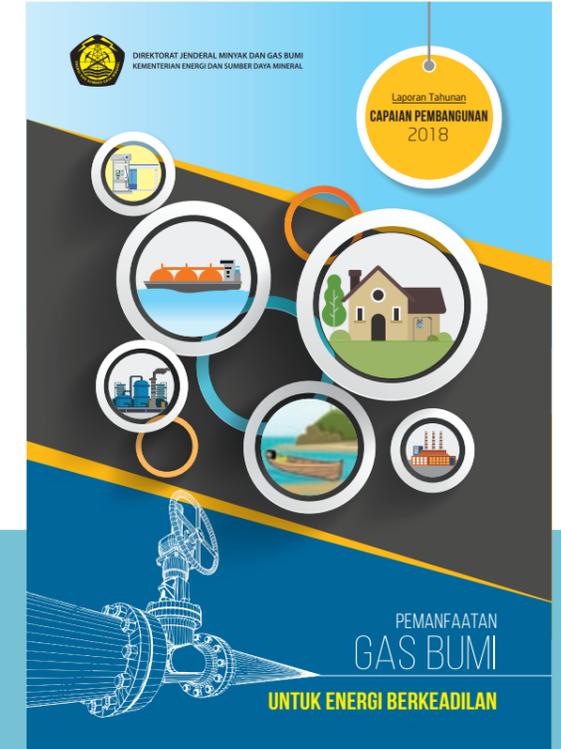
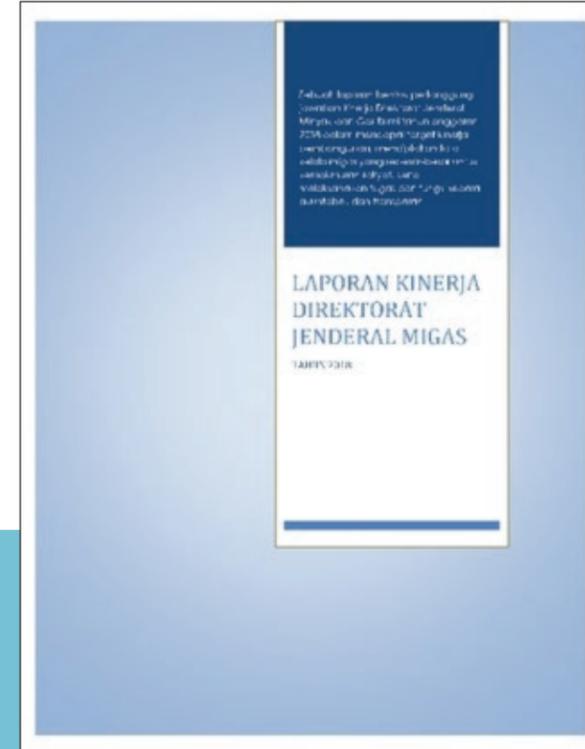
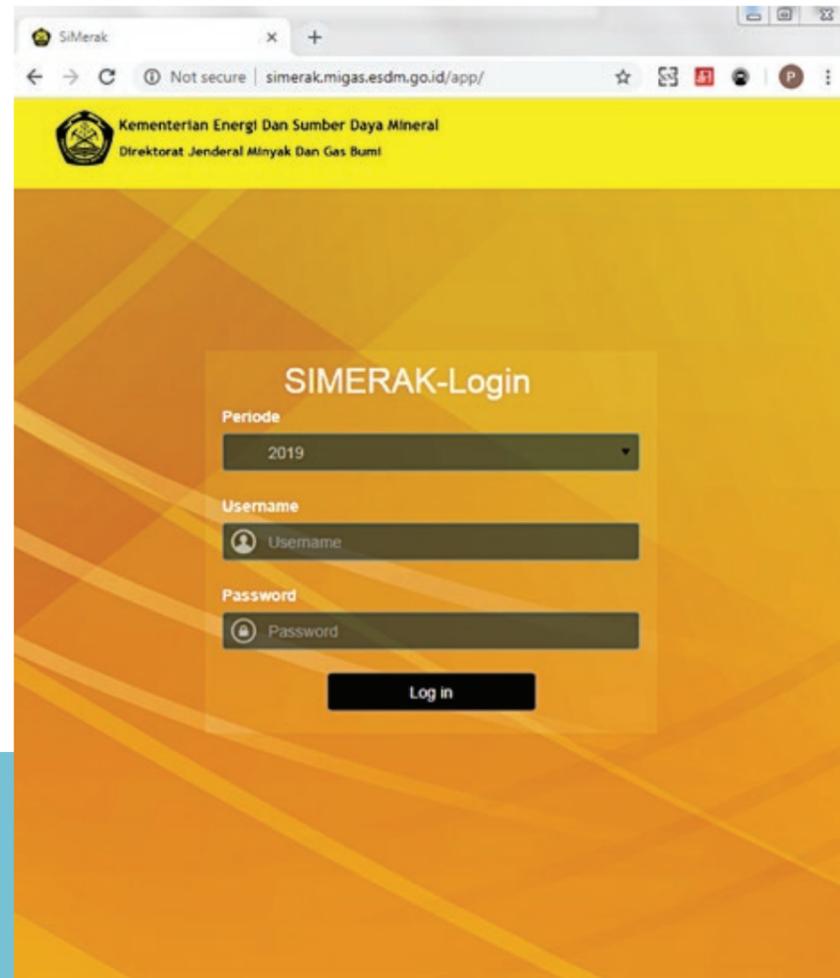
Pada tahun 2019 Direktorat Jenderal Migas juga telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di antaranya melalui:

- Peningkatan fitur-fitur sistem informasi monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja (SIMERAK);
- penerapan *cascading* yang lebih baik melalui skema *balanced scored card* pada dokumen Renstra 2020-2024;

- penyelarasan perjanjian kinerja; dan
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih terukur secara periodik melalui penguatan pada pelaksanaan sistem pengendalian internal Direktorat Jenderal Migas.

Pelaksanaan akuntabilitas melalui pengendalian internal yang lebih baik diharapkan dapat meminimalkan resiko kegagalan dalam pencapaian target-target kinerja. Selain itu, faktor-faktor kinerja yang dalam rentang kendali organisasi diupayakan dapat diselesaikan seoptimal mungkin.

Penyajian akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Migas disampaikan melalui penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan yang dapat diakses oleh publik melalui web migas.esdm.go.id.







**DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

GEDUNG IBNU SUTOWO

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-5, Kuningan

Jakarta 12910, Indonesia

T. +62 21 5268910 (hunting)

F. +62 21 5269114



www.migas.esdm.go.id



[@halomigas](https://www.instagram.com/halomigas)



[Halo Migas Ditjen Migas](#)



[@halomigas](https://twitter.com/halomigas)

